

PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI ACEH

PENULIS:

ICHSAN, Ph.D

EDITOR:

HIJRI JULIANSYAH, S.P., M.Ec

GHAZALI SYAMNI, S.E., M.Sc

Diterbitkan Oleh:



PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI ACEH

Oleh : ICHSAN, Ph.D

Hak Cipta © 2017 pada Penulis

Editor : *Hijri Juliansyah, S.P., M.Ec*

: *Ghazali Syamni, S.E., M.Sc*

Cover Design : *M. Rizki, S. Kom. I^(SEFA)*

Layout : *M. Rizki, S. Kom. I^(SEFA)*

Pracetak dan Produksi : *CV. Sefa Bumi Persada*

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Jl. B. Aceh – Medan, Alue Awe - Lhokseumawe

email: sefabumipersada@gmail.com

Telp. 085260363550

Ichsan, Ph.D

Pengembangan Agroindustri Di Aceh

Cetakan I : 2016 – Lhokseumawe

Cetakan II : 2017 – Lhokseumawe

ISBN – 978-602-6960-28-3

1. Hal. 169: 16,5 x 23 cm

I. Judul

KATA PENGANTAR PENULIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) tahun 2005-2025, menyatakan bahwa visi pembangunan Aceh adalah “Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera.” Visi pembangunan ini dicapai melalui tahapan-tahapan dengan target pencapaian pembangunannya masing-masing. Adapun tahap-tahap pembangunan jangka panjang Aceh dalam jangka waktu 2005-2025 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pembangunan ke-1 (2005 – 2012)

Tahap pembangunan ini menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan masyarakat Aceh pasca tsunami dalam berbagai aspek: infrastruktur, ekonomi, sosial, agama, dan kelembagaan. Di akhir tahap pembangunan pertama Aceh diharapkan telah pulih dari kehancuran akibat tsunami dan memiliki pondasi yang kuat untuk menjalani berbagai aktivitas pembangunan.

2. Tahap Pembangunan ke-2 (2013 – 2017)

Periode kedua pembangunan ini difokuskan untuk mencapai target-target tujuan pembangunan milenium dan mendukung pengembangan agroindustri di Aceh. Pembangunan diarahkan agar dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui berkembangnya industri berbasis pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan beban tanggungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs), menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan mengembangkan wilayah strategis sesuai dengan potensi.

3. Tahap Pembangunan ke-3 (2018 – 2022)

Tahapan ini menitikberatkan pembangunan pada pematapan basis pengembangan industri manufaktur yang sejalan dengan berkembangnya agroindustri. Diharapkan pada era ini akan tersedia sumber daya manusia terampil yang mendukung berkembangnya industri manufaktur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

4. Tahap Pembangunan ke-4 (2023 – 2025)

Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledg-based economy*) sebagai kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur pada tahap terdahulu. Dalam rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang ini diharapkan akan terwujud masyarakat Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera.

Mengacu pada dokumen RPJPA, saat ini Aceh telah memasuki tahap pembangunan ke-2 yang berorientasi pada pengembangan agroindustri. Pengembangan industri pengolahan yang bahan baku utamanya bersumber dari pertanian ini merupakan pilihan yang tepat dan strategis mengingat sebagian besar penduduk Aceh menopang hidupnya pada sektor pertanian. Meningkatnya peran sektor agroindustri tentu akan menumbuhkembangkan sektor pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, menambah lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang Aceh tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan visi pembangunan Aceh dalam RPJMA tahun 2012-2017 yaitu “Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki.”

Visi pembangunan jangka menengah ini diterjemahkan dalam sejumlah misi. Setidaknya terdapat dua misi utama yang dicanangkan

yang terkait langsung dengan bidang ekonomi, yaitu, misi ketiga dan misi kelima. Misi ketiga adalah “Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.” Misi ini bertujuan untuk mewujudkan struktur ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal. Dimana sasarannya diantaranya adalah meningkatnya struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan misi kelima adalah “Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.” Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA dengan sasaran diantaranya meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah.

Kedua misi tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan pada periode 2012-2017 menekankan arti penting sektor pertanian dan perlunya upaya peningkatan nilai tambah ekonomi, termasuk pada sektor pertanian. Mengacu pada misi-misi tersebut, Pemerintah Aceh melalui dinas-dinas yang terkait dengan pengembangan sektor agroindustri perlu menerapkan kebijakan dan strategi yang terpadu dan komprehensif sehingga pengembangan sektor agroindustri ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sampai saat ini, agroindustri di Aceh belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Produk pertanian Aceh cenderung masih hanya dalam bentuk bahan baku mentah, yang menyebabkan rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah. Terbatasnya peran agroindustri dalam perekonomian di Aceh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan yang terkait dengan mutu Sumber Daya Manusia, sarana prasarana pertanian, teknologi, sumber pendanaan, pemasaran, ketersediaan dan mutu bahan baku, *forward-backward linkage* (keterkaitan ke depan dan ke belakang antara agroindustri dengan industri-industri lain), *research and development* (riset dan pengembangan), serta dukungan kebijakan.

Buku ini bertujuan untuk mengulas berbagai isu dan upaya pengembangan agroindustri di Aceh yang berbasis komoditas unggulan daerah. Hasil kajian dalam buku ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memformulasikan strategi pengembangan agroindustri di Aceh di masa depan. Dengan demikian, pada gilirannya pembangunan yang dilakukan akan dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha pertanian di Aceh.

Lhokseumawe, 20 Pebruari 2017

Ichsan, Ph.D

KATA PENGANTAR EDITOR

Buku ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Ichsan, Ph.D, yang bersumber dari kegiatan penelitiannya. Meskipun penelitian tersebut telah berlangsung beberapa tahun lalu, kami pikir isinya masih relevan untuk keperluan saat ini. Isu-isu yang mengemuka dalam buku ini terkait dengan berbagai persoalan dalam agroindustri di Aceh, masih kerap muncul hingga saat ini.

Buku yang ditulis oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh ini membahas tentang seluk-beluk dan upaya-upaya pengembangan agroindustri di Aceh. Sampel komoditas yang menjadi basis agroindustri yang dianalisis di sini meliputi padi (Aceh Utara), kakao (Pidie Jaya), bandeng (Aceh Timur), dan jagung (Aceh Tenggara). Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas-komoditas unggulan di daerah-daerah yang diteliti.

Analisis yang dilakukan oleh Ichsan, Ph.D dalam buku ini menggunakan pendekatan sistem agribisnis. Pendekatan tersebut memungkinkan kita melihat persoalan agroindustri di Aceh dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, kita akan dapat memahami persoalan agroindustri di wilayah tersebut dalam perspektif yang luas, komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Harapan kami, buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik di Aceh maupun di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Analisis dan rekomendasi yang ditawarkan diharapkan dapat memberi

masukn bagi pengembangan agroindustri daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lhokseumawe, 25 Pebruari 2017

Hijri Juliansyah, S.P., M.Ec

Ghazali Syamni, S.E, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
KATA PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	11
1.3 Metodologi Penelitian.....	12
BAB II.GAMBARAN UMUM PROVINSI ACEH DAN DAERAH PENELITIAN	16
2.1 Provinsi Aceh.....	16
2.2 Kabupaten Aceh Utara.....	20
2.4 Kabupaten Pidie Jaya.....	24
2.6 Kabupaten Aceh Timur.....	29
2.7 Kabupaten Aceh Tenggara.....	33
BAB III. PROFIL AGROINDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN ACEH	38
3.1 Profil Agroindustri.....	38
3.2 Ketenagakerjaan.....	42

BAB IV. PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI ACEH BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN	49
4.1 Padi (Aceh Utara)	49
4.2 Kakao (Pidie Jaya)	83
4.3 Bandeng (Aceh Timur)	112
4.6 Jagung (Aceh Tenggara).....	128
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	144
DAFTAR PUSTAKA	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agroindustri menduduki peran yang strategis dalam pembangunan. Keberadaan sektor ini bukan saja dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha pertanian, tetapi juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong munculnya industri-industri lainnya¹. Dengan demikian agroindustri memiliki kontribusi yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan stabilitas ekonomi.

Agroindustri memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi sektor agroindustri selama 2004-2010 mencapai 12,59 persen dari total PDB nasional. Lebih baik dibandingkan dengan sektor non agroindustri non migas dan industri migas, yang masing-masing memberikan kontribusi dengan rata-rata mencapai 12,13 persen dan 2,47 persen.²

Agroindustri adalah sub-sistem yang merupakan bagian dari sistem agribisnis.³ Sistem agribisnis sendiri secara garis besar sering dibedakan menjadi: [1] kegiatan *on-farm*, yang meliputi semua kegiatan

¹ Agroindustri dapat diartikan sebagai industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian. Pengolahan bahan baku (*raw material*) pertanian ini merupakan aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Dalam arti luas, agroindustri mencakup komoditas pertanian pangan dan komoditas pertanian non-pangan perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan kelautan. dan komoditas pertanian non-pangan perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan kelautan.

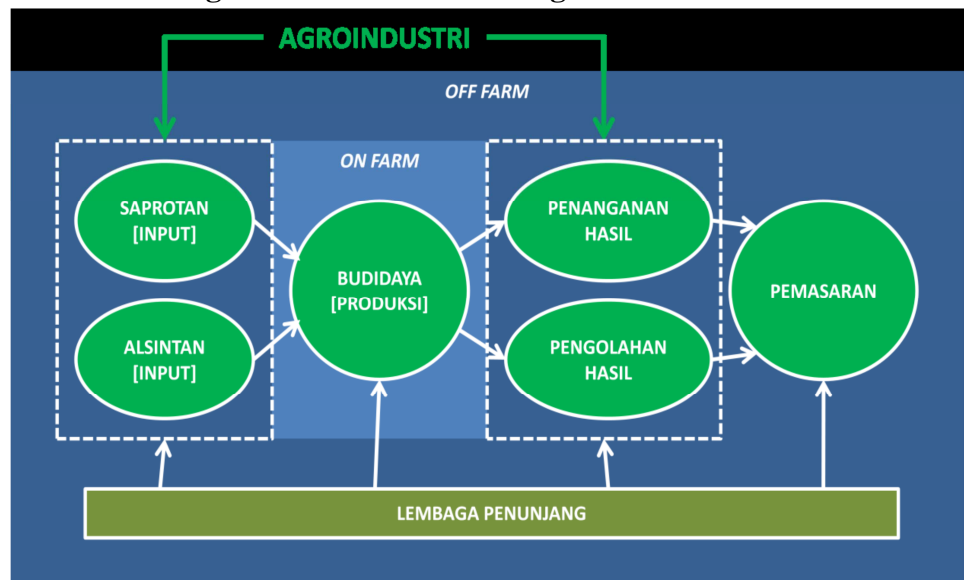
² Kementerian Perdagangan, 2012. *Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Industri*.

³ Lakitan, Benyamin, 2011. *Membangun Agroindustri dan Mewujudkan Sistem Inovasi: Agar Teknologi Berkontribusi pada Kesejahteraan Rakyat*. (Paper disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Agroindustri Kalimantan Selatan: Prospek, peluang, dan potensi, serta kendala. Lustrum ke 10 Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 23 Juni 2011).

yang dilaksanakan secara langsung pada lahan produksi pertanian atau merupakan kegiatan budidaya pertanian; dan [2] kegiatan *off-farm* yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya kegiatan *on-farm*, termasuk pula kegiatan-kegiatan penunjang yang dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan *on-farm*, tapi tidak secara langsung terkait dengan kegiatan budidaya.

Kegiatan *off-farm* meliputi beberapa aspek. Pertama, agroindustri hulu, untuk menyediakan sarana produksi pertanian (saprotan) serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Kedua, agroindustri hilir, untuk penanganan hasil segar dan/atau pengolahan hasil menjadi produk pangan olahan. Ketiga, distribusi dan pemasaran hasil segar maupun produk olahan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Keempat, kegiatan lainnya yang diperankan oleh lembaga penunjang termasuk penyuluhan, pembiayaan, pelembagaan dan regulasi.

Gambar 1.1 Agroindustri dan Sistem Agribisnis



Sumber: Lakitan, 2011

Dalam konteks Aceh, hingga saat ini agroindustri belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Produk pertanian Aceh

cenderung masih hanya dalam bentuk bahan baku mentah, yang menyebabkan masih rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah. Tren penurunan kontribusi sektor migas yang telah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun ini tidak dibarengi dengan peningkatan kontribusi sektor industri non migas. Kontribusi sektor industri pengolahan dengan migas yang pada tahun 2007 sebesar 8,53 persen mengalami penurunan menjadi 5,24 persen pada tahun 2011. Sedangkan tanpa migas, kontribusi sektor industri pengolahan (termasuk di dalamnya agroindustri) tidak mengalami peningkatan yang berarti, yaitu hanya sebesar 1,04 persen, dari 3,95 persen pada tahun 2007 menjadi 4,99 persen pada tahun 2011.⁴

Produktivitas sektor pertanian merupakan elemen penting dalam aktivitas dan perkembangan agroindustri. Ketersediaan bahan baku pertanian yang memadai secara kontinu merupakan persyaratan utama kelangsungan hidup agroindustri. Secara umum, produktivitas pertanian Aceh relatif masih rendah. Diantara tiga komoditas tanaman pangan yang menjadi andalan Aceh, yaitu padi, jagung dan kedelai, hanya kedelai yang memiliki tingkat produktivitas yang dapat diandalkan. Pada tahun 2011 produktivitas padi sebesar 4,6 ton/ha, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,9 ton/ha. Jagung memiliki produktivitas 4 ton/ha, yang juga masih di bawah pencapaian nasional, yaitu 4,2 ton/ha. Sementara kedelai, dengan produktivitas mencapai 1,4 ton/ha, telah melampaui produktivitas nasional yang berada pada angka 1,3 ton/ha.⁵

Terbatasnya peran agroindustri dalam perekonomian di Aceh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan yang terkait dengan mutu Sumber Daya Manusia, sarana prasarana pertanian, teknologi, sumber pendanaan, pemasaran, ketersediaan dan mutu bahan baku, *forward-backward linkage* (keterkaitan ke depan dan ke belakang antara agroindustri dengan industri-industri lain), *research and development* (riset dan pengembangan), sertadukungan kebijakan,. Fenomena yang tidak kondusif dalam dunia agroindustri ini pada gilirannya mengakibatkan rendahnya minat dan keterlibatan swasta serta

⁴ BPS Aceh, 2012. *Aceh Dalam Angka*.

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017.

kelompok industri kecil dan rumah tangga dalambidang ini, dan juga berdampak tidakkompetitifnya produk-produk agroindustri berhadapan dengan produk-produk dari luar daerah.

Sumber Daya Manusia merupakan komponen utama dalam dunia agroindustri. Pengetahuan dan keterampilan pekerja agroindustri sangat menentukan keberhasilan seluruh tahapan pekerjaan agroindustri, mulai dari input, proses, sampai output. Agroindustri membutuhkan tenaga kerja yang menguasai aspek-aspek yang terkait misalnya dengan sarana produksi pertanian (benih, pupuk,dll) alat dan mesin pertanian, pendanaan, dan pemasaran. Pengetahuan dan keterampilan yang didukung oleh kebijakan pengembangan agroindustri yang kondusif akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bidang agroindustri.⁶

Secara umum, produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Rata-rata pendapatan per kapita ini terkait dengan proporsi pekerja yang bekerja pada kegiatan-kegiatan yang berbeda. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah yang relatif kecil dengan jumlah pekerja yang relatif besar, misalnya, akan membawa dampak terhadap penurunan rata-rata pendapatan per kapita tenaga kerja. Sementara, kegiatan-kegiatan dengan nilai tambah relatif besar, tetapi jumlah pekerjanya relatif tidak banyak akan membuat rata-rata pendapatan tenaga kerja meningkat.

Sampai dengan tahun 2013, kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian. Dengan memperhitungkan migas, sektor pertanian memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar sebesar 27,22 persen dari Rp. 103,045 triliun sementara industri pengolahan tanpa migas, termasuk di dalamnya bidang agroindustri, hanya memberi kontribusi sebesar 2,94 persen atau senilai Rp.3,025 triliun.

⁶ Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai rata-rata output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu ukuran tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa.

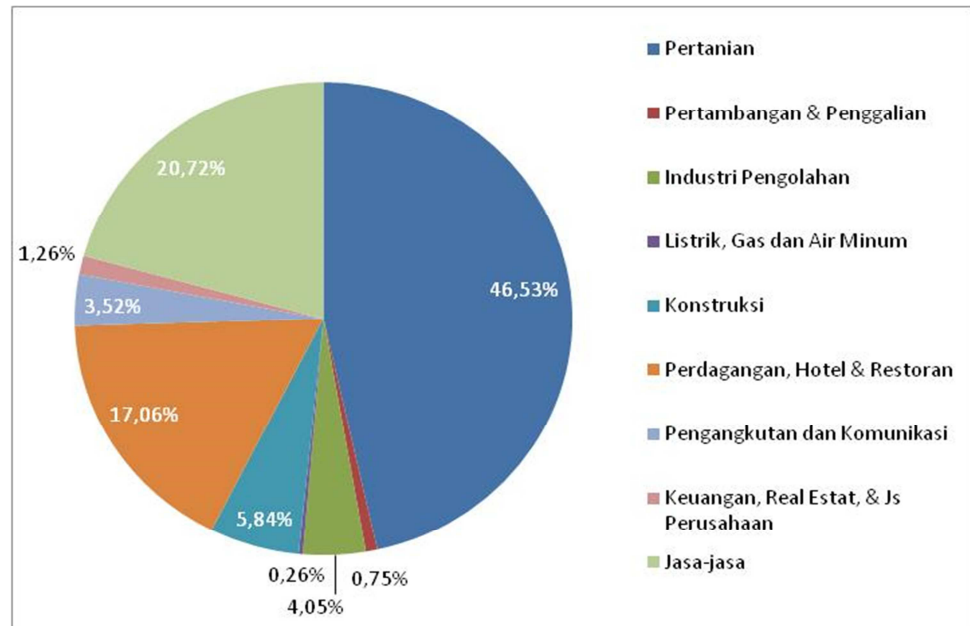
Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 (Rp juta)

No	Lapangan Usaha	PDRB dengan Migas	
		Rp juta	%
1	Pertanian	28.052.075	27,22
2	Pertambangan dan Penggalian	9.850.801	9,56
	a. Minyak dan Gas Bumi	8.614.387	8,36
	b. Pertambangan Bukan Migas	-	
	c. Penggalian	1.236.414	1,30
3	Industri Pengolahan	8.347.556	8,10
	a. Industri Migas	5.322.318	5,17
	b. Industri Bukan Migas	3.025.238	2,94
4	Listrik, gas dan Air Bersih	541.296	0,53
5	Konstruksi	12.021.145	11,67
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	18.202.537	17,66
7	Pengangkutan & Komunikasi	11.169.396	10,84
8	Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	3.155.932	3,06
9	Jasa-jasa	11.704.824	11,36
	PDRB dengan Migas	103.045.561	100
	PDRB tanpa Migas	89.108.856	

Sumber: BPS Aceh, 2014

Terkait dengan tenaga kerja, pada tahun 2013, tercatat penduduk Aceh yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 1.824.586 orang. Jika ditinjau dari lapangan pekerjaan, sektor pertanian menyerap lapangan kerja terbesar, yaitu sebesar 46,53 persen, diikuti oleh Sektor-sektor Jasa (20,72 persen), Perdagangan, (17,06 persen), Konstruksi (5,84 persen), dan Industri Pengolahan (4,05 persen)

Gambar 1.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013



Sumber: BPS Aceh, 2014

Meskipun penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, ternyata dalam produktivitas tenaga kerja sektor ini belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Produktivitas tenaga kerja sektor ini pada tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 12,03 juta/kapita. Sektor pertanian merupakan sektor dengan produktivitas tenaga kerja terendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Dalam konteks pengembangan agroindustri, fenomena ini perlu disikapi serius. Karena keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang sangat erat antara agroindustri dengan sektor pertanian, maka penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian akan membawa dampak serius bagi produktivitas tenaga kerja agroindustri.

Sementara itu, meski sektor industri pengolahan secara umum memiliki produktivitas tenaga kerja yang relatif baik dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

mencapai Rp 46,94 juta, sektor ini ditopang kuat oleh industri pengolahan migas yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2013, industri pengolahan migas misalnya, memberikan kontribusi sebesar 5,17 persen terhadap PDRB. Sementara industri-industri yang terkait dengan agroindustri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja, seperti industri makanan, minuman dan tembakau serta industri kayu dan hasil hutan, hanya memberi kontribusi sebesar 2,94 persen terhadap PDRB. Dengan kondisi ini, dapat diperkirakan bahwa produktivitas tenaga kerja agroindustri masih sangatlah rendah, tidak jauh berbeda dengan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian.

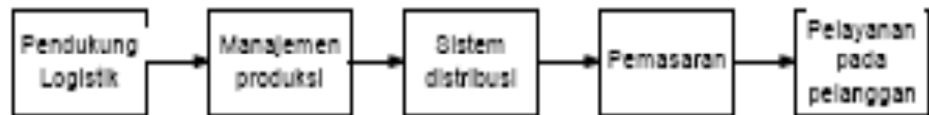
Tabel 1.2 Produktivitas Tenaga Kerja Aceh (PDRB/Kapita) Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tng Kerja	PDRB per Sektor (Rp/juta)		PDRB/Kapita (Rp jt)	
			ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian	848.932	28.052.075	10.215.241	33,04	12,03
2	Pertambangan & Penggalian	13.678	9.850.801	2.532.393	720,19	185,14
3	Industri Pengolahan	73.877	8.347.556	3.467.712	112,99	46,94
4	Listrik, gas dan Air Bersih	4.822	541.296	147.424	112,26	30,57
5	Konstruksi	106.602	12.021.145	2.865.019	112,77	26,88
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	311.346	18.202.537	8.107.753	58,46	26,04
7	Pengangkutan & Komunikasi	64.190	11.169.396	2.852.329	174,01	44,44
8	Keuangan, Real Estat, & Js Perusahaan	23.062	3.155.932	755.556	136,85	32,76
9	Jasa-jasa	378.077	11.704.824	7.069.539	30,96	18,70
Jumlah		1.824.586,00	103.045.561	38.012.967	56,48	20,83

Sumber: BPS Aceh, 2014 (data diolah)

Peningkatan produktivitas tenaga kerja agroindustri di Aceh perlu dilihat dalam perspektif yang luas, meliputi segenap rantai nilai (*value chain*) dari industri ini. Rantai nilai kegiatan agroindustri secara umum meliputi dukungan logistik, manajemen produksi, sistem distribusi, pemasaran, dan pelayanan pada pelanggan.⁷ Secara umum, rantai nilai dari suatu kegiatan usahadapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 1.3. Rantai Nilai Kegiatan Usaha



Sumber: Porter, 1985

Dalam lingkup usaha di bidang pertanian, dukungan logistik (bahan baku) merupakan rantai awal yang sangat penting dan mendukung produksi usaha. Kelangsungan usaha yang memproduksi suatu komoditas sangat ditentukan oleh pasokan bahan baku. Bagian ini juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi bila dikembangkan dengan baik, jadi tidak hanya mengandalkan kepada kekuatan dalam memproduksi saja.

Manajemen produksi merupakan proses koordinasi dan integrasi aktivitas kerja produksi sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas. Sedangkan sistem distribusi terkait dengan penyaluran produk sebelum sampai kepada pelanggan atau pemakai. Untuk dapat menyalurkan produk tentunya diperlukan adanya jaringan pemasaran yang memadai sebagai perpanjangan tangan jaringan distribusi. Selanjutnya, produk yang dipasarkan tidak akan diminati oleh pemakai apabila aspek pelayanan kepada pelanggan (*service & maintenance*) diabaikan.

Keberhasilan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan sangatlah tergantung pada seluruh variabel yang saling berhubungan dalam rantai

⁷ Porter M.E., 1985. *Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance*. The Free Press. A Division of Macmillan Inc. New York.

nilai tersebut. Di Indonesia secara umum dan di Aceh khususnya, masih banyak ditemukan kegiatan agribisnis yang belum mampu memadukan variabel-variabel ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya, banyak wirausaha agribisnis di Indonesia yang walaupun sudah memiliki manajemen produksi yang baik, namun masih sangat dikendalikan oleh pemasok (*supplier*) dalam memenuhi kebutuhan pupuk, benih atau sarana produksi lainnya. Keberhasilan usaha mereka pun sangat dipengaruhi oleh jaringan distribusi dan pemasaran produk. Kondisi ini seringkali menyebabkan produsen produk-produk pertanian (petani) menderita kerugian karena terjadinya permainan dari pemasok bahan baku. Masalah lainnya adalah adanya spekulasi di bagian distribusi, pemasaran dan pelayanan pelanggan yang kerap kali membuat produsen berada pada posisi tawar yang lemah.

Pemerintah Aceh menyadari sepenuhnya signifikansi pengembangan agroindustri Aceh. Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB, ditambah persoalan kemiskinan dan pengangguran yang melilit daerah ini mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus pada pembangunan agroindustri. Mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, diketahui bahwa agroindustri ditempatkan sebagai titik sentral dalam rangkaian pengembangan ekonomi daerah.⁸ Berbagai upaya telah disiapkan dan akan dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengembangkan agroindustri Aceh, meliputi diantaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi hasil pertanian, dan pembukaan peluang yang lebih besar bagi investasi yang bergerak dalam bidang agroindustri.

Saat ini Aceh telah mempersiapkan enam kabupaten sebagai pusat agroindustri berdasarkan zona wilayahnya, yaitu⁹:

- a. Zona Pusat: Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Aceh Besar;

⁸ Penjelasan mengenai pengembangan agroindustri Aceh tertuang misalnya dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Aceh 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033.

⁹ Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033.

- b. Zona Utara: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Bireuen;
- c. Zona Timur: Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. Zona Tenggara: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. Zona Selatan: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- f. Zona Barat: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1.4 Pengembangan Kawasan Strategis Agroindustri Aceh



Sumber: RTRWA 2012 – 2032

Untuk mengakselerasi pembangunan agroindustri, saat ini pemerintah Aceh sedang berkonsentrasi meningkatkan jalan yang menghubungkan beberapa lintas kabupaten seperti Takengon-Bireuen, Bener Meriah-Aceh Utara, Abdya-Gayo Lues, Aceh selatan-Singkil, Aceh Timur-Gayo Lues, Subulussalam-Aceh Tenggara. Apabila semua daerah-daerah tersebut sudah terkoneksi, maka arus transportasi orang, barang dan jasa akan berlangsung dengan lancar sehingga pusat-pusat agroindustri akan berkembang sebagaimana yang diharapkan¹⁰.

Mengingat besarnya potensi dan arti strategis agroindustri Aceh dalam perekonomian daerah, maka perlu disiapkan rencana dan strategi yang lebih terarah, menyeluruh, dan mendetail menyangkut pengembangan sektor ini di masa depan. Salah satu aspek yang sangat penting dikaji dan dianalisis lebih jauh adalah berhubungan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam sektor agroindustri ini sendiri, termasuk di dalamnya petani, nelayan dan pekerja-pekerja yang bergerak baik dalam industri besar maupun industri kecil dan rumah tangga. Tenaga kerja sektor agroindustri merupakan motor penggerak utama sektor ini. Tenaga kerja yang produktif merupakan elemen utama untuk mengembangkan sektor agroindustri sehingga dapat berperan memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam menambah pendapatan daerah, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi pengembangan sektor agroindustri di Aceh dalam rangka memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha pertanian.

Ruang lingkup penelitian ini menyangkut identifikasi dan analisis:

- (i) Profil umum agroindustri dan ketenagakerjaan di Aceh.

¹⁰ Tabangun Aceh, Edisi 36, Tahun IV, September 2013.

- (ii) Profil daerah yang diteliti (diwakili oleh 4 kabupaten/kota), meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya.
- (iii) Profil agroindustri komoditas unggulan di daerah yang diteliti (setiap kabupaten/kota yang diteliti diwakili oleh 1 komoditas utama), termasuk potensi, serta faktor pendorong dan penghambat pengembangannya.
- (iv) Rantai nilai (*value chain*) kegiatan pengolahan komoditas unggulan pertanian di daerah yang diteliti, termasuk aktivitas-aktivitas dalam sistem agribisnis, dimulai dari a) penyediaan sarana produksi pertanian serta alat dan mesin pertanian, b) budidaya pertanian (kegiatan *on-farm*), c) penanganan hasil segar dan/atau pengolahan hasil menjadi produk pangan olahan, d) distribusi dan pemasaran hasil segar maupun produk olahan, e) kegiatan lainnya yang diperankan oleh lembaga penunjang termasuk penyuluhan, pembiayaan, pelembagaan, dan hal-hal terkait lainnya.
- (v) Rekomendasi strategi pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di kabupaten/kota yang diteliti.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Daerah penelitian

Daerah penelitian meliputi 4 (empat) kabupaten kota di Aceh yang dipilih dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terkait dengan pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian (*policy driven*), produktivitas komoditas pertanian unggulan (yang potensial dikembangkan untuk sektor agroindustri), dan keanekaragaman komoditas yang dipilih (meliputi berbagai subsektor pertanian). Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan daerah penelitian dengan komoditas unggulan sektor agroindustri sbb:

Tabel 1.3 Kabupaten/Kota Penelitian dan Komoditas Pertanian yang Dikembangkan untuk Agroindustri

No	Kabupaten	Komoditas	Keterangan***
1	Aceh Utara	Padi**	# 1 jlh produksi padi di Aceh
2	Pidie Jaya	Kakao	Memiliki industri pengolahan kakao termaju di Aceh
3	Aceh Timur	Bandeng	# 2 jlh produksi ikan tambak di Aceh setelah Aceh Utara
4	Aceh Tenggara*	Jagung**	# 1 jlh produksi jagung di Aceh

*Pusat-pusat agroindustri Aceh berdasarkan RTRWA 2013-2033

**Komoditas tanaman pangan andalan Aceh berdasarkan RPJM Aceh 2012-2017

***Data BPS tahun 2012

1.3.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui review dokumen-dokumen terkait, kuesioner, observasi, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan.

1.1.1. Review dokumen

Dokumen-dokumen yang dianalisis adalah yang berisi data dan informasi mengenai kondisi geografis, demografis, ekonomi dan sumber daya Aceh dan kabupaten/kota yang diteliti. Selain itu juga menyangkut profil agroindustri dan ketenagakerjaan di Aceh dan gambaran komoditas-komoditas pertanian yang dipertimbangkan potensial untuk diolah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi seperti RPJP dan RPJM Aceh, RPJM kabupaten/kota yang termasuk wilayah penelitian, Renstra SKPA dan SKPK kab/kota wilayah penelitian, laporan BPS Aceh dan kab/kota, laporan SKPA/SKPK yang terkait dengan pengembangan agroindustri, regulasi, dll.

1.1.2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan pejabat/pengambil kebijakan dari dinas-dinas yang terkait dengan pengembangan agroindustri (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas Perindagkop dan UKM, dll) dan para pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh masyarakat, aparat desa, perantara pemasaran, konsumen, dll. Wawancara ditujukan untuk menggali informasi mengenai kondisi dan profil agroindustri di Aceh dan kab/kota secara umum, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan agroindustri (termasuk rantai nilai kegiatan usaha secara keseluruhan).

1.1.3. Observasi

Observasi dilakukan terhadap keberadaan dan aktivitas agroindustri di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penelitian. Pengamatan yang dilakukan disamping berhubungan dengan pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi dan pemasaran, juga terkait dengan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam industri berbasis pertanian tersebut dan hal-hal yang dianggap relevan lainnya.

Tabel 1.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Pengumpulan Data

No	Ruang Lingkup Penelitian	Teknik Pengumpulan Data		
		Tinjauan Dokumen	Observasi	Wawancara
1	Profil umum agroindustri dan ketenagakerjaan di Aceh	√		
2	Profil 4 kabupaten/kota yang diteliti meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya.	√		
3	Profil agroindustri komoditas unggulan di 4 kabupaten/kota yang diteliti	√	√	√
4	Rantai nilai (<i>value chain</i>) kegiatan pengolahan komoditas agroindustri unggulan di 4 kabupaten/kota yg diteliti	√	√	√
5	Rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan agroindustri komoditas unggulan di 4 kabupaten/kota yang diteliti.	√	√	√

1.3.3 Metode analisis

Pengembangan sektor agroindustri dalam penelitian ini akan ditinjau dari aspek-aspek yang mempengaruhi dan terkait dengannya, meliputi rantai nilai (*value chain*) kegiatan pengolahan komoditas yang diteliti, termasuk aktivitas-aktivitas dalam sistem agribisnis, dimulai dari a) penyediaan sarana produksi pertanian serta alat dan mesin pertanian, b) budidaya pertanian (kegiatan *on-farm*), c) penanganan hasil segar dan/atau pengolahan hasil menjadi produk pangan olahan, d) distribusi dan pemasaran hasil segar maupun produk olahan, e) kegiatan lainnya yang diperankan oleh lembaga penunjang termasuk penyuluhan, pembiayaan, pelembagaan, dan hal-hal terkait lainnya.

BAB II

Gambaran Umum Provinsi Aceh dan Daerah Penelitian

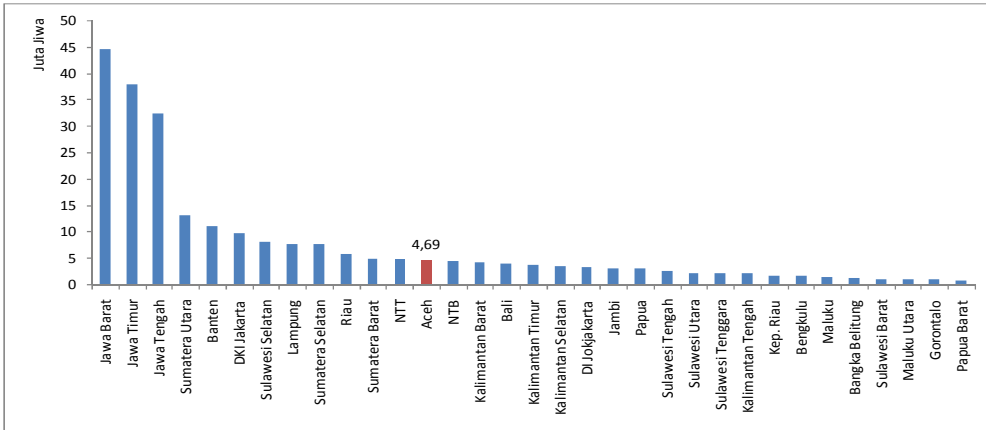
2.1 Provinsi Aceh



Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ}58'37,2'' - 06^{\circ}04'33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ}57'57,6'' - 98^{\circ}17'13,2''$ Bujur Timur. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha atau 56.771 km^2 . Ketinggian daratan rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah melalui Provinsi Sumatera Utara, sehingga Provinsi Aceh memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Provinsi Sumatera Utara.

Hingga tahun 2013 Provinsi Aceh terbagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 284 kecamatan, 778 mukim, dan 6.493 gampong/desa. Ibukota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh, sebuah kota yang kaya akan sejarah sejak zaman Kerajaan Aceh. Penduduk Provinsi Aceh tercatat 4,693,9 ribu jiwa terdiri dari 2.346,9 ribu jiwa laki-laki dan 2.347,0 ribu jiwa perempuan atas dasar proyeksi jumlah penduduk tahun 2012. Pada tahun sama, daerah ini memiliki jumlah rumah tangga mencapai 1,09 juta rumah tangga. Sementara kepadatan penduduknya mencapai 83 orang/km^2 .

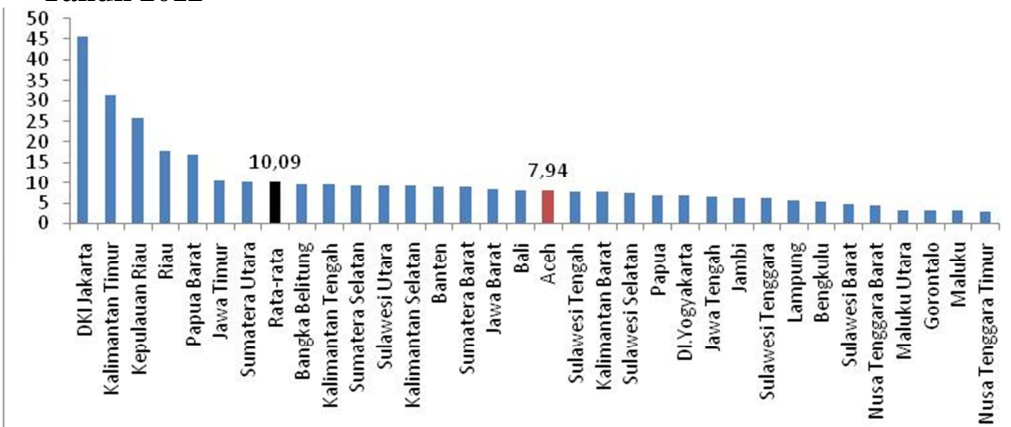
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013



Sumber : BPS Indonesia, 2014

Pada tahun 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Aceh mencapai Rp7,94 juta, jauh di bawah rata-rata provinsi di Indonesia yang mencapai Rp 10,09 juta. Secara nasional, Aceh menduduki posisi kedelapan belas. Dengan kian berkurangnya migas yang dimiliki Aceh kini, maka PDRB Aceh tanpa migas relatif tidak banyak berubah.

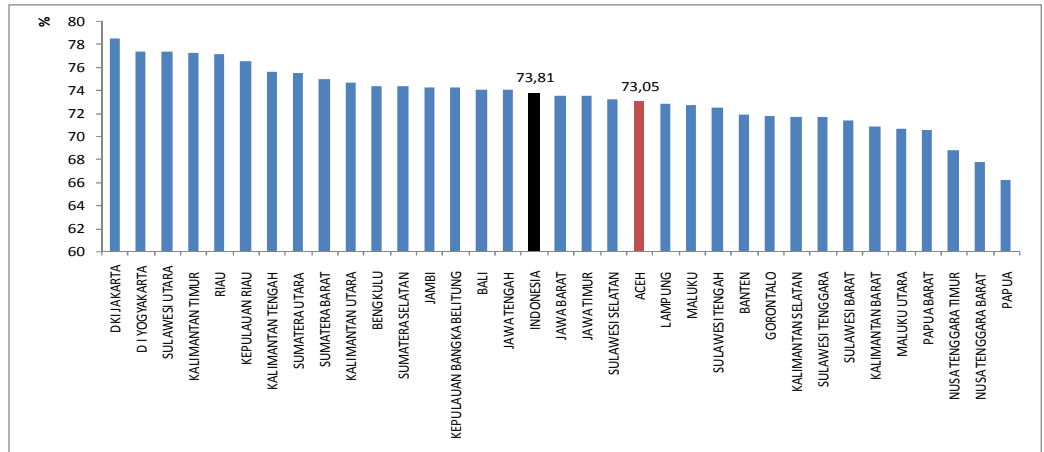
Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2012



Sumber : BPS Indonesia, 2013 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2013 berada di bawah rata-rata nasional, yaitu berada pada peringkat ke-21 dari 33 provinsi di Indonesia, dengan angka indeks sebesar 73,05. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,51. Reduksi shortfall 2009-2013 tercatat 1,74. IPM tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta sebesar 78,59 dan terendah Papua 66,25 dengan nilai rata-rata nasional sebesar 73,81.

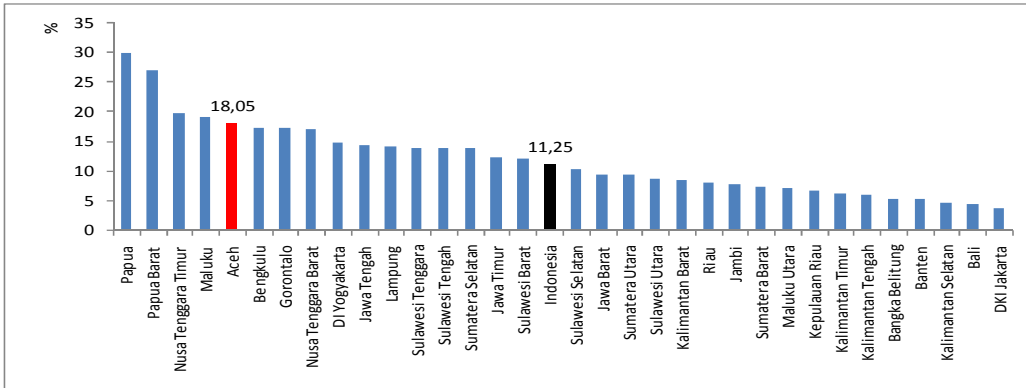
Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2013



Sumber : BPS Indonesia, 2014

Kemiskinan masih menjadi pokok persoalan pembangunan di Provinsi Aceh. Hingga 2013, angka kemiskinan Provinsi Aceh masih sekitar 18,05 persen dari total penduduk. Hal ini berarti ada sekitar 847 ribu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Aceh berada pada urutan kelima provinsi paling miskin di Indonesia. Secara nasional tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 11,25 persen.

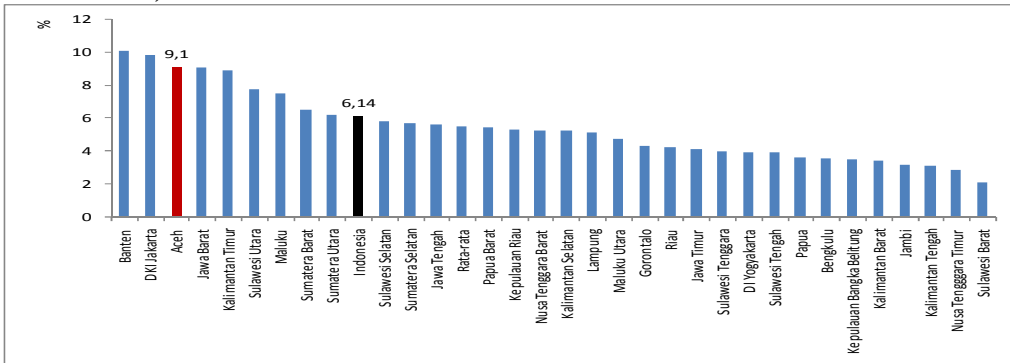
Gambar 2.4 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013



Sumber : BPS Indonesia, 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh masih relatif sangat tinggi. Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,1 persen pada tahun 2012, Aceh berada di peringkat ketiga secara nasional. Angka pengangguran Aceh ini menunjukkan bahwa dalam setiap 100 orang angkatan kerja, sebanyak 92-93 orang bekerja dan 9-10 orang lainnya menganggur. Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,14 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi kerja untuk Provinsi Aceh menurun dari sebelumnya 63,78 persen tahun 2011 menjadi 61,77 persen pada tahun 2012.

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2012



Sumber : BPS Indonesia, 2013

2.2 Kabupaten Aceh Utara



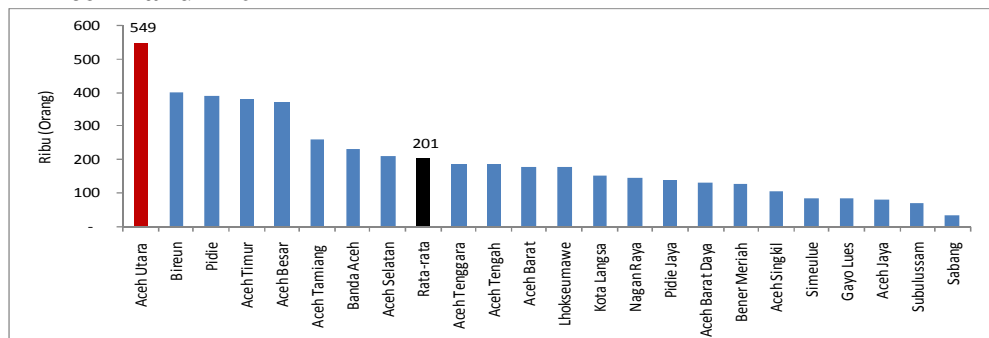
Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian pantai timur wilayah Provinsi Aceh. Terletak antara $96.52.00^{\circ}$ – $97.31.00^{\circ}$ Bujur Timur dan $04.46.00^{\circ}$ – $05.00.40^{\circ}$ Lintang Utara. Kabupaten yang beribukota di Lhoksukon ini mempunyai wilayah seluas $3.296,86 \text{ km}^2$.

Kabupaten ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Sampai dengan tahun 2012 Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 70 kemukiman, dan 852 gampong/desa.

Aceh Utara adalah kabupaten terbesar di Provinsi Aceh, baik dari segi jumlah penduduk maupun jumlah wilayah administrasi kecamatan dan gampong. Bahkan sebelum pemekaran Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe dari kabupaten ini, wilayahnya merupakan salah satu yang terluas di provinsi paling barat di Indonesia.

Aceh Utara memiliki jumlah penduduk terpadat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Pada tahun 2012 tercatat lebih dari setengah juta penduduk yang menghuni wilayah ini, tepatnya sebanyak 549.370 orang. Terdiri atas 271.866 orang laki-laki dan 277.509 orang perempuan, serta terkumpul dalam 127.373 rumah tangga.

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Utara dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2012



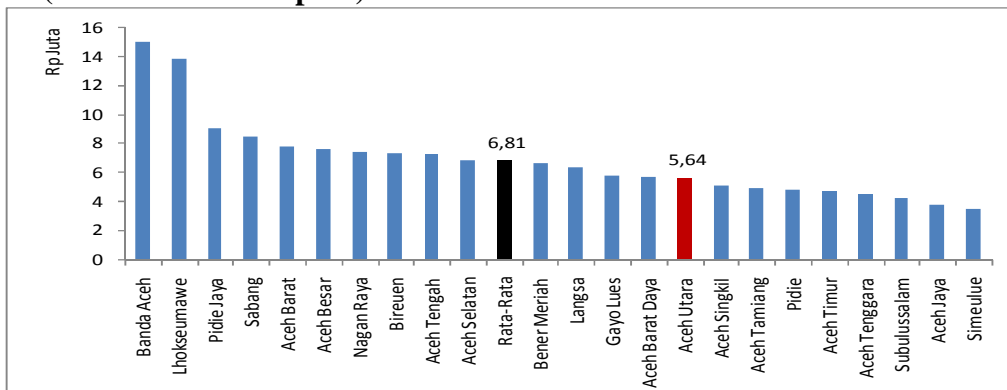
Sumber: BPS Aceh, 2013

Kecamatan Paya Bakong merupakan wilayah terluas di Kabupaten Aceh Utara, wilayahnya meliputi 12,69 persen dari keseluruhan wilayah Aceh Utara. Sedangkan Kecamatan Sawang mencapai 11,67 persen dari wilayah Aceh Utara. Jumlah penduduk yang menghuni kedua wilayah tersebut masing-masing sebanyak 13.053 jiwa dan 34.999 jiwa.

Kecamatan Lhoksukon yang merupakan ibukota kabupaten, juga menjadi tujuan utama tempat tinggal penduduk. Sekitar 10.818 rumah tangga menempati kecamatan tersebut. Kecamatan lainnya yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tanah Jambo Aye. Penduduk yang menetap di wilayah itu masing-masing sebanyak 34.999 jiwa dan 41.032 jiwa. Sebaliknya, penduduk paling sedikit bermukim di Kecamatan Banda Baro, yakni sebanyak 7.518 jiwa.

PDRB per kapita tanpa migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Aceh Utara pada tahun 2012 masih di bawah rata-rata Aceh, yaitu Rp 5,64 juta. Sementara rata-rata Aceh mencapai Rp 6,81 juta. Dengan PDRB per kapita sebesar itu, Aceh Utara menempati posisi PDRB per kapita terendah urutan kesembilan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Gambar 2.7 PDRB Per Kapita Non Migas Atas Dasar Harga Konstan Kab. Aceh Utara dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)



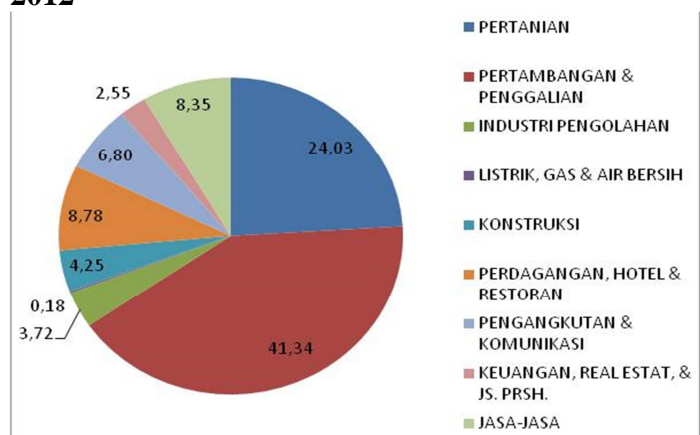
Sumber: BPS Aceh, 2013 (diolah)

Seperti kebanyakan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh, Sektor Pertanian juga memberikan peran yang besar dalam kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Utara. Sekitar 24,03 persen perekonomian daerah ini disumbang oleh Sektor Pertanian, dengan migas dimasukkan dalam kegiatan ekonominya. Jika migas tidak dimasukkan, maka peran Sektor Pertanian mencapai 40,97 persen. Mengingat potensi pertambangan migas semakin berkurang, maka potensi sektor pertanian layak dikembangkan agar kelak dapat menjadi penyokong utama kegiatan ekonomi di daerah ini.

Sektor lain yang mempunyai peran cukup besar adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang memberi kontribusi sebesar 8,78 persen. Sektor Jasa-jasa memberi sumbangan sebesar 8,35 persen, dengan Subsektor Jasa Pemerintahan Umum sebagai kontributor utama dengan peran sebesar 7,65 persen. Sementara itu, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi berperan sebesar 6,80 persen.

Meskipun telah jauh berkurang, pertambangan minyak dan gas bumi masih berperan besar dalam perekonomian daerah. Karena dari sejumlah hampir 12 trilyun rupiah PDRB kabupaten ini, sebanyak 41,34 persen merupakan kontribusi pertambangan migas. Pada 3 tahun sebelumnya, pertambangan migas memberi kontribusi hingga 64,48 persen dalam kegiatan ekonomi daerah ini.

Gambar 2.8 Kontribusi Ekonomi Sektoral Kab. Aceh Utara, Tahun 2012



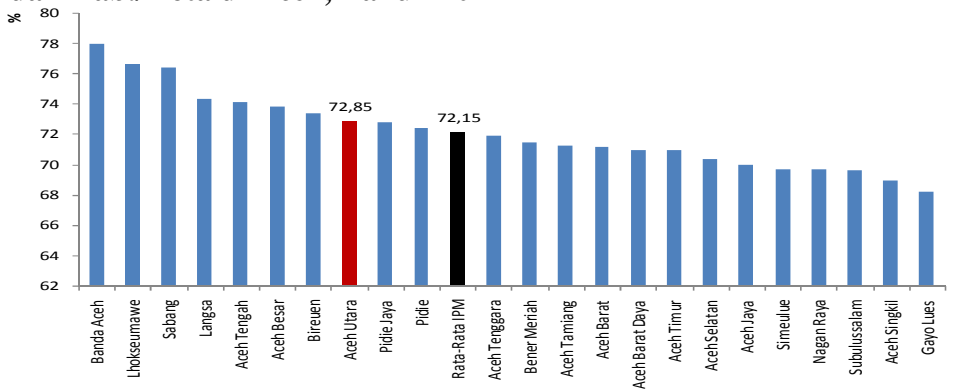
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara, 2013 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara cenderung moderat, dengan pertumbuhan di bawah 4 persen pada 4 tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun 2011 tercatat 3,91 untuk nonmigas. Jika migas dimasukkan, maka pertumbuhan ekonomi wilayah ini hanya 2,46 persen. Angka yang disebutkan terakhir sudah sangat baik kemajuannya, karena pada 3 tahun sebelumnya nilainya minus alias menurun. Hal itu disebabkan oleh penurunan produksi pertambangan migas.

Ditinjau dari sisi sektor usaha, Sektor Jasa-jasa mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni 9,16 persen. Sektor yang ditopang oleh Subsektor Jasa Pemerintahan Umum ini menjadi motor penggerak ekonomi Aceh Utara. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,49 persen. Namun karena kontribusinya yang kecil dalam perekonomian, maka dampaknya tidak begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sementara Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 5,63 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian turun 0,34 persen. Sedangkan sektor utama lainnya, yaitu Sektor Pertanian, hanya tumbuh sebesar 0,95 persen.

Secara umum, kualitas SDM di wilayah ini cukup baik. Hal ini terlihat dari angka IPM yang berada pada posisi kedelapan dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pada tahun 2011, angka yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia tersebut mencapai 72,85. Angka tersebut lebih tinggi daripada IPM Provinsi Aceh, yang tercatat mencapai 72,16.

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Aceh Utara dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2011

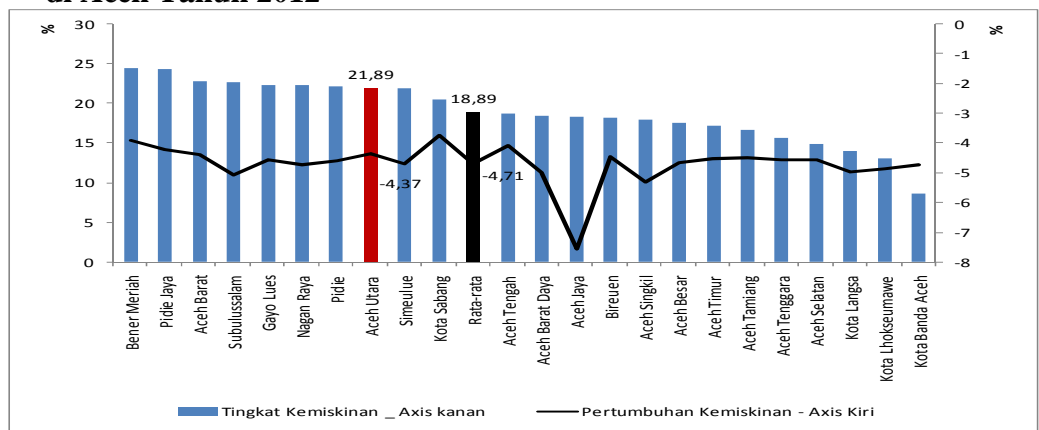


Sumber: BPS Aceh, 2013

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 69,80 tahun, setahun lebih tinggi dari angka harapan hidup penduduk Aceh. Angka melek huruf mencapai 97,83 persen. Rata-rata lama sekolah sebesar 9,19 tahun. Artinya penduduk di daerah ini rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau menamatkan SLTP/ sederajat. Sementara itu, kemampuan daya beli penduduk sebesar 612,04 ribu rupiah per kapita per bulan.

Pada tahun 2012, Aceh Utara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi kedelapan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tingkat kemiskinan Aceh Utara mencapai 21,89 persen, sementara rata-rata Aceh sebesar 18,89 persen.

Gambar 2.10 Tingkat Kemiskinan Kab. Aceh Utara dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2012



Sumber: BPS Aceh, 2013 (diolah)

2.3 Kabupaten Pidie Jaya

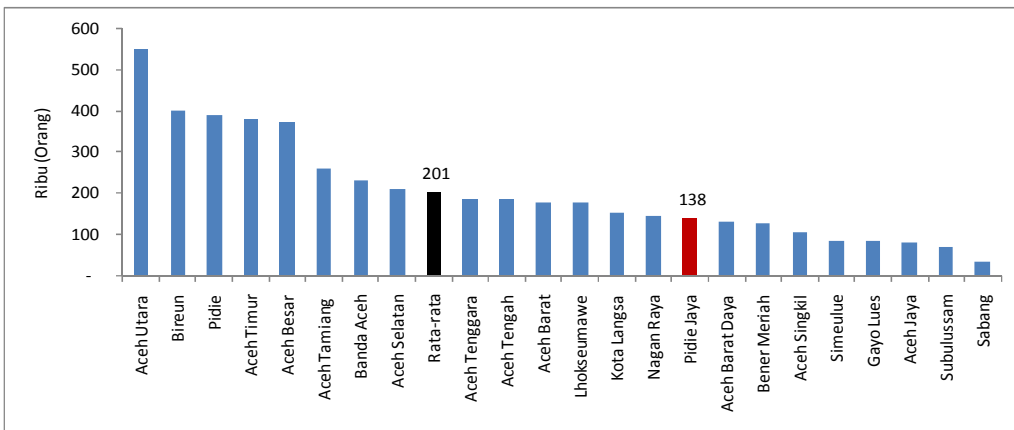


Pidie Jaya adalah kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Pidie sejak tujuh tahun yang lalu. Kabupaten Pidie Jaya berdiri berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007, dengan ibukota Meureudu. Kabupaten ini mempunyai wilayah

seluas 1.162,84, yang terdiri dari 952 km² wilayah daratan dan 210,84 km² wilayah laut yang jaraknya maksimal 4 mil laut.

Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 138.415 orang, dengan kepadatan penduduk sebesar 145 jiwa/km². Jumlah penduduk perempuan 70.831 orang, lebih banyak daripada penduduk laki-laki yang mencapai 67.584 orang. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jangka Buya yang mencapai 1.008 jiwa/km². Sementara tempat bermukim penduduk terbesar di Kecamatan Bandar Baru (32.623 orang) dan Kecamatan Bandar Dua (24.628 orang). Sedangkan penduduk paling sedikit bermukim di Kecamatan Jangka Buya (9.071 orang) dan Kecamatan Panteraaja (7.844 orang).

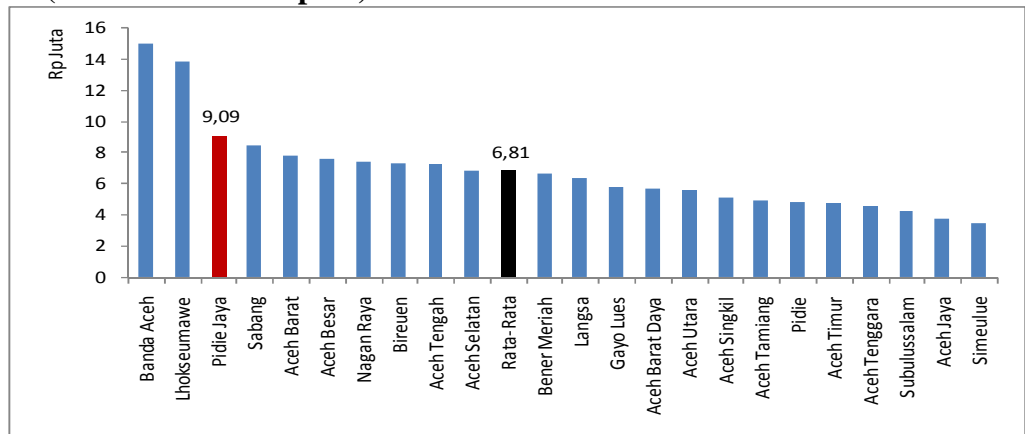
Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kab. Pidie Jaya dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2012



Sumber: BPS Aceh, 2013

PDRB per kapita ADHK Pidie Jaya tahun 2012 relatif sangat baik, jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh, yaitu sekitar Rp 9,09 juta. Angka ini jauh melampaui rata-rata Aceh yang mencapai Rp 6,81 juta. Secara keseluruhan, Pidie Jaya merupakan kabupaten yang berada pada urutan ketiga tertinggi PDRB per kapita ADHK di Aceh.

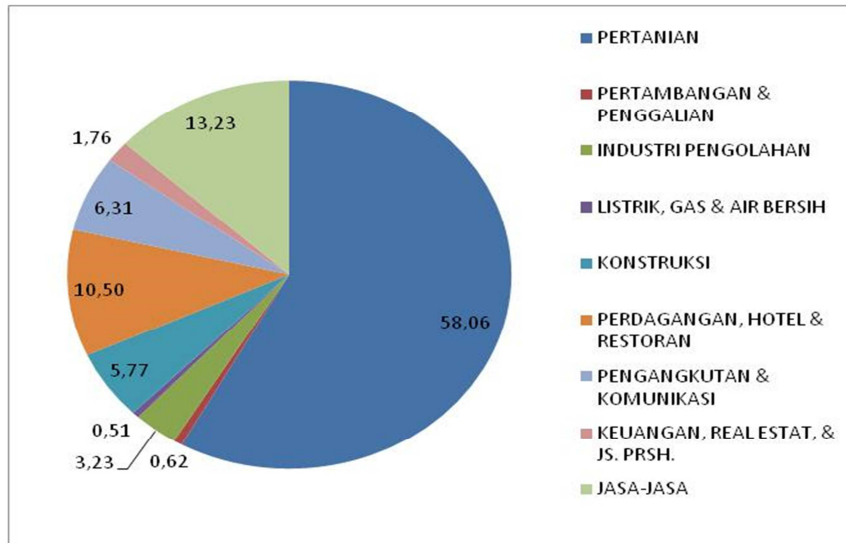
Gambar 2.12 PDRB Per Kapita Non Migas Atas Dasar Harga Konstan Kab. Pidie Jaya dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPS Aceh, 2013

Perekonomian di kabupaten ini terutama ditopang oleh Sektor Pertanian. Sekitar 58,06 persen perekonomiannya disumbang sektor tersebut, dengan dukungan utamanya dari Subsektor Tanaman Bahan Makanan (25,89 persen) dan Subsektor Peternakan (18,97 persen). Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Sektor Jasa-jasa dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Peran kedua sektor tersebut masing-masing 13,23 persen dan 10,50 persen. Sebagai daerah otonomi yang masih muda, Subsektor Jasa Pemerintahan Umum-nya memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian daerah (12,13 persen).

Gambar 2.13 Kontribusi Ekonomi Sektoral Kab. Pidie Jaya, Tahun 2012

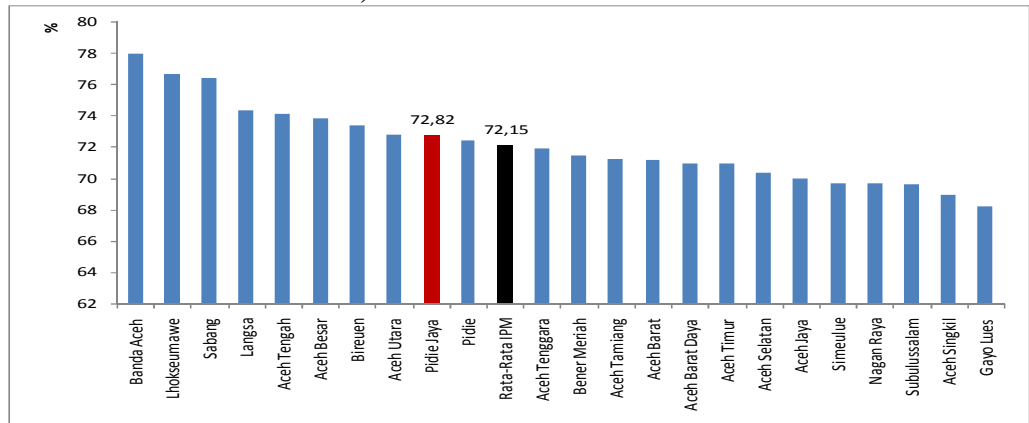


Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2013 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2012 sedikit lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana untuk Pidie Jaya sebesar 5,01 persen dan Aceh sebesar 4,94 persen. Meskipun demikian PDRB nya masih relatif rendah sebesar Rp 717 miliar, menempatkan kabupaten ini berada pada urutan ketujuh PDRB terendah di Aceh.

Sebagai daerah otonomi baru, pembangunan manusia daerah ini, yang diindikasikan oleh nilai IPM, cukup menggembirakan. Pencapaian nilai IPM sebesar 72,82, mendudukan Kabupaten Pidie Jaya berada pada posisi tertinggi ke-9 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Posisi ini satu peringkat lebih tinggi daripada kabupaten induknya, Pidie yang berada pada posisi ke-10 dengan nilai IPM sebesar 72,43.

Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Pidie Jaya dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2011

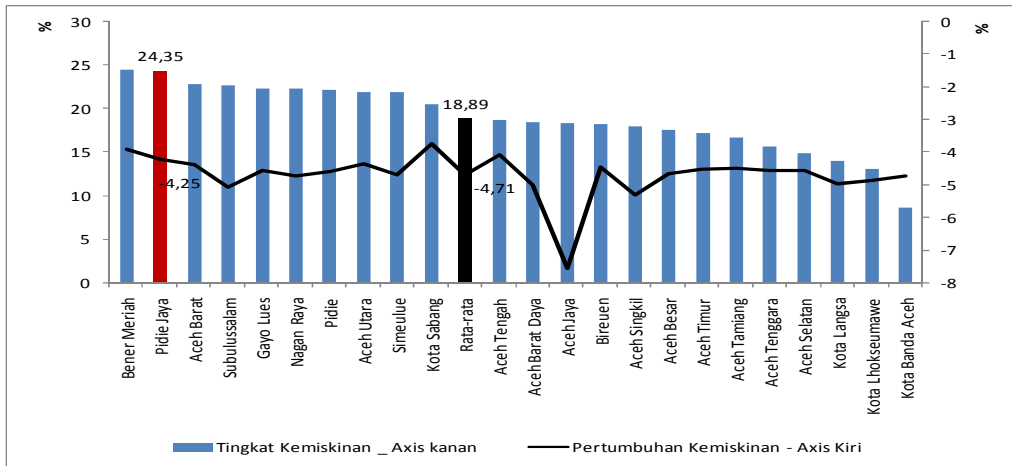


Sumber: BPS Aceh, 2013

Angka harapan hidup penduduk Pidie Jaya tercatat 69,30 tahun, artinya seseorang penduduk Pidie Jaya yang lahir tahun 2011 diperkirakan akan hidup hingga berumur 69,30 tahun. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah tercatat 95,48 persen dan 8,68 tahun. Sementara kemampuan daya beli masyarakat mencapai 626,89 ribu rupiah per kapita per bulan.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi daerah ini. Hampir seperempat penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Secara nominal, sebanyak 34.773 jiwa penduduk di Pidie Jaya masih tergolong miskin. Dari sisi ketenagakerjaan, sebanyak 4.793 orang tercatat menganggur, atau sekitar 7,95 persen dari seluruh angkatan kerja. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 5,81 persen.

Gambar 2.15 Tingkat Kemiskinan Kab. Pidie Jaya dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2012



Sumber: BPS Aceh, 2013 (diolah)

2.4 Kabupaten Aceh Timur



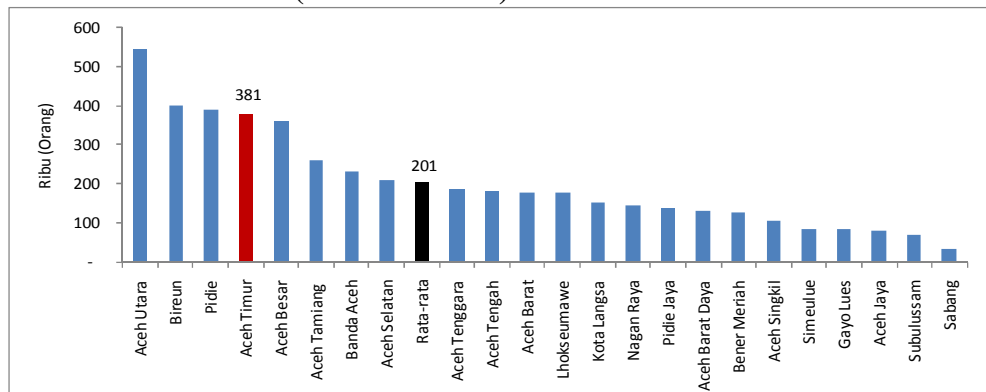
Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh. Wilayahnya berada pada koordinat 4o09’21,08” – 5o06’02,16”Lintang Utara dan 97o15’22,07” – 97o34’47,22” Bujur Timur. Secara administratif, kabupaten ini terdiri atas 24 kecamatan, 45 kemukiman, dan 512 gampong.

Disamping berbatasan langsung dengan laut (Selat Malaka), wilayahnya juga berbatasan dengan daerah lain. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah.

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 km² atau 10,53 persen dari luas Provinsi Aceh. Wilayah dengan luas terbesar adalah Kecamatan Serbajadi dengan luas 2.165,66 km², dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Darul Ihsan dengan luas 54,50 km².

Penduduk Kabupaten Aceh Timur berjumlah 380.876 jiwa, terdiri atas 190.858 laki-laki dan 190.018 perempuan (tahun 2012). Kepadatan penduduk per kilometer persegi kabupaten yang mempunyai rumahtangga sekitar 81.576 ini adalah 63 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk yang mencapai 416 jiwa/km². Sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Simpang Jernih, masing-masing 3 jiwa/km² dan 4 jiwa/km².

Gambar 2.16 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Timur dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2012 (dalam Ribuan)

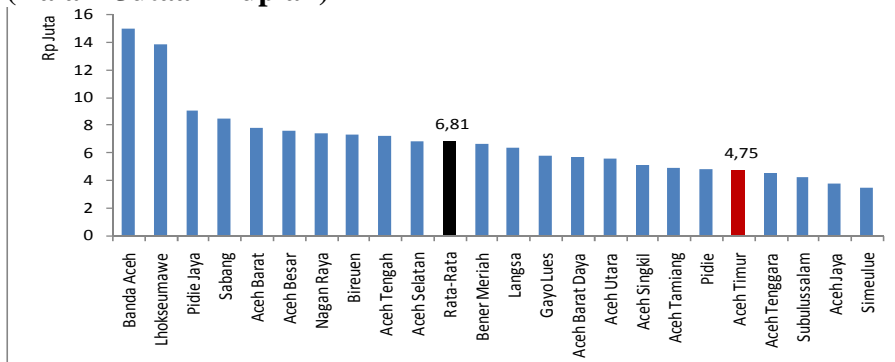


Sumber : BPS Aceh, 2013

Angka Harapan Hidup penduduk daerah ini tercatat 69,80 tahun atau setahun lebih tinggi daripada rata-rata usia harapan hidup penduduk Provinsi Aceh secara umum. Sedangkan angka melek huruf mencapai 98,25 persen dan rata-rata lama sekolah selama 8,51 tahun.

PDRB perkapita non migas ADHK Kabupaten Aceh Timur masih tergolong rendah. Pada tahun 2012 tercatat mencapai Rp 4,75 juta, cukup jauh terpaut dari PDRB perkapita non migas ADHK Aceh. Aceh Timur hanya berada pada posisi lebih baik dibandingkan Simeulue, Aceh Jaya, Subulussalam, dan Aceh Tenggara.

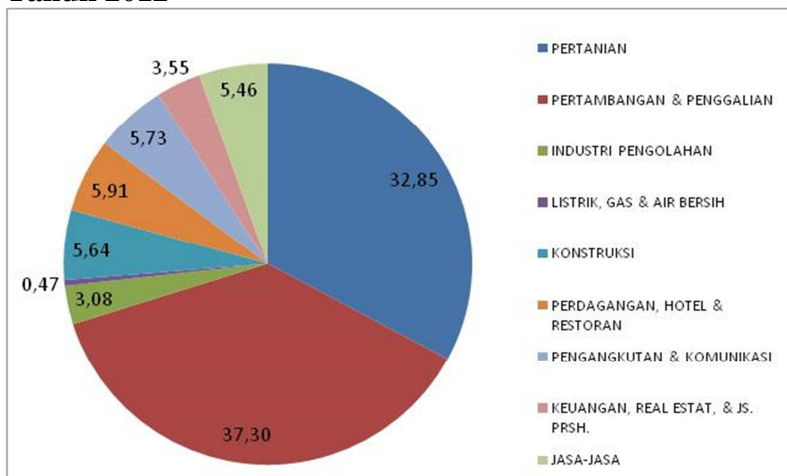
Gambar 2.17 PDRB Per Kapita Non Migas Atas Dasar Harga Konstan Kab. Aceh Timur dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : BPS Aceh, 2013 (diolah)

Sektor Pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Aceh Timur dengan kontribusi mencapai 37,30 persen. Sementara itu sektor-sektor lainnya yang juga berperan penting adalah Sektor Pertanian (32,85 persen), Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,91 persen), serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (5,73 persen).

Gambar 2.18 Kontribusi Ekonomi Sektoral Kab. Aceh Timur, Tahun 2012

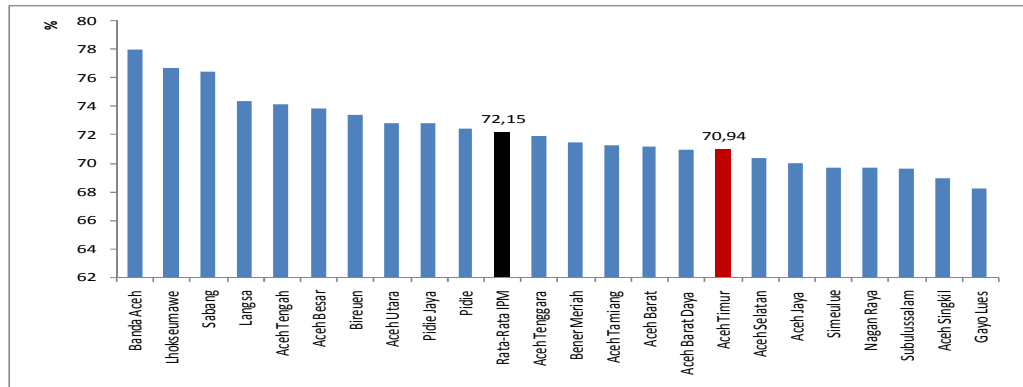


Sumber : BPS Kabupaten Aceh Timur, 2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2012 tercatat 3,11 persen, jika tanpa migas. Jika migas dimasukkan dalam PDRB, maka pertumbuhan ekonomi hanya 2,23 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan kontribusi Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dalam perekonomian. Sektor Bangunan dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran mengalami kemajuan yang cukup berarti. Kedua sektor tersebut tumbuh masing-masing sebesar 8,62 persen dan 9,73 persen.

Pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Timur sebesar 70,94, masih berada di bawah rata-rata propinsi yang mencapai 72,15. Pada skala propinsi, Kota Banda Aceh memiliki IPM tertinggi dengan nilai 78 dan Gayo Lues terendah dengan nilai 68,22.

Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Aceh Timur dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2011



Sumber : BPS Aceh, 2013

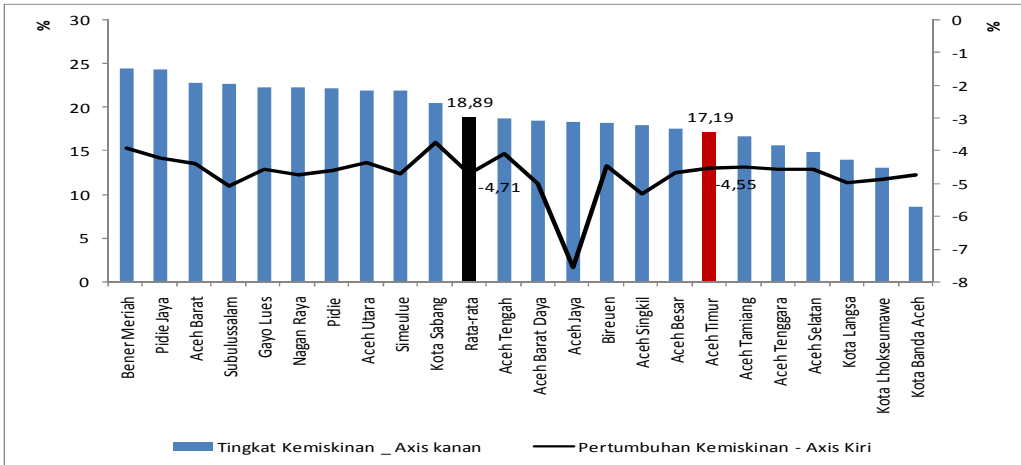
Kemampuan daya beli penduduk daerah ini sebesar 592,58 ribu rupiah per kapita per bulan. Angka ini merupakan yang terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Sekitar 92,03 persen angkatan kerja telah bekerja pada berbagai sektor usaha. Dengan demikian berarti hanya sejumlah 7,97 persen

angkatan kerja yang masih menganggur (tahun 2011). Angka ini lebih besar daripada tahun sebelumnya yang tercatat 6,13 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota lainnya di Propinsi Aceh. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur yang sekitar 17,19 persen, secara nominal angkanya masih relatif cukup tinggi yaitu mencapai 66.740 jiwa.

Gambar 2.20 Tingkat Kemiskinan Kab. Aceh Timur dan Kab./Kota di Aceh Tahun 2012



Sumber : BPS Aceh, 2013 (diolah)

2.5 Kabupaten Aceh Tenggara

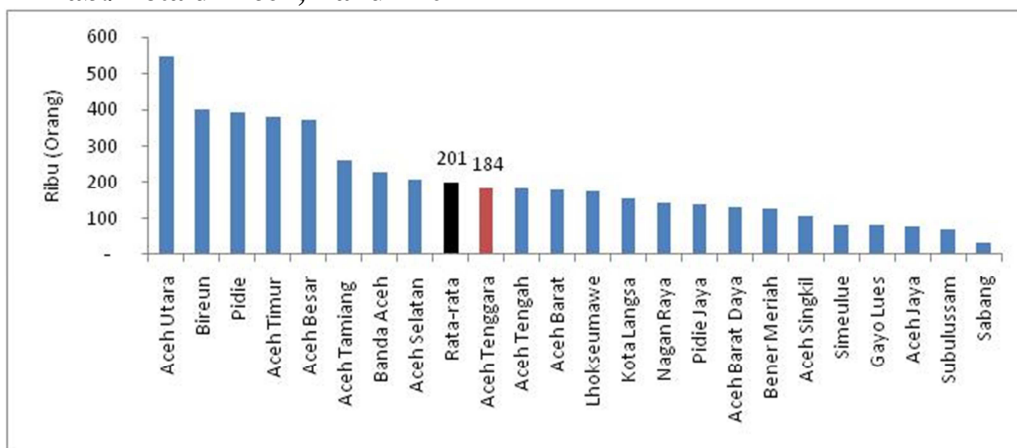


Secara geografis, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 3°55'23”–4°16'37” Lintang Utara dan 96°43'23’–98°10'32” Bujur Timur. Ketinggian daratan rata-rata berkisar antara 25-1000 meter di atas permukaan laut dengan dikelilingi Hutan Taman Nasional GunungLeuser dan Bukit Barisan.

Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Hingga tahun 2012, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebanyak 184 ribu jiwa. Secara administratif, wilayah ini terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kotanya Kutacane. Wilayah ini pernah mengalami pemekaran kabupaten yaitu Kabupaten Gayo Lues. Saat ini Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan, 51 mukim, dan 385 gampong/desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

Gambar 2.21 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Tenggara dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2012



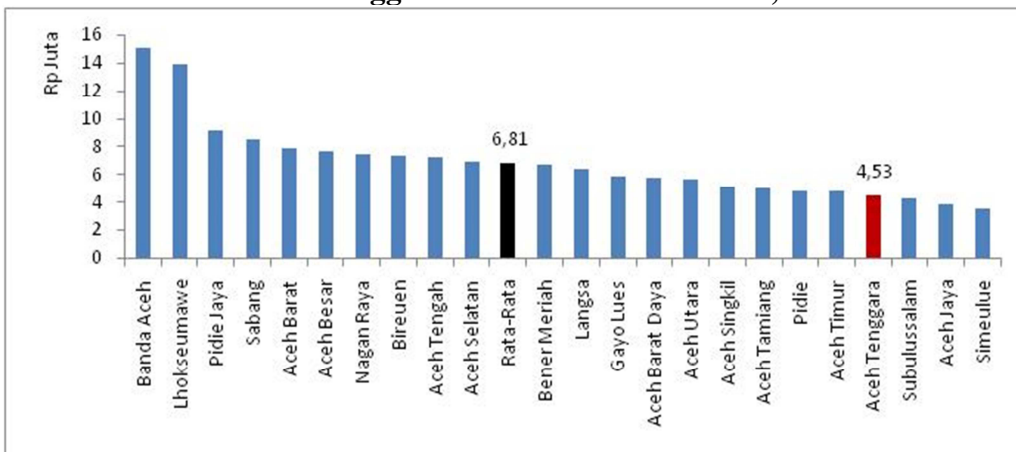
Sumber : BPS Aceh, 2013

Kabupaten Aceh Tenggara terkenal akan potensi pertanian dan sebagian wilayahnya masuk dalam Kawasan Gunung Leuser. Sekitar 50 persen perekonomian daerah ini diberikan oleh kelompok sektor primer, terutama sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini

mencapai 56,82 persen dari seluruh penduduk yang bekerja (69.889 orang).

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara relatif kecil. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita ADHK penduduknya hanya Rp 4,53 juta. Rata-rata pendapatan perkapita propinsi pada tahun yang sama sebesar 6,81 juta per tahun. Dari sisi pendapatan per kapita ini, Aceh Tenggara berada pada peringkat kedua puluh dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Daerah ini hanya lebih unggul dari Sulubussalam, Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue.

Gambar 2.22 PDRB Per Kapita Non Migas Atas Dasar Harga Konstan Kab. Aceh Tenggara dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2012



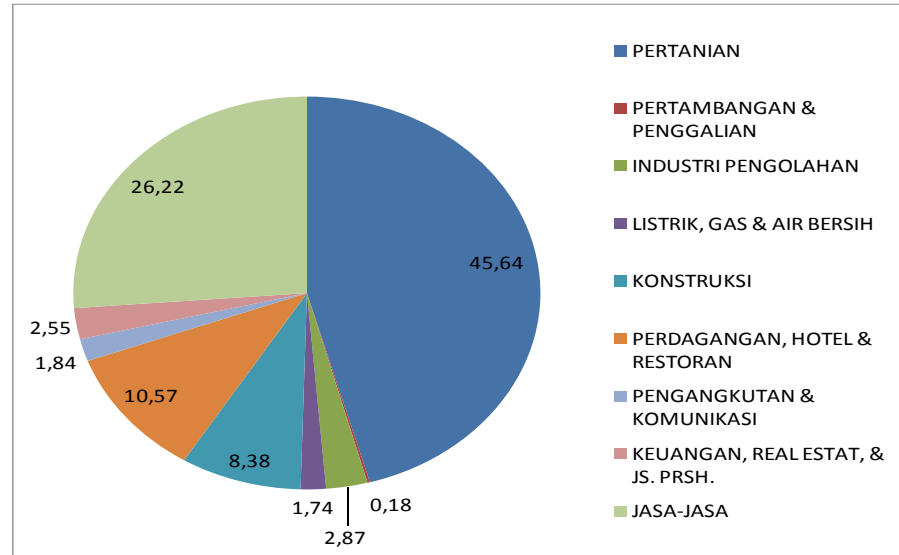
Sumber : BPS Aceh, 2013 (diolah)

Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Aceh Timur dengan kontribusi mencapai 45,64 persen. Sementara itu sektor-sektor lainnya yang juga berperan penting adalah Sektor Jasa-jasa (26,22 persen), Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (10,57 persen), serta Sektor Konstruksi (8,38 persen).

Ditinjau dari sisi pertumbuhan, Sektor Konstruksi merupakan pendorong utama perekonomian di Aceh Tenggara untuk saat ini. Tahun 2012, sektor ini mengalami pertumbuhan 17,76 persen. Sementara Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan

Jasa Perusahaan mengalami peningkatan hingga 10 persen. Namun andilnya dalam perekonomian relatif kecil (dibawah 3 persen), sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan dalam perekonomian daerah. Sektor Pertanian sendiri hanya mampu tumbuh 3,45 persen. Sedangkan Sektor jasa-jasa meningkat moderat sebesar 4,54 persen.

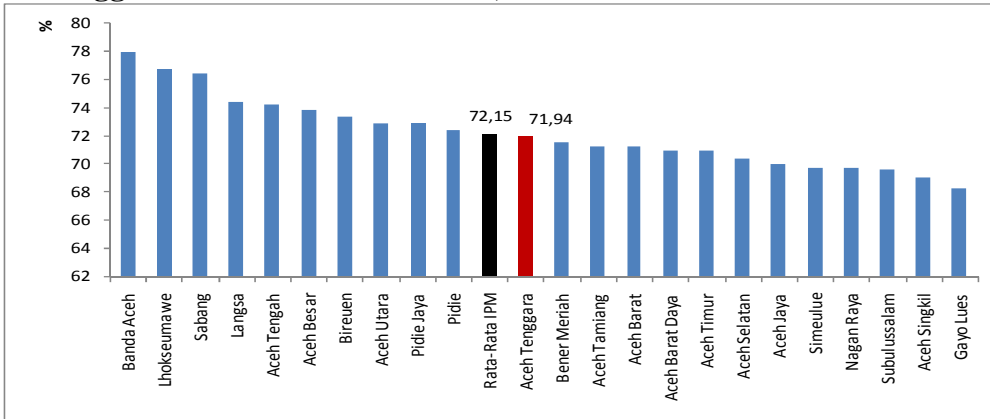
Gambar 2.23 Kontribusi Ekonomi Sektoral Kab. Aceh Tenggara Tahun 2012



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013 (diolah)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Tenggara yang sebesar 71,94 masih berada di bawah rata-rata propinsi yang mencapai 72,15 di tahun 2011.

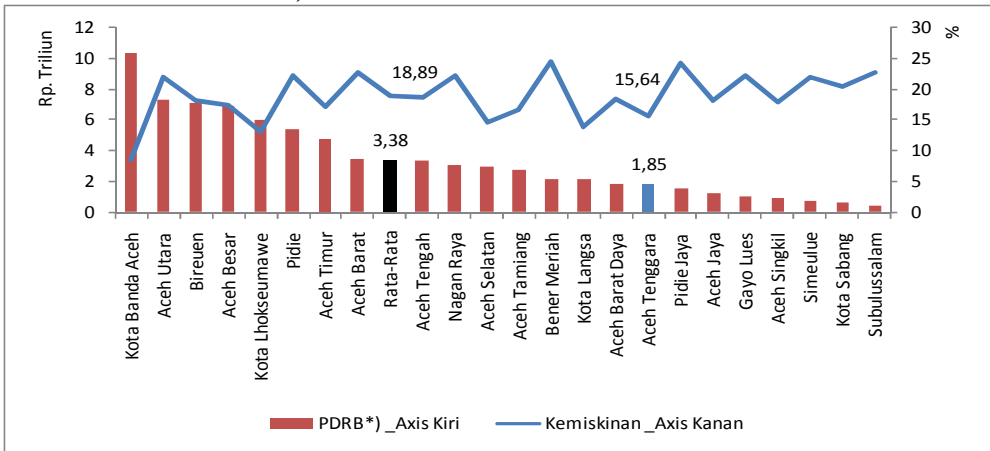
Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Aceh Tenggara dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2011



Sumber : BPS Aceh, 2013

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara terus membaik, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih berada di bawah rata-rata Aceh. Persentase tingkat kemiskinan di daerah ini pada tahun 2012 tercatat sebesar 15,64 persen turun dari sebelumnya 16,39 persen tahun 2011. Selama periode 2005-2012 tingkat kemiskinan di daerah ini mengalami penurunan sangat signifikan mencapai 9,88 persen.

Gambar 2.25 Tingkat Kemiskinan Kab. Aceh Tenggara dan Kab./Kota di Aceh, Tahun 2012



Sumber : BPS Aceh, 2013 (diolah)

BAB III

PROFIL AGROINDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN ACEH

3.1 Profil Agroindustri

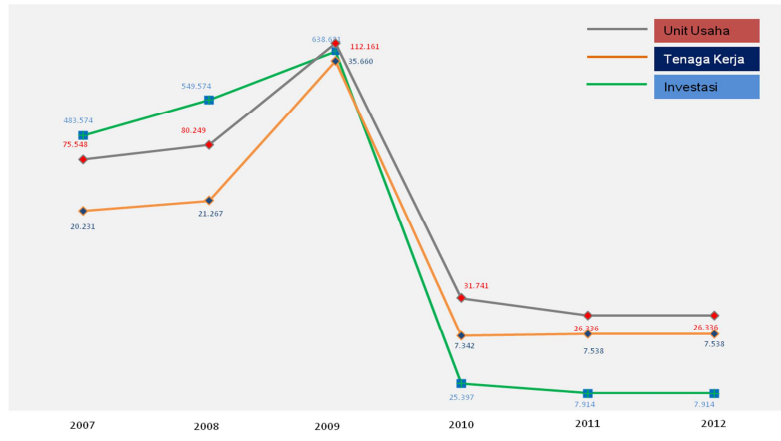
Keberadaan agroindustri (industri yang bahan bakunya berbasis pertanian) khususnya dan industri pengolahan umumnya, pada dasarnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja terampil daerah, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sayangnya sampai saat ini industri pengolahan di Aceh secara keseluruhan belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Kontribusi sektor industri pengolahandengan migas terhadap PDRB Aceh, secara keseluruhan cenderung terus menurun yaitu dari 12,48 persen pada tahun 2007 turun menjadi 10,23 persen di tahun 2011. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh semakin berkurangnya produksi pengolahan gas alam cair di kawasan industri strategis Lhokseumawe. Kontribusi industri pengolahan tanpa migas juga tidak mengalami peningkatan yang berarti, yaitu dari 5,47 persen (2007) menjadi 5,63 persen (2011). Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan bahan baku utama yang dihasilkan di Aceh, yaitu yang bersumber dari pertanian, belum berkembang sebagaimana yang diharapkan (RPJM Aceh 2012-2017).

Jumlah usaha industri kecil menengah terus mengalami perkembangan dan pada tahun 2009 telah mencapai 35.660 unit, meningkat tajam hingga 67,64 persen dari tahun 2008 yang populasinya berjumlah 21.275 unit. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan karena adanya proses pendataan ulang melalui *software* dari Kementerian Perindustrian, sehingga tidak terjadi lagi duplikasi pendataan.

Tahun 2011 dan 2012 jumlah industri kecil menengah cenderung mengalami stagnansi yang merupakan efek dari krisis ekonomi global. Untuk investasi dan tenaga kerja juga mengikuti perkembangan populasi industri kecil menengah. Pada tahun 2012, industri kecil menengah menyediakan lapangan pekerjaan untuk 44.969 tenaga kerja dengan jumlah nilai investasi sebesar Rp. 567,85 Juta. (Renstra Disperindag Aceh 2013-2017).

Gambar 3.1 Perkembangan Industri Kecil Menengah Aceh 2007-2012



Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (*Diolah*)

Industri pengolahan di Aceh setiap tahunnya terus berkembang. Melalui pembinaan intensif yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan instansi terkait, telah menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah. Tahun 2012 jumlah IKM di Aceh mencapai 10.434 unit, naik 38,42 persen dibandingkan dengan jumlah IKM pada tahun 2011 yang berjumlah 7.538 unit. (Renstra Disperindag Aceh 2013-2017).

Secara umum, meskipun industri kecil dan menengah Aceh cukup potensial dalam mendukung perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, daya saingnya masih rendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Provinsi Sumatera Utara, misalnya. Rendahnya daya

saing ini disebabkan karena rendahnya kualitas produk yang dihasilkan serta kurangnya informasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Terkait dengan agroindustri Aceh, daya saing dan produktivitasnya juga masih rendah. Kegiatan perdagangan produk pertanian Aceh masih cenderung dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) yang pada gilirannya menyebabkan masih rendahnya nilai tambah (*value added*). Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di Aceh terutama diakibatkan oleh masih rendahnya peran swasta dalam mengolah bahan baku pertanian. Sejalan dengan itu, industri kecil dan rumah tangga Aceh pun produktivitasnya masih sangat rendah dan belum mampu bersaing dengan produk-produk dari luar daerah.

Kepemilikan lahan pertanian oleh petani yang masih rendah juga merupakan persoalan. Rata-rata kepemilikan lahan per kepala keluarga hanya sekitar 0,25 – 0,6 ha/kk (RPJMA 2012-2017). Kecilnya lahan yang dimiliki masyarakat menyebabkan kesempatan berusaha di sektor pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan pemanfaatan teknologi yang masih sederhana (tradisional) yang menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas komoditas yang dibudidayakan. Hasil penelitian di bidang agribisnis pertanian memberikan informasi bahwa kepemilikan lahan setidaknya minimal per KK seluas rata-rata 2 hektar untuk mendukung kehidupan petani yang layak.

Untuk mengatasi terbatasnya luas lahan yang dimiliki petani sehingga memenuhi kelayakan secara ekonomi, maka pemerintah telah mencoba mengatasinya dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menertibkan tanah-tanah terlantar milik negara yang tidak tergarap dan tidak tersertifikat, serta akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tanah terlantar yang dimaksud adalah tanah negara yang ada hak penggunaannya, tapi tidak dimanfaatkan.

Pemanfaatan tanah terlantar tersebut antara lain untuk masyarakat dalam rangka reformasi agraria, dan untuk kepentingan strategi negara dan pemerintah di antaranya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan pengembangan perumahan rakyat. Tanah terlantar tersebut dipergunakan sebagai cadangan umum negara untuk relokasi masyarakat jika terjadi bencana, relokasi masyarakat jika terdapat keperluan penting terkait pertahanan dan keamanan juga terkait dengan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 dan UU Nomor 5 Tahun 1960, pengambilalihan tanah negara yang terlantar dengan mekanisme peringatan kepada pemilik hak dapat dilakukan. Jika dalam tiga kali peringatan tanah yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) masih juga diterlantarkan maka negara dapat mengambil alih.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Aceh masih sangat tergantung pada Sumatera Utara. Hampir semua lini kebutuhan didatangkan dari luar Aceh. Umumnya produk-produk industri dan hasil pertanian masih didatangkan dari Sumatera Utara dan Propinsi lainnya.

Isu lainnya yang penting dalam pengembangan industri Aceh adalah belum optimalnya sarana dan prasarana ekspor impor yang ada. Sarana dan prasarana kegiatan ekspor impor di beberapa pelabuhan ekspor di Aceh masih belum optimal. Ketersediaan gudang dan sarana *container* di pelabuhan belum maksimal, serta kapal ekspor juga belum beroperasi dengan sempurna. Hal ini menyebabkan kegiatan pengiriman barang via laut tidak lancar, sehingga biaya operasional ekspor menjadi lebih tinggi karena dilaksanakan di luar daerah Aceh.

Ditinjau dari potensinya, sebenarnya agroindustri Aceh mempunyai prospek yang menjanjikan, dimana potensi-potensinya mencakup industri pengolahan hasil pertanian (IPHP), industri peralatan dan mesin pertanian (IPMP) dan industri jasa sektor pertanian (IJSP). Upaya yang harus dilakukan untuk pengembangan agroindustri dengan strategi pengembangan produk unggulan daerah melalui program *one village one product* (OVOP), penerapan teknologi tepat guna pasca panen, serta membangun kerjasama dan sinergisitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala pengembangan industri pengolahan dan agroindustri Aceh adalah dengan pembinaan melalui pelatihan teknis, magang, pameran dalam dan luar negeri, bantuan mesin/peralatan dan sarana kerja. Ke depan perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut dan berkesinambungan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dibidang industri, maka diperlukan peningkatan SDM aparatur, pengembangan peralatan yang berteknologi, dan perluasan akses pasar melalui pameran-pameran. Pertumbuhan industri di Aceh untuk masa mendatang perlu lebih ditingkatkan dengan menggali potensi-potensi yang ada dan membangun kawasan-kawasan industri dimasing-masing wilayah.

3.2 Ketenagakerjaan

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) Aceh secara umum masih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata nasional. Hal ini direpresentasikan oleh masih relatif rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh. Demikian juga dengan daya saing SDM Aceh masih tergolong rendah, dengan indikasi masih terbatasnya jumlah lulusan SDM kejuruan yang memiliki keterampilan (*skill*), rendahnya daya saing lulusan SMA/ sederajat untuk memasuki Perguruan Tinggi, masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Hal ini tergambar dari angka rasio ketergantungan hidup mencapai 54,89 persen pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 55,59 persen pada tahun 2009. Rasio ketergantungan hidup tahun 2009 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung 56 penduduk usia tidak produktif (RPJMA 2012-2017).

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011 terutama di Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 88 ribu orang (10,92%) dan Sektor lainnya (Sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; Kontruksi; Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga

Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan) sekitar 11 ribu orang (5,42%). Sedangkan Sektor Lainnya mengalami penurunan sekitar 23 ribu orang (12,55%).

Pada tahun 2011 Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan adalah sektor yang menampung tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 48,49 persen. Secara berurutan sektor lain yang menampung tenaga kerja paling banyak adalah Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan sebesar 19,36 persen, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 16,15 persen, Sektor Lainnya sebesar 12,08 persen, dan terakhir Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,91 persen.

Tabel 3.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Aceh, 2009 – 2011

Kegiatan Utama	2009	2010		2011	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	847.095	869.110	809.788	903.447	898.225
Industri Pengolahan	80.772	75827	77828	124.369	72.509
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	264.453	271.815	314.323	282.781	299.183
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	331.508	355.092	361.971	393.921	358.704
Lainnya *)	208.733	194.826	212.344	193.386	223.852
Jumlah	1.732.561	1.766.670	1.776.254	1.897.904	1.852.473

*) Sektor Lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air, Konstruksi, Transportasi, dan Keuangan.

Sumber: BPS, 2012

Dari 1.852 juta orang yang bekerja pada Februari 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 33,48 persen, diikuti berusaha sendiri 19,32 persen, kemudian pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 18,52 persen, lalu berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 17,53 persen. Untuk status pekerjaan, berusaha dibantu buruh tetap dan bekerja bebas, baik disektor pertanian maupun non pertanian nilainya dibawah lima persen.

Tabel 3.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Aceh, 2009 – 2011

Kegiatan Utama	2009	2010		2011	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha Sendiri	355.868	353.371	348.323	435.756	357.943
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh Tidak Dibayar	331.612	340.731	357.382	358.514	324.722
Berusaha dibantu buruh tetap	71.555	71.060	90.589	76.2960	89.781
Buruh/Karyawan/Pegawai	51.804	63.684	58.084	63.390	75.983
Pekerja Bebas di Pertanian	45.393	37.061	42.985	26.001	40.716
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	331.612	345.484	332.159	363.449	343.086
Jumlah	1.732.561	1.766.670	1.776.254	1.897.904	1.852.473

Sumber: BPS, 2012

Berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran menurut wilayah, Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk menganggur terbanyak (20.132 orang), sedangkan Kota Sabang yang terkecil (847 orang). Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Aceh Jaya sebesar 66,97 persen, sebaliknya yang terendah di Kota Langsa sebesar 61,70 persen .

Tabel 3.3 Penduduk yang Bekerja, Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kotadi Aceh Agustus 2011

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan		TPAK	TPT
		Bekerja	Pengangguran		
1	Simeulue	33.217	2.639	66,35	7,36
2	Aceh Singkil	38.513	3.119	64,95	7,67
3	Aceh Selatan	86.232	5.902	64,13	6,41
4	Aceh Tenggara	69.889	5.822	64,00	7,69
5	Aceh Timur	141.738	12.282	63,65	7,97
6	Aceh Tengah	73.406	4.772	65,24	6,10
7	Aceh Barat	75.845	5.176	65,45	6,39
8	Aceh Besar	148.633	12.802	64,21	7,93
9	Pidie	157.157	11.678	62,49	6,92
10	Bireuen	162.517	13.460	62,75	7,65
11	Aceh Utara	211.686	20.132	63,00	8,68
12	Aceh Barat Daya	53.664	3.936	64,25	6,83
13	Gayo Lues	31.998	2.383	65,24	6,93
14	Aceh Tamiang	103.805	7.470	64,75	6,71
15	Nagan Raya	61.607	4.732	66,10	7,13

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan		TPAK	TPT
		Bekerja	Pengangguran		
16	Aceh Jaya	34.390	2.307	66,97	6,29
17	Bener Meriah	52.001	2.849	66,86	5,19
18	Pidie Jaya	55.494	4.793	63,10	7,95
19	Banda Aceh	95686	8.916	61,72	8,52
20	Sabang	13.120	847	65,96	6,06
21	Langsa	59.227	4.880	61,70	7,61
22	Lhokseumawe	68.405	5.649	62,07	7,63
23	Subulussalam	24243	2.160	64,54	8,18
Total		1.852.473	148.786	63,78	7,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Jika ditinjau berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan, jumlah pengangguran di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Tingkat pengangguran di pedesaan pada tahun 2011 sebanyak 111.594 orang, sedangkan di perkotaan sebanyak 37.192 orang. Demikian juga bila dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di pedesaan sebanyak 1.342.574 orang, sedangkan di perkotaan sebanyak 509.899 orang.

Tabel 3.4 Penduduk Perkotaan dan Pedesaan yang bekerja, Pengangguran menurut Kabupaten/Kotadi Aceh Agustus 2011

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan		Pedesaan	
		Bekerja	Pengangguran	Bekerja	Pengangguran
1	Simeulue	6.127	342	27.090	2.297
2	Aceh Singkil	8.931	687	29.582	2.512
3	Aceh Selatan	12.185	380	74.047	5.044
4	Aceh Tenggara	11.404	778	58.485	5.044
5	Aceh Timur	15.557	1.249	126.181	11.033
6	Aceh Tengah	18.436	688	54.970	4.084
7	Aceh Barat	20.523	1.210	55.322	3.966
8	Aceh Besar	41.385	3.547	107.248	9.255
9	Pidie	23.292	1.408	133.865	10.270
10	Bireuen	37.036	2.673	125.481	10.787
11	Aceh Utara	35.886	2.731	175.800	17.401
12	Aceh Barat Daya	9.541	459	44.123	3.477
13	Gayo Lues	5.310	239	26.688	2.144
14	Aceh Tamiang	33.261	2.053	70.544	5.417
15	Nagan Raya	5.784	87	55.823	4.645
16	Aceh Jaya	2.291	3	32.099	2.304
17	Bener Meriah	9.998	428	42.003	2.421
18	Pidie Jaya	4.112	167	51.382	4.626

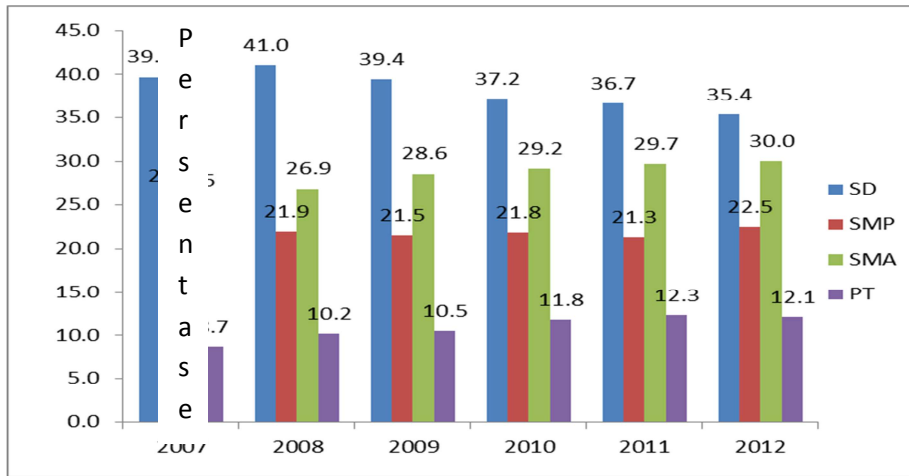
No	Kabupaten/Kota	Perkotaan		Pedesaan	
		Bekerja	Pengangguran	Bekerja	Pengangguran
19	Banda Aceh	95.686	8.916	-	-
20	Sabang	7.967	575	5.153	272
21	Langsa	49.299	4.149	9.928	731
22	Lhokseumawe	51.376	4.069	17.029	1.580
23	Subulussalam	4.512	354	19.731	1.806
	Total	509.899	37.192	1.342.574	111.594

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Ditinjau dari jenjang pendidikannya, penduduk Aceh yang bekerja masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SLTA dan setingkatnya, diikuti lulusan SMP. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan yang proporsional pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2009. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja maka kualitas tenaga kerja di Aceh masih rendah.

Komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan selama tahun 2007 - 2012 masih didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah, meskipun menunjukkan trend yang terus menurun, yaitu sebesar 65,8 persen pada tahun 2007 menjadi 57,9 persen tahun 2012. Komposisi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 2007, angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi mencapai 8,7 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 12,1 persen. Hal tersebut merupakan dampak dari program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta semakin mudahnya akses pendidikan, sehingga jumlah angkatan kerja berpendidikan SD dan SMP dari tahun ke tahun diprediksi akan terus mengalami penurunan. Sebaliknya angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas diharapkan akan terus mengalami peningkatan, sehingga struktur angkatan kerja beberapa tahun ke depan diperkirakan akan mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.2 Proporsi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Aceh Tahun 2007 - 2012 (%)



Sumber: BPS (Aceh dalam Angka Tahun 2008 – 2012)

Masalah lainnya yang dihadapi oleh tenaga kerja di Aceh, selain rendahnya kualitas dan produktivitas, adalah keterbatasan kesempatan kerja. Perkembangan perekonomian di Aceh masih belum mengubah struktur lapangan kerja yang masih didominasi oleh sektor informal. Sedangkan kesempatan kerjayang tersedia untuk sektor formal sangat minim.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Aceh jika dibandingkan dengan rata-rata nasional menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Aceh belum berjalan seperti yang diharapkan. Artinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah belum mampu untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Salah satu faktor penyebabnya adalah belum berkembangnya investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga penciptaan perluasan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegiatan pembangunan belum efektif karena peran swasta yang belum signifikan.

Masalah penduduk miskin di Aceh merupakan tantangan yang cukup berat dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 19,48%, masih jauh lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,36%. Sebaran penduduk miskin Aceh lebih dominan berada di pedesaan, yaitu 80,14%, sedangkan diperkotaan hanya 19,86%. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan.

BAB IV

PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI ACEH BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

4.1 Padi (Aceh Utara)

4.1.1 Gambaran Umum Komoditas

Pemerintah Indonesia telah menetapkan daerah Aceh sebagai lumbung pangan nasional. Selama beberapa tahun terakhir produktivitas padi, kedelai dan jagung di Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2012, untuk komoditas padi, Aceh merupakan daerah lumbung beras peringkat ke-9 nasional. Secara umum, setiap tahunnya Aceh mengalami surplus padi 300 ribu sampai dengan 400 ribu ton (PECAPP, 2013).

Aceh Utara merupakan kabupaten andalan penghasil padi di Aceh, ditinjau dari aspek-aspek luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitasnya. Aceh Utara memiliki luas tanam, luas panen dan produksi padi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh. Sementara untuk produktivitas, meskipun bukan pada peringkat tertinggi, Aceh Utara memiliki produktivitas di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Pada tahun 2012, luas tanam padi Aceh Utara meliputi areal yang mencapai 68.189 ha atau 15,5% dari total luas tanam seluruh Aceh, yaitu 438.855 ha. Luas tanam tersebut tergolong sangat luas jika dibandingkan dengan luas tanam rata-rata kabupaten/kota di Aceh (minus Sabang yang tidak memiliki kegiatan pertanian padi) yang hanya mencapai 4,5 persen.

Dengan areal luas tanam tersebut, pada tahun 2012 Aceh Utara memiliki produksi padi sebesar 341.951 ton, atau setara dengan 19% dari produksi seluruh padi di Aceh. Suatu kontribusi yang sangat besar. Memperhatikan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan posisi Aceh sebagai lumbung pangan nasional, sangat tergantung pada stabilitas dan peningkatan produksi padi di Aceh Utara.

Meskipun memiliki luas tanam dan produksi padi tertinggi di Aceh, Aceh Utara hanya menduduki peringkat keempat dalam produktivitas padi. Pada tahun 2012, produktivitas padi Aceh Utara mencapai 4,69 ton/ha, masih berada di bawah Aceh Besar, Pidie dan Bireun, yang masing-masing memiliki produktivitas 4,98 ton/ha, 4,88 ton/ha dan 4,74 ton/ha. Produktivitas padi Aceh Utara ini berada sedikit di atas produktivitas padi Aceh yang mencapai 4,61 ton/ha. Peningkatan produktivitas padi Aceh Utara sehingga sebanding dengan luas tanam padi yang dimilikinya tergantung pada program intensifikasi pertanian, yang meliputi pengadaan benih unggul, perbaikan teknis budidaya (pemupukan, pengendalian hama penyakit dan pengairan).

Tabel 4.1.1 Luas Tanam, Luas Puso, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012

Kabupaten/Kota Regency/City	Luas Tanam Planted Area (ha)	Luas Puso Damaged Area (ha)	Luas Panen Harvested Area (ha)	Produksi Production (ton)	Produktivitas Productivity (ton/ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Simeulue	6 907	5	7 353	26 005	3,54	
2. Aceh Singkil	2 220	351	1 710	6 611	3,87	
3. Aceh Selatan	19 367	611	15 248	64 309	4,22	
4. Aceh Tenggara	12 320	40	13 902	62 462	4,49	
5. Aceh Timur	46 442	363	46 488	213 033	4,58	
6. Aceh Tengah	7 092	170	5 869	25 816	4,40	
7. Aceh Barat	15 039	304	10 877	44 342	4,08	
8. Aceh Besar	47 124	4 350	40 887	203 516	4,98	
9. Pi d i e	43 904	2 225	41 838	204 052	4,88	
10. Bireuen	36 285	2 186	29 821	141 440	4,74	
11. Aceh Utara	68 189	674	72 924	341 951	4,69	
12. Aceh Barat Daya	29 019	70	20 554	96 426	4,69	
13. Gayo Lues	6 654	252	7 251	31 776	4,38	
14. Aceh Tamiang	27 193	1 442	22 292	102 082	4,58	
15. Nagan Raya	33 903	868	17 296	75 899	4,39	
16. Aceh Jaya	13 081	48	9 907	41 211	4,16	
17. Bener Meriah	2 944	177	3 255	13 903	4,27	
18. Pidie Jaya	13 606	148	12 559	62 014	4,94	
19. Banda Aceh	121	50	69	285	4,13	
20. Sabang	-	-	-	-	-	
21. Langsa	3 493	-	3 196	13 295	4,16	
22. Lhokseumawe	2 239	72	2 651	11 645	4,39	
23. Subulussalam	1 713	334	1 856	6 665	3,59	
Jumlah <i>Total</i>	2012 <i>2011</i>	438 855 <i>405 075</i>	14 740 <i>9 054</i>	387 803 <i>380 686</i>	1 788 738 <i>1 772 962</i>	4,61 <i>4,66</i>

Sumber: BPS Provinsi Aceh dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh

Pada tahun 2011, Baktiya merupakan kecamatan dengan luas lahan sawah terluas di Kabupaten Aceh Utara, mencapai 5.068 ha atau 11,3 persen dari total luas lahan sawah di Aceh Utara, yaitu 44.870 ha. Beberapa kecamatan lainnya yang memiliki lahan sawah yang relatif luas adalah Lhoksukon, 3.495 ha, Sawang 2.930 ha, Seunedon 2.915 ha, Baktiya Barat 2.572 ha, dan Tanah Jambo Aye 2.352 ha

Tabel 4.1.2 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan 2011

Kecamatan/ Sub District	Luas Kecamatan/ Sub District Area	Luas Lahan Sawah/ Rice Field	Luas Lahan Bukan Sawah/ Non-Rice Field
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Sawang	38 465	2 930	32 830
2 Nisam	11 474	1 968	7 072
3 Nisam Antara	8 438	21	6 856
4 Banda Baro	4 235	1 093	1 777
5 Kuta Makmur	15 132	2 000	12 484
6 Simpang Kramat	7 978	702	6 357
7 Syamtalira Bayu	7 753	1 408	4 577
8 Geureudong Pase	26 928	230	7 948
9 Meurah Mulia	20 257	1 756	11 723
10 Matang Kuli	5 694	1 961	2 902
11 Paya Bakong	41 832	1 429	18 984
12 Pirak Timu	6 770	1 394	4 220
13 Cot Girek	18 900	704	11 288
14 Tanah Jambo Aye	16 298	2 352	12 252
15 Langkahan	15 052	1 404	10 514
16 Seunuddon	10 063	2 915	4 726
17 Baktiya	15 867	5 068	6 188
18 Baktiya Barat	8 308	2 572	4 607
19 Lhoksukon	24 300	3 495	12 179
20 Tanah Luas	3 064	1 934	737
21 Nibong	4 491	1 143	2 248
22 Samudera	4 328	1 533	2 414
23 Syamtalira Aron	2 813	1 162	1 258
24 Tanah Pasir	2 038	797	753
25 Lapang	1 927	596	789
26 Muara Batu	3 334	1 522	956
27 Dewantara	3 947	781	997
Jumlah	329 686	44 870	189 636

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara

Meskipun Kecamatan Baktiya memiliki luas tanam, luas panen, dan produksi padi tertinggi di Aceh Utara, dalam hal produktivitas, Kecamatan Nisam dan Kecamatan Sawang menduduki peringkat teratas, masing-masing sebesar 76,98 Kw/Ha dan 75,46 Kw/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa program instensifikasi pertanian di kedua kecamatan ini berjalan relatif lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan Baktiya dan kecamatan-kecamatan lainnya di Aceh Utara.

Tabel 4.1.3 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan 2011

Kecamatan/ Sub Distric	Luas Tanam/ Plantation Area (Ha)	Luas Panen/ Harvesting Area (Ha)	Produktivitas/ Productivity (Kw/Ha)	Produksi/ Production (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1 Sawang	4 584	4 584	75,46	34 590,86	
2 Nisam	3 801	3 755	76,98	28 905,99	
3 Nisam Antara	-	-	-	-	
4 Banda Baro	1 826	1 779	49,84	8 866,54	
5 Kuta Makmur	4 000	4 000	54,11	21 644,00	
6 Simpang Kramat	1 351	1 306	50,07	6 539,14	
7 Syamtalira Bayu	2 400	2 400	51,47	12 352,80	
8 Geureudong Pase	452	460	45,32	2 084,72	
9 Meurah Mulia	3 642	3 642	53,13	19 349,95	
10 Matang Kuli	1 719	1 710	48,30	8 259,30	
11 Paya Bakong	1 516	1 321	39,54	5 223,23	
12 Pirak Timu	807	844	39,67	3 348,15	
13 Cot Girek	907	907	48,11	4 363,58	
14 Tanah Jambo Aye	4 704	4 704	52,07	24 493,73	
15 Langkahan	2 826	2 801	52,34	14 660,43	
16 Seunuddon	4 360	4 360	52,14	22 733,04	
17 Baktiya	8 334	8 334	57,47	47 895,50	
18 Baktiya Barat	3 933	3 933	51,22	20 144,83	
19 Lhoksukon	5 312	5 312	58,65	31 154,88	
20 Tanah Luas	3 480	3 700	50,11	18 541,07	
21 Nibong	1 773	1 773	50,23	8 905,78	
22 Samudera	2 433	2 633	50,44	13 280,85	
23 Syamtalira Aron	2 160	2 160	50,24	10 851,84	
24 Tanah Pasir	1 330	1 488	44,46	6 615,65	
25 Lapang	872	686	43,47	2 982,04	
26 Muara Batu	3 040	3 040	78,13	23 751,52	
27 Dewantara	1 140	1 115	55,40	6 177,10	
Jumlah/ Total					
	2011	72 702	72 747	56,05	407 716,14
	2010	60 492	60 097,00	53,55	321 799,07
	2009	56 627	53 724,00	53,05	285 019,80
	2008	57 804	57 694	48,02	277 034,20

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara

Berdasarkan data tahun 2011, sebagian besar sawah di seluruh kecamatan di Aceh Utara di irigasi semi teknis, yaitu mencapai 26.097 ha. Sampai tahun 2011 tidak ada yang menggunakan sistem irigasi teknis. Sementara itu, sawah tadah hujan juga masih relatif luas, yaitu 9.137 ha, dan yang menggunakan irigasi sederhana dan non PU masing-masing seluas 4.428 ha dan 4.073 ha.

Tabel 4.1.4 Luas Tanam Sawah Berdasarkan Jenis Irigasi di Aceh Utara Tahun 2011

Kecamatan Sub Distric	Jenis Irigasi/Type Irrigation							
	Teknis	Semi Teknis	Seder- hana	Non P.U.	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Lain- lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Sawang	-	1 042	647	191	1 050	-	-	-
2 Nisam	-	-	1 536	105	40	-	119	168
3 Nisam Antara	-	-	-	-	21	-	-	-
4 Banda Baro	-	-	493	-	600	-	-	-
5 Kuta Makmur	-	-	933	1 044	-	-	-	23
6 Simpang Kramat	-	-	-	450	252	-	-	-
7 Syamtalira Bayu	-	1 356	-	-	52	-	-	-
8 Geureudong Pase	-	220	-	-	10	-	-	-
9 Meurah Mulia	-	1 300	456	-	-	-	-	-
10 Matang Kuli	-	1 713	-	-	248	-	-	-
11 Paya Bakong	-	925	-	-	-	504	-	-
12 Pirak Timu	-	-	263	109	1 022	-	-	-
13 Cot Girek	-	-	-	-	704	-	-	-
14 Tanah Jambo Aye	-	1 684	-	-	668	-	-	-
15 Langkahan	-	1 304	-	-	100	-	-	-
16 Seunuddon	-	1 870	-	-	1 045	-	-	-
17 Baktiya	-	4 017	-	-	1 051	-	-	-
18 Baktiya Barat	-	1 310	-	68	992	41	-	161
19 Lhoksukon	-	2 439	-	597	459	-	-	-
20 Tanah Luas	-	1 220	-	510	204	-	-	-
21 Nibong	-	922	-	221	-	-	-	-
22 Samudera	-	1 435	-	-	98	-	-	-
23 Syamtalira Aron	-	1 162	-	-	-	-	-	-
24 Tanah Pasir	-	456	-	311	30	-	-	-
25 Lapang	-	-	-	417	100	79	-	-
26 Muara Batu	-	1 522	-	-	-	-	-	-
27 Dewantara	-	200	100	50	391	30	10	-
Jumlah/Total	-	26 097	4 428	4 073	9 137	654	129	352

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara

Sebagian besar sawah di Aceh Utara pada tahun 2011 sudah ditanami dua kali setahun, meliputi areal seluas 35.296 ha, dari 44,870 ha. Meskipun demikian hampir 10% masih ditanami padi hanya satu kali dalam setahun. Berdasarkan data tahun 2011 ini juga diketahui bahwa belum ada satu kecamatan pun di Aceh Utara yang melakukan penanaman padi tiga kali dalam setahun.

Tabel 4.1.5 Luas Sawah Ditanami Padi Satu, Dua dan Tiga Kali Setahun 2011

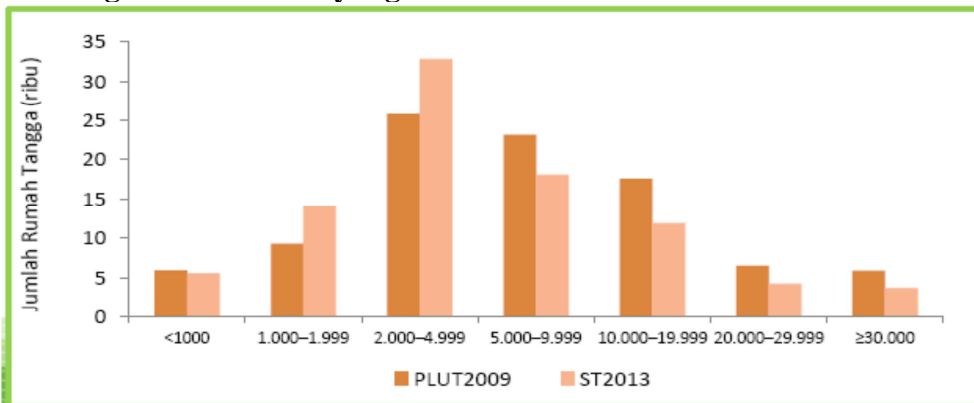
Kecamatan/ Sub Distric	Ditanami/Planted			Tidak Ditanami Padi / Unplanted	Sementara Tdk Diusahakan/ Uneffort	Luas Sawah/ Rice Field Area
	Satu Kali/ Once	Dua Kali/ Twice	Tiga Kali/ Three Times			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
1 Sawang	271	2 659	-	-	-	2 930
2 Nisam	145	1 536	-	119	168	1 968
3 Nisam Antara	-	-	-	20	1	21
4 Banda Baro	600	493	-	-	-	1 093
5 Kuta Makmur	-	1 977	-	-	23	2 000
6 Simpang Kramat	-	702	-	-	-	702
7 Syamtalira Bayu	52	1 356	-	-	-	1 408
8 Geureudong Pase	10	220	-	-	-	230
9 Meurah Mulia	-	1 742	-	-	14	1 756
10 Matang Kuli	-	1 961	-	-	-	1 961
11 Paya Bakong	504	925	-	-	-	1 429
12 Pirak Timu	1 394	-	-	-	-	1 394
13 Cot Girek	150	260	-	110	184	704
14 Tanah Jambo Aye	668	1 684	-	-	-	2 352
15 Langkahan	60	1 304	-	40	-	1 404
16 Seunuddon	763	1 870	-	282	-	2 915
17 Baktiya	1 051	4 017	-	-	-	5 068
18 Baktiya Barat	741	1 378	-	241	212	2 572
19 Lhoksukon	294	2 686	-	240	275	3 495
20 Tanah Luas	204	1 730	-	-	-	1 934
21 Nibong	-	1 143	-	-	-	1 143
22 Samudera	98	1 435	-	-	-	1 533
23 Syamtalira Aron	-	1 162	-	-	-	1 162
24 Tanah Pasir	30	767	-	-	-	797
25 Lapang	100	417	-	79	-	596
26 Muara Batu	-	1 522	-	-	-	1 522
27 Dewantara	366	350	-	10	55	781
Jumlah/Total	7 501	35 296	-	1 141	932	44 870

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara

Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, pada tahun 2009 terlihat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan lebih dari 5.000 m² mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Aceh Utara. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2013, dimana jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 5.000 m² mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian Aceh Utara tahun 2013, tercatat bahwa pada tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan <1.000 m² sebesar 5.592 rumah tangga, mengalami penurunan sebesar 6,24 persen dibandingkan tahun 2009. Usaha pertanian dengan luas lahan antara 1.000–1.999 m² sebanyak 14.155 rumah tangga, meningkat sebesar 51,76 persen dibandingkan tahun 2009.

Golongan luas lahan 2.000–4.999 m² tercatat mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 32.841 pada tahun 2013, meningkat sebanyak 7.061 rumah tangga jika dibandingkan tahun 2009 (27,39 persen). Sedangkan untuk golongan luas lahan lebih dari 5.000 m², usaha rumah tangga pertaniannya masih tergolong sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha pertanian yang memiliki luas lahan yang kecil.

Gambar 4.1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai PLUT2009 dan ST2013



Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Sub Sektor, 2013

4.1.2 Budidaya

Kepemilikan sawah di Aceh Utara terbagi atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah lahan sawah milik sendiri, kelompok kedua adalah mengusahakan lahan orang lain dengan sistem sewa, dan kelompok ketiga menggunakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Sistem sewa lahan sangat tergantung pada kualitas lahan dan ketersediaan irigasi. Untuk Kecamatan Meurah Mulia, misalnya, sewa lahan berkisar antara 200-250 kg gabah untuk setiap 1.600 m², sementara di Kecamatan Tanah pasir 72-200 kg per 1.600 m². Ada juga yang menyewakan 45 kg per 170 kg gabah. Sementara untuk sistem bagi hasil, berkisar antara 30:70 sampai 50:50 bagi pemilik lahan sawah.

Penanaman padi, pemupukan dan perawatan padi yang dilakukan petani masih banyak yang belum mengikuti anjuran dari Dinas Pertanian Aceh Utara. Untuk jarak tanam padi, Dinas Pertanian menganjurkan jarak tanam 25x25 cm, sementara banyak petani masih menanam terlalu rapat atau melebihi dari jarak tanam yang dianjurkan tersebut.

Untuk penggunaan pestisida, dianjurkan sebanyak 2 liter untuk setiap hektar. Kenyataan menunjukkan sebagian besar petani tidak mengetahui takaran dan jenis pestisida yang digunakan karena biasanya mereka menggunakan tenaga kerja upahan dimana biaya per tangki Rp 15.000 – Rp 20.000. Tidak mengherankan jika kemudian pada musim tanam, banyakpadi yang terkena hama wereng, tikus, dan turgo.

Pupuk yang digunakan petani (urea, SP-36, KCl, dan NPK) juga belum seperti yang diharapkan, baik dari sisi dosis maupun waktu penggunaan. Dosis penggunaan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Adapun rata-rata harga gabah dan pupuk di Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.6 Harga Gabah dan Pupuk di Aceh Utara

Item	Harga
Gabah	Rp 3.900 – Rp 4.100
Urea (20 kg)	Rp 110.000
SP-36 (20 kg)	Rp 110.000
KCl	Rp 160.000

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Menyangkut pemenuhan kebutuhan pupuk petani, sebagaimana di banyak wilayah lainnya, masih belum sesuai dengan harapan. Disparitas (perbedaan) harga pupuk bersubsidi dengan harga non subsidi, sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga memicu terjadinya penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Akibatnya kebutuhan pupuk bersubsidi ditingkat petani yang berhak menjadi berkurang. Solusinya adalah melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap stabilitas harga, baik ditingkat produsen maupun konsumen. Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang belum baik ini yang menyebabkan langkanya pupuk pada saat dibutuhkan. Tidak jauh berbeda, benih/bibit unggul yang bermutu pun belum cukup tersedia untuk mendukung kualitas dan kuantitas produksi.

Usahatani padi sawah menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga maupun pihak luar. Tenaga kerja dari dalam keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak. Untuk tenaga kerja dari luar keluarga, upahnya umumnya sebesar Rp 50.000/HOK (Hari Orang Kerja).

Secara keseluruhan, kepemilikan alat dan mesin pertanian oleh petani Aceh Utara masih rendah. Padahal penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja usaha tani dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Sebagian alsintan tersebut malahan berada dalam kondisi yang rusak sehingga menambah persoalan yang dihadapi.

Tabel 4.1.7 Jenis, Kondisi, dan Jumlah Alat /Mesin Pertanian di Aceh Utara Tahun 2011

	Jenis Alat/Mesin Pertanian/ <i>Agricultural Tools</i>	Kondisi/ <i>Condition</i> (Unit)		Jumlah/ <i>Total</i>
		Baik/ <i>Good</i>	Rusak/ <i>Bad</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Traktor Roda Dua (<6 PK)	359	40	399
	Traktor Roda Dua (6-8,5 PK)	139	17	156
	Traktor Roda Dua (>8,5 PK)	139	15	154
2	Traktor Roda Empat			-
	a. Traktor Mini (<25 PK)	132	10	142
	b. Traktor Sedang (25-50 PK)	7	1	8
	c. Traktor Besar (>50 PK)	6	-	6
3	Alat Penanam (<i>Jabber</i>)	2	-	2
4	<i>Seeder</i>	-	-	-
5	Alat Tanam Padi (<i>Transplanter</i>)	-	-	-
6	<i>Applicator</i> (Alat Pemupukan Urea Tablet)	-	-	-
7	Penebar Pupuk (<i>Spreader</i>)	-	-	-
8	<i>Hand Sprayer</i>	14 623	563	15 186
9	<i>Knapsack Power Sprayer</i>	108	11	119
10	<i>Skid Power Sprayer</i>	5	-	5
11	<i>Swing-fog</i>	-	-	-
12	Emposan Tikus	237	4	241
13	Pembersih Gulma Manual	-	-	-
14	Pembersih Gulma Bermesin	-	-	-
15	Pompa Air	-	-	-
	a. Diameter 2"	58	11	69
	b. Diameter 3 "	36	3	39
	c. Diameter 4 "	66	13	79
	d. Diameter 6 "	133	18	151
	e. Diameter lainnya	-	-	-

	Jenis Alat/Mesin Pertanian/ <i>Agricultural Tools</i>	Kondisi/ <i>Condition</i> (Unit)		Jumlah/ <i>Total</i>
		Baik/ <i>Good</i>	Rusak/ <i>Bad</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
16	Sabit Bergerigi	122 187	1 364	123 551
17	<i>Reaper</i>	-	-	-
18	<i>Combine Harvester</i>	-	-	-
19	<i>Power Thresher</i>	1 606	124	1 730
20	Pembersih Gabah (<i>Cleaner</i>)	2	-	2
21	Pengering (<i>Dryer</i>)	2	-	2
22	Penggiling Padi Besar (<i>Large Rice Mill</i>)	87	10	97
23	Penggiling Padi Kecil (<i>Small Rice Mill</i>)	193	5	198
24	<i>Rice Milling Unit (RMU)</i>	44	1	45
25	Pemecah Kulit Gabah (<i>Huller</i>)	29	-	29
26	Penyosoh Beras Pecah Kulit (<i>Polisher</i>)	18	-	18
27	Pemipil Jagung (<i>Corn Sheller</i>)	2	-	2
28	Penggiling Jagung (<i>Corn Mill</i>)	270	11	281
29	Pemarut Singkong	6	1	7
30	Perajang	-	-	-

Sumber: BPS Aceh Utara, 2013

4.1.3 Sistem Irigasi

Secara keseluruhan, Aceh Utara memiliki 72 Daerah Irigasi (DI). Rinciannya berdasarkan kewenangan pengelolaannya sbb: 3 DI kewenangan pusat, yaitu DI Alue Ubay, DI Kr. Pase Kanan, dan DI Kr. Pase Kiri, 2 DI kewenangan provinsi, yaitu DI Kr. Tuan dan DI Buloh Blang Ara, serta 67 DI kewenangan kabupaten.

Gambar 4.1.2 Daerah Irigasi Aceh Utara Berdasarkan Kewenangan



Sumber: Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara

Perbedaan antara luas areal potensial dan fungsional yang dilayani DI di Aceh Utara sampai dengan tahun 2013 masih relatif cukup besar. Dimana luas fungsional sebesar 36,782 ha, sedangkan luas potensial mencapai 45.696

Tabel 4.1.8 Potensi Irigasi Aceh Utara Tahun 2013

No.	Daerah Irigasi	Luas (Ha)		Kecamatan yang Dilayani
		Potensial	Fungsional	
1.	D.I. JAMBO AYE	15.880	14.062	Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Baktiya Barat, sebagian Lhoksukon, Cot Girek, Seunuddon
2.	D.I. ALUE UBAY	4.143	2.537	Paya Bakong, Pirak Timu, sebagian Lhoksukon, Matangkuli
3.	D.I. PASE KANAN	5.083	4.863	Nibong, Tanah Luas, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, sebagian Matangkuli
4.	D.I. PASE KIRI	3.308	3.000	Meurah Mulia, sebagian Samudera, Syamtalira Bayu, sebagian Kec. Blang Mangat (Pemko Lhokseumawe)
5.	D.I. KRUENG TUAN	2.226	1.892	Sawang, Muara Batu, Dewantara
6.	D.I. BULOH BLANG ARA	1.180	975	Kuta Makmur
7.	D.I. JAMUAN	900	-	Sawang, Nisam, Banda Baro
8.	IRIGASI SEDERHANA	12.976	9.453	Tersebar dalam 14 kecamatan
Jumlah		45.696	36.782	

Sumber: Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara

Ditinjau dari kondisi jaringan irigasi, yang berada dalam kondisi rusak persentasenya cukup besar, baik untuk saluran beton maupun saluran tanah. Untuk saluran beton, 60% tergolong dalam kondisi baik dari total panjang saluran irigasi beton 350.510 meter, sementara sisanya mengalami rusak ringan, sedang dan berat. Untuk saluran tanah, lebih parah lagi, hanya 37% yang berada dalam kondisi baik dari total panjang saluran tanah 226.233 meter, sementara sisanya dalam kondisi rusak.

Tabel 4.1.9 Jenis dan Kondisi Jaringan Irigasi Aceh Utara Tahun 2013

NO	Nama Ruas Saluran	Panjang (m)	SALURAN BETON				SALURAN TANAH				
			Rusak (m)				Rusak (m)				
			Baik	Ringan	Sedang	Berat	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
1	DI JAMBO AYE	265.744	51.764	86.699	10.225	1.049	50.813	48.401	15.572	1.220	
			- Saluran Primer	32.714	2.891	720	619	-	20.897	3.238	4.349
2	DI ALUE UBAY	31.428	48.873	85.979	9.606	1.049	29.916	45.163	11.223	1.220,50	
			- Saluran Sekunder	233.030	18.605	634	8.211	2.668	1.310	-	-
3	DI PASE KANNAN	63.590	10.025	7.655	-	761	1.609	-	-	-	
			- Saluran Primer	21.403	10.950	634	7.450	1.059	1.310	-	-
4	DI PASE KIRI	62.130	17.966	9.510	10.279	500	12.949	2.931	8.255	1.200	
			- Saluran Primer	17.781	10.697	1.370	1.400	-	400	1.202	1.512
4	DI PASE KIRI	62.130	45.809	7.269	8.140	8.879	500	12.549	1.729	6.743	-
			- Saluran Sekunder	17.300	31.448	7.905	995	-	19.627	1.845	310
	- Saluran Primer	17.300	17.110	155							

4.1.4 Industri Pengolahan dan Agroindustri Padi

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara (2012) menunjukkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Aceh Utara berjumlah 2.274 unit usaha. Terdiri dari industri formal 891 unit dan non formal 1.383 unit, dengan investasi Rp. 17.466.404.000 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 8.772 orang. Dari jumlah IKM tersebut, industri kerajinan merupakan industri utama, berjumlah 672 unit dengan 2.849 tenaga kerja. Industri-industri potensial lainnya diantaranya adalah Industri perkayuan, industri kecap dan saos, industri pupuk organik, industri kelapa terpadu, industri tusuk sate, dan industri pemrosesan pinang.

Pada tahun 2012, industri makanan, minuman dan tembakau, termasuk di dalamnya industri pengolahan padi (penggilingan padi, tepung beras, dll), memberikan kontribusi yang masih sangat terbatas, yaitu hanya 5% dari total kontribusi industri pengolahan Aceh Utara yang mencapai Rp 457,797 miliar. Industri pengolahan di Aceh Utara ditopang secara dominan oleh industri pupuk kimia yang memberikan kontribusi 73% dari seluruh industri pengolahan yang ada di daerah ini.

Tabel 4.1.10 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2012

	Jenis Industri	Kontribusi (Rp juta)	%
A	Industri Migas	0,00	
	1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	
	2. Gas Alam Cair	0,00	
B	Industri Bukan Migas	457.797,04	
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau	20.600,87	5%
	2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	9.155,94	2%
	3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	32.045,79	7%
	4. Kertas dan Barang Cetak	22.889,85	5%
	5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	334.191,84	73%
	6. Semen & Brg. Galian bukan logam	9.155,94	2%
	7. Logam Dasar Besi & Baja	0,00	

	8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	13.733,91	3%
	9. Barang lainnya	16.022,90	4%
Total		457.797,04	100%

Sumber: BPS Aceh, 2013 (diolah)

Sementara itu, berdasarkan hasil Sensus Pertanian di Kabupaten Aceh Utara yang diadakan tahun 2013, diketahui jumlah perontok padi dan penggilingan padi di daerah ini adalah sbb:

Tabel 4.1.11. Jumlah dan Kondisi Perontok Padi dan Penggilingan Padi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012

Jenis Alat/Mesin Pertanian	Kondisi (Unit)		Jumlah
	Baik	Rusak	
Perontok Padi (Thresher)	1.349	148	1.497
Penggilingan Padi Kecil (Small Rice Mill)	154	7	161
Penggilingan Padi Menengah (Medium Rice Mill)	34	2	36

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Aceh Utara, 2013

Dari keseluruhan Usaha Penggilingan Padi yang ada di Aceh Utara, terdapat 6 Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Pertanian yang memiliki kapasitas produksi dan/atau kapasitas gudang terbesar, sbb:

Tabel 4.1.12 KUD Penggilingan Padi dengan Kapasitas Produksi dan Kapasitas Gudang Terbesar di Aceh Utara

No	Nama Usaha	Kecamatan	Kapasitas Produksi	Kapasitas Gudang
1	KUD Teras	Jambo Aye	2 ton/jam	1.000 ton
2	KUD Gaya Baru	Meurah Mulia	2 ton/jam	1.000 ton
3	KUD Matang Panyang	Tanah Pasir	2 ton/jam	1.000 ton
4	KUD Harapan Tani	Tanah Luas	2 ton/jam	1.000 ton
5	KUD Nisam	Nisam	1 ton/jam	200 ton
6	Koperasi Pertanian	Nibong	2 ton/jam	Tidak ada

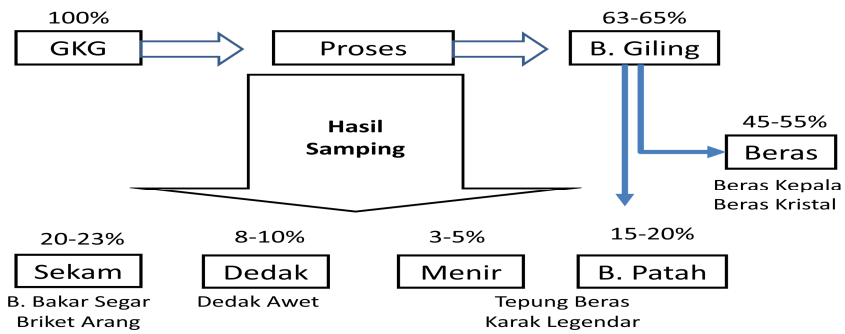
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara

Disamping usaha penggiling padi yang berjumlah relatif banyak, Aceh Utara juga memiliki usaha agroindustri yang cukup potensial lainnya, yaitu usaha penggilingan tepung beras. Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen dan pedagang, diketahui terdapat setidaknya 4 usaha tepung beras skala menengah yang beroperasi di Aceh Utara.

Kegiatan agroindustri yang berbasis komoditas padi yang dikembangkan di Aceh Utara, sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya di Aceh, umumnya masih berupa penggilingan padi, dedak dan tepung beras. Pengembangan produk-produk turunan padi lainnya (kompos, arang, aneka kue, dll) perlu dipikirkan di masa mendatang. Dari aspek kelayakan ekonomi, pengembangan produk-produk turunan tersebut sangat tergantung pada skala industri yang dikembangkan.

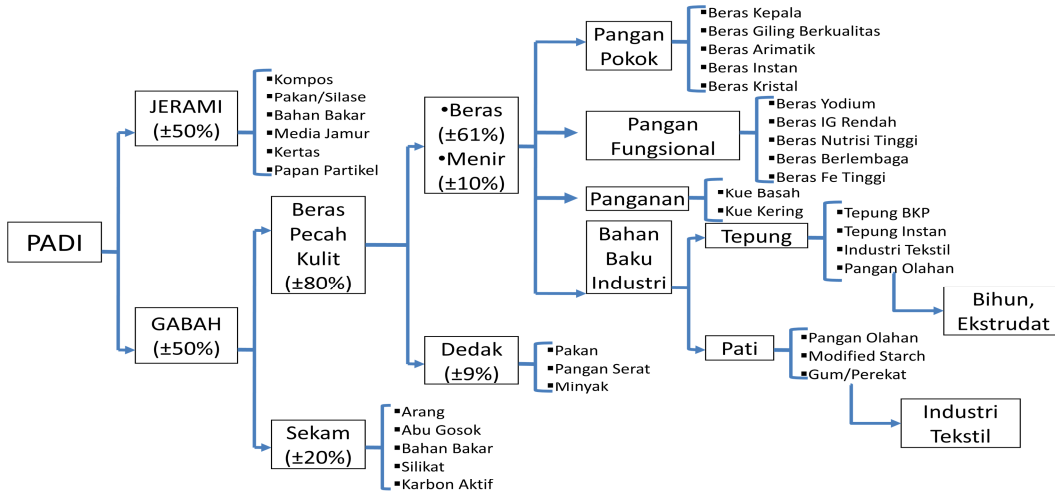
Aceh Utara sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar sebagai lokasi pemasaran kue-kue tradisional Aceh yang menggunakan bahan baku tepung beras atau beras seperti dodol, kue semprong, bu grieng, bolu ikan, peyek, kembang loyang, keukarah. Kue-kue tersebut sayangnya belum berkembang dengan optimal di Aceh Utara disebabkan oleh persoalan-persoalan seperti lokasi pemasaran, promosi, modal, kemasan dan kualitas. Pemkab Aceh Utara memang pernah memfasilitasi pengembangan beberapa tempat yang menjadi pusat penjualan kue-kue tradisional tersebut di tahun 2012, yaitu di daerah Geudong dan Panton Labu. Upaya ini gagal juga karena pengembangan sentra penjualan tidak didahului oleh pengembangan sentra produksi.

Gambar 4.1.3 Model Agroindustri Padi Terpadu



Sumber: Rachmad & Suismo (2007)

Gambar 4.1.4 Produk Turunan Padi



Sumber: Deptan (2006)

Harga dan nilai tambah bisnis dari produk turunan padi cukup bervariasi. Berikut harga dan analisis nilai tambah beberapa produk turunan padi di Aceh Utara. Untuk gabah rata-rata harga jualnya Rp 4.000/kg. Setelah diolah jadi beras harganya rata-rata menjadi Rp 8.000/kg. Hasil sampingan dari produksi beras berupa menir (beras patah) Rp 3.500, dedak Rp 1.500/kg dan sekam Rp 3.000/kg. Di kebanyakan industri penggilingan padi skala kecil, sekam (yang telah diolah menjadi abu gosok), tidak dijual. Menir selanjutnya diolah menjadi tepung beras dengan harga sekitar Rp 7.000/kg.

Tabel 4.1.13 Harga Produk Turunan dan Produk Sampingan Padi

No	Jenis Produk	Harga (Rp/kg)	Pertambahan Nilai (%)	Keterangan
1	Padi	4.000		
2	Beras	8.000	100	
3	Menir	3.500		Produk sampingan
	Tepung beras (olahan menir)	7.000	100	
4	Aneka kue	50.000	614	
5	Dedak	1.500		Produk sampingan

6	Sekam	3.000		Produk sampingan
---	-------	-------	--	------------------

Sumber: diolah dari berbagai sumber

4.1.5 Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013), tercatat jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Kabupaten Aceh Utara adalah di Subsektor Tanaman Pangan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Tanaman Pangan sebanyak 72.183 rumah tangga, rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perkebunan 48.402 rumah tangga, peternakan 34.495 rumah tangga, dan hortikultura 19.341 rumah tangga.

Jika tanaman pangan dan hortikultura disatukan maka jumlah rumah tangga usaha ini berjumlah sebesar 91.524 atau 49,2% dari seluruh jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, yaitu 186.080 rumah tangga.

Gambar 4.1.5 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Aceh Utara Menurut Subsektor PLUT2009 dan ST2013

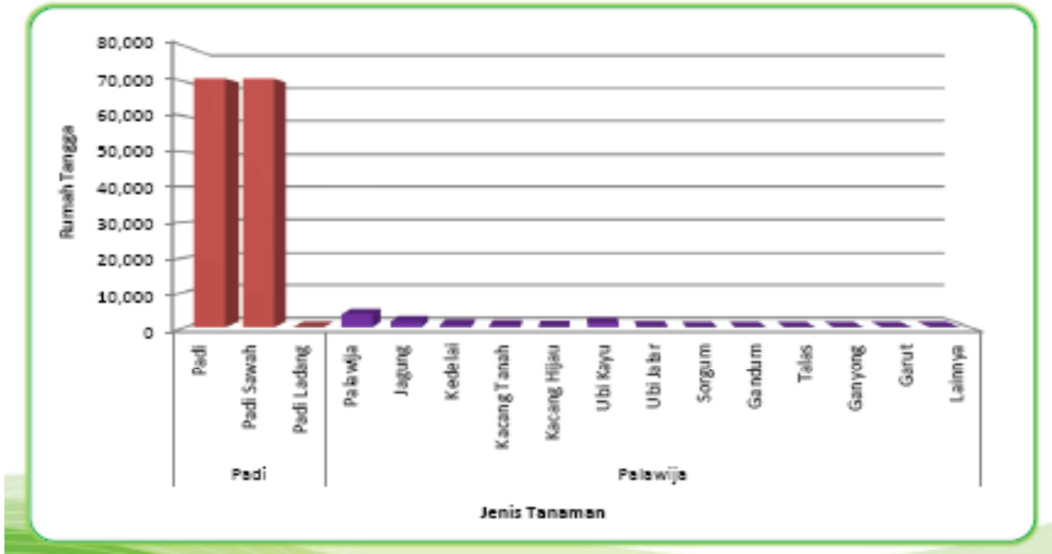


Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Aceh Utara Menurut Subsektor 2013

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013), diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh rumah tangga yang mengelola tanaman padi. Dari

keseluruhan rumah tangga yang mengelola tanaman pangan, yaitu 72.183, sebanyak 98,29 persen (70.948) diantaranya mengelola tanaman padi,

Gambar 4.1.6 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman, ST2013



Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Aceh Utara Menurut Subsektor 2013

Pada tahun 2012, terdapat 108.053 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dari total 190.591 orang. Jumlah pekerja di sektor pertanian ini merupakan yang terbesar dibandingkan jumlah pekerja pada sektor-sektor lainnya, yaitu mencapai 56,7%. Ini berarti bahwa lapangan usaha pertanian merupakan bidang perkerjaan utama masyarakat Aceh Utara.

Tabel 4.1.14 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Aceh Utara 2012

No	Sektor	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase
1	Pertanian	108.053	56,7%
2	Pertambangan	1.776	0,9%
3	Industri	6.951	3,6%

4	Listrik		
5	Bangunan	7.407	3,9%
6	Perdagangan	32.300	16,9%
7	Transportasi	7.538	4,0%
8	Keuangan	1.112	0,6%
9	Jasa	25.454	13,4%
Total		190.591	100%

Sumber: BPS Aceh 2013 (diolah)

Jika dilihat dari sisi produktivitas tenaga kerja, maka sektor pertanian secara keseluruhan dan subsektor tanaman pangan (dimanadi Aceh Utara padi merupakan komoditas dominan), memiliki produktivitas tenaga kerja sangat rendah. Dengan menggunakan PDRB sebagai output untuk mengukur produktivitas, maka PDRB ADHB/kapita dan PDRB ADHK/kapita sektor pertanian masing-masing sebesar Rp 27,38 juta dan Rp 10,809 juta, yang terendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sementara produktivitas/kapita tanaman pangan lebih rendah lagi, yaitu PDRB ADHB/kapita sebesar RP 18,6 juta dan PDRB ADHK/kapita sebesar Rp 7,9 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas petani padi yang merupakan mayoritas pekerja di sektor tanaman pangan di Aceh Utara ternyata masih sangat rendah dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor dan subsektor ekonomi lainnya.

Tabel 4.1.15 Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Utara Per Sektor Ekonomi (PDRB/kapita) tahun 2012

Sektor	PDRB (RP juta)		Jumlah TK	PDRB ADHB/ Kapita	PDRB ADHK/ kapita
	ADHB	ADHK			
Pertanian	2.958.975,40	1.167.897,23	108.053	27,38	10,81
Pertambangan	5.089.521,93	1.297.142,21	1.776	2.865,72	730,37
Industri	457.797,04	240.405,28	6.951	65,86	34,59
Listrik	21.810,04	8.246,96			
Bangunan	523.187,15	173.034,89	7.407	70,63	23,36

Perdagangan	1.081.136,50	475.077,17	32.300	33,47	14,71
Transportasi	836.775,17	336.035,24	7.538	111,01	44,58
Keuangan	314.160,40	89.730,05	1.112	282,52	80,69
Jasa	1.028.147,51	536.052,59	25.454	40,39	21,06
Total	12.311.511,15	4.323.621,62	190.591	64,60	22,69
Sub sektor tanaman pangan	988.820,59	419.993,46	53.162	18,60	7,90

Sumber: BPS Aceh 2013 (data diolah)

*Estimasi berdasarkan data ST 2013 BPS Aceh Utara (jumlah tenaga kerja di subsektor tanaman pangan sekitar 49,2% dari total jumlah tenaga kerja di sektor pertanian)

Sementara itu, produktivitas petani padi Aceh Utara di tahun 2012 secara umum adalah setiap petani rata-rata menghasilkan 4,06 ton padi per tahun. Perhitungan adalah sbb:

- Jumlah rumah tangga petani padi di Aceh Utara sebesar 70.948 atau 78% dari total 90.658 rumah tangga usaha pertanian (BPS, ST 2013).
- Dengan asumsi jumlah petani Aceh Utara sebesar 78% dari total jumlah tenaga kerja sektor pertanian (108.053 orang), maka jumlah petani padi adalah sebanyak 84.281 orang.
- Produksi padi Aceh Utara tahun 2012 sebesar 341.951 ton (BPS Aceh, 2013).
- Maka produktivitas petani padi Aceh Utara adalah $341.951/84.281=4,06$ ton/petani per tahun.

Tabel 4.1.16 Produktivitas Petani Padi Aceh Utara (Ton Padi/Petani/Tahun) Tahun 2012

Item	Jumlah	Keterangan
% RT petani padi Aceh Utara	78	ST 2013
Jumlah tenaga kerja Sek. Pertanian	108.053	BPS
Jumlah TK petani padi	84.281	
Produksi padi (ton)	341.951	BPS
Produktivitas petani padi (ton/petani/thn)	4,06	

Sumber: BPS Aceh 2013 (data diolah)

4.1.5.1 Analisis Finansial Usaha Padi

Berikut disajikan analisis biaya usahatani padi sawah, keuntungan, dan pendapatan petani per musim tanam. Luas lahan analisis yang digunakan adalah 0,57 ha, yang merupakan luas lahan rata-rata yang diusahakan petani di Aceh Utara tahun 2013 (BPS ST Kabupaten Aceh Utara, 2013).

Tabel 4.1.17 Analisis Finansial Kegiatan Ekonomi Padi Sawah 0,57 Ha Per Musim Tanam di Aceh Utara

No	Komponen	Rata-rata Jumlah Biaya (Rp)
A	Biaya Produksi (benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dll)	7.500.000
B	Nilai produksi (revenue)*	10.000.000
C	Pendapatan bersih (net revenue)	2.500.000
	Rata-rata hasil produksi: 2.500 kg	
	Revenue cost ratio (RCR): 1,33	

Keterangan: * Harga padi diasumsikan Rp 4.000/kg.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih rata-rata petani padi sawah Aceh Utara sebesar Rp 2,5 juta per musim tanam. Jika mengacu pada rata-rata musim tanam padi sawah di Aceh Utara yang umumnya dua kali setahun, maka pendapatan bersih rata-rata petani per tahun Rp 5 juta. Jika diasumsikan jumlah anggota keluarga petani Aceh Utara rata-rata 6 orang, maka rata-rata pendapatan per kapita anggota keluarga petani adalah Rp 417 ribu per tahun per orang, atau setara dengan Rp 70 ribu per kapita per bulan.

Jika mengacu pada garis kemiskinan di Aceh Utara., pendapatan per kapita anggota keluarga petani ini masih jauh berada di bawah garis kemiskinan, yang pada tahun 2013 Rp. 274.799.

Jadi meskipun usahatani padi sawah per hektar ini menguntungkan, karena nilai RCR (*Revenue Cost Ratio*) nya mencapai 1,33, tetapi pendapatan yang diperoleh petani masih di bawah garis kemiskinan. Agar pendapatan petani berada di atas garis kemiskinan, luas

lahan padi sawah yang diusahakan petani perlu ditingkatkan, yang berdasarkan penelitian setidaknya menjadi 2 ha.

4.1.5.2 Analisis Finansial Agroindustri Padi Penggilingan Padi Industri Skala Kecil

Berikut disajikan biaya dan keuntungan dari kegiatan agroindustri penggilingan padi industri skala kecil/menengah UD Usaha Droe di Desa Reulut Timur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, selama 6 bulan..

Tabel 4.1.18 Analisis Finansial Usaha Penggilingan Padi UD Usaha Droe di Desa Reulut Timur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara (Selama 6 Bulan)

No	Komponen	Nilai satuan (Rp)	Jumlah
A	Biaya Produksi		
1	Gabah (total 14 ton)	4.000.000	56.000.000
2	Tng kerja (2 org, 4 hr kerja /minggu)	35.000	6.720.000
3	Bahan bakar solar	5.500	1.584.000
4	Biaya karung utk jual (625 X 14= 583 krg)	1.700	1.428.000
5	Biaya karung untuk bagi hasil (120 krg)	1.700	204.000
6	Penyusutan alat		1.000.000
Total biaya			66.936.000
B	Nilai produksi (revenue)		
1	Jual beras (583 sak)	112.000	65.296.000
2	Dedak (1.820 kg)	1.500	2.730.000
3	Menir (70 kg)	3.500	2.450.000
4	Giling (bagi hasil, 1.800 kg)	7.466	13.438.800
Total nilai produksi			83.914.800
C	Pendapatan bersih (net revenue)		16.978.800

Sumber: Hasil wawancara

- Untuk padi yang berkualitas standar, dalam 1 ton padi mesin produksi dapat menghasilkan 62,5% beras (625 kg). Hasil ikutan lainnya adalah dedak 130 kg dan menir 5 kg. Sementara itu, untuk

padi yang berkualitas di bawahnya, karena kurang air pada masa tanam, misalnya, hasil beras yang diperoleh lebih rendah lagi, yaitu berkisar 56%-59%.

- Untuk penggilingan padi dengan cara bagi hasil dengan konsumen, pabrik penggiling padi mengambil bagian 10% dari total hasil beras yang dihasilkan. Rata-rata dalam sehari, pabrik penggilingan skala kecil/menengah dapat memperoleh bagian sebesar 10 kg.
- Pendapatan pemilik usaha Rp 16,978 juta dalam 1 musim panen. Dalam 1 tahun (2 musim panen) pendapatannya sebesar Rp 33,956 juta. Jadi rata-rata pendapatan per bulan $\text{Rp } 33,956 \text{ juta} / 12 = \text{Rp } 2,83 \text{ juta}$. Jika anggota keluarga pemilik usaha 6 orang, maka pendapatan per kapita anggota keluarga Rp 472 ribu, yang berarti berada di atas garis kemiskinan untuk wilayah Aceh Utara.
- Produktivitas tenaga kerja 1 tahun, 1 org tenaga kerja menghasilkan $\text{Rp } 33.956 \text{ juta} / 2 = \text{Rp } 16,978 \text{ juta}$. Sementara itu, pendapatan pekerja rata-rata hanya Rp 35 ribu/hari, atau Rp 560 ribu/bulan,. Jika pekerja sudah berkeluarga, pendapatan ini tergolong berada di bawah garis kemiskinan.
- Terkait dengan jam kerja pekerja, jumlah total per minggu juga masih sangat rendah, rata-rata per hari 4 jam selama 4 hari, jadi hanya 16 jam, masih jauh di bawah standar 35 jam/minggu. Rendahnya jam kerja merupakan salah satu indikasi utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas pekerja.
- Persoalan utama yang dihadapi usaha penggilingan padi ini adalah berhubungan dengan modal usaha. Modal yang dimiliki oleh pemilik penggilingan padi relatif terbatas untuk membeli gabah pada musim panen. Keterbatasan modal ini sulit diatasi karena pemilik penggilingan enggan mengambil kredit di bank. Alasannya karena ketidakpahaman mengenai seluk beluk pengajuan kredit dan kekhawatiran akan hutang di kemudian hari. Padahal berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pihak BRI telah pernah menawarkan kredit kepada yang bersangkutan, tetapi ditolak.

Usaha Perontok Padi

Tabel 4.1.19 Analisis Finansi Usaha Perontok Padi (55 PK) di Desa Reulut Timur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara (1 musim panen= 10 hari kerja)

No	Komponen	Nilai satuan (Rp)	Jumlah
A	Biaya Produksi		
1	Bahan bakar (10 ltr/hari, 10 hari)	6.500	650.000
2	Penyusutan alat		100.000
Total biaya			750.000
B	Nilai Produksi (revenue)		8.000.000
C	Pendapatan bersih (net revenue)		7.250.000
	Pendapatan dibagi 5 orang (termasuk utk pemilik)		1.450.000

Sumber: Hasil wawancara

- Rata-rata dalam setiap musim panen, pekerjaan merontok padi berlangsung selama 10 hari. Ongkos yang dibebankan pemilik usaha kepada konsumen adalah dalam 1 gunca (200 kg atau 15 drum) padi yang dirontokkan, konsumen membayar imbalan sebesar 13 kg atau 1 drum padi.
- Setiap hari, rata-rata padi yang dirontokkan sebanyak 225 drum. Dengan demikian diperoleh imbalan sebanyak 200 kg (15 drum). Jadi selama 10 hari akan diperoleh imbalan sebanyak 2.000 kg atau 2 ton.
- Pendapatan selama 1 musim panen dengan masa kerja 10 hari adalah sebesar Rp 7.250.000. Pendapatan antara pemilik mesin dan pekerja biasanya dibagi rata. Pemilik dan pekerja umumnya berjumlah 5 orang. Jadi setelah dikurangi biaya produksi, masing-masing mendapat Rp 1.450.000 per musim panen. Selama 1 tahun (2 kali musim panen), pemilik dan masing-masing pekerja memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.900.000. Jika mereka tidak memiliki usaha sampingan lainnya dan sudah berkeluarga, pendapatan tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan.

Usaha Tepung Beras

Tabel 4.1.20 Analisis Finansial Usaha Tepung Beras UD Cirasa Desa Lagang Aceh Utara (Mesin 26 PK) (per bulan)

	Keterangan	Kuantitas	Harga (Rp)	Total (Rp)
A	Pengeluaran			
	Beras	2.000 kg	5.400	10.800.000
	Menir	2.800 kg	4.500	12.600.000
	Tenaga kerja (5 org)	100 OH	55.000	5.500.000
	Snack TK	20 hari	30.000	600.000
	Solar utk mesin	140 liter bln	5.500	770.000
	Empang/sak	192 sak	1.000	192.000
	Solar utk mobil	200 liter bln	5.500	1.100.000
	Total			31.562.000
B	Pendapatan kotor			33.600.000
C	Pendapatan bersih			2.038.000

Sumber: Hasil wawancara

- Pendapatan pemilik usaha per bulan Rp 2,038 juta. Jika ada 6 anggota keluarga, maka pendapatan per kapita Rp 339.666, di atas garis kemiskinan Aceh Utara (Rp 274.799).
- Produktivitas tenaga kerja per bulan yaitu 1 pekerja menghasilkan 0,96 ton tepung beras.
- Pendapatan 1 tenaga kerja/bulan (5 hari kerja/minggu) = Rp 55.000x20hari=Rp 1.100.000. Jika setiap tenaga kerja memiliki anggota keluarga 6 org, maka pendapatan/kapita sebesar Rp 183.333, masih di bawah garis kemiskinan.
- Hambatan utama dalam usaha penggilingan tepung beras ini adalah pemasaran masih belum cukup luas karena penggunaan tepung beras (misalnya untuk bahan kue) di Aceh Utara secara umum masih terbatas. Hambatan lainnya, produk masih belum cukup menarik karena masih dijual dalam bentuk kemasan empang biasa yang memuat 25 kg.

Mobil penggiling padi keliling (RMU, 23 PK)

Tabel 4.1.21 Analisis Finansial Usaha Mobil Penggiling Padi (23 PK, 1 musim panen, 2 bulan bekerja)

No	Komponen	Nilai satuan (Rp)	Jumlah
A	Biaya Produksi		
1	Bahan bakar solar (5 ltr/hr, 60 hr)	5.500	1.650.000
2	Penyusutan alat		100.000
Total biaya			1.750.000
B	Nilai Produksi (revenue)		8.400.000
C	Pendapatan bersih (net revenue)		6.650.000
	Pendapatan dibagi 2 orang (termasuk utk pemilik)		3.325.000

Sumber: Hasil wawancara

- Rata-rata dalam setiap musim panen, mobil penggiling padi keliling bekerja selama 2 bulan. Biasanya beroperasi 5 jam per hari, jadi total beroperasi 300 jam selama 1 musim panen.
- Dalam 1 jam, mesin penggiling menggiling 75 kg padi yang menghasilkan 41,66 kg beras (75 kg/1,8).
- Sistem bagi hasil penggiling padi adalah 10% dari beras yang dihasilkan menjadi bagian dari pemilik mesin.
- Per hari dihasilkan 4 kg x 5 jam = 20 kg x Rp 7.000 = Rp 140.000. Dikurangi biaya solar utk mesin (5 liter x Rp 5.500 = Rp 27.500) = Rp 112.500.
- Jadi beras yang didapatkan penggiling padi 4 kg x 300 jam = 1.200 kg.
- Penghasilan kotor 1.200 kg x Rp 7.000 = Rp 8.400.000 per musim panen atau Rp 16,8 juta/tahun.
- Pengeluaran: solar 5 liter/hari x 60 hari = 300 liter x Rp 5.500 = 1.650.000 per musim panen atau Rp 3.300.000 per tahun
- Pendapatan bersih: Rp 8.400.000 – Rp 1.750.000 = Rp 6.650.000 per musim panen atau Rp. 13,3 juta per tahun

- Pendapatan pemilik RMU dan 1 pekerja (jika 50:50) = Rp 6,65 juta/tahun, yang berarti jika mereka berstatus sudah berkeluarga dan tidak memiliki usaha sampingan maka pendapatan per kapita anggota keluarganya tergolong berada di bawah garis kemiskinan.

Penggiling tepung beras skala usaha kecil

- Biasanya penggiling tepung beras jenis ini dimiliki oleh toko-toko yang melayani jasa penggilingan bumbu dapur. Oleh karena itu kegiatan usaha bersifat sambilan, bukan merupakan yang utama.
- Untuk menggiling 1 bambu (1 are) beras milik konsumen, penggiling tepung memperoleh imbalan Rp 4.000

4.1.6 Pemasaran Hasil Produksi

Terkait dengan pemasaran hasil produksi, pada musim panen raya harga komoditas padi, sebagaimana komoditas pertanian lainnya, umumnya mengalami penurunan. Karena terdesak kebutuhan ekonomi dan kebutuhan modal usaha untuk keperluan musim tanam berikutnya, petani terpaksa menggadaikan/mengijonkan hasil produksinya meski dengan harga yang murah. Untuk meminjam dana di bank, petani mengalami kesulitan karena tidak memiliki jaminan.

Untuk mengatasi persoalan jatuhnya harga padi pada saat panen raya, ke depan perlu dipikirkan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditas padi di Aceh Utara. SRG artinya dokumen atau surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi). Komoditas yang disimpan petani tetap menjadi milik petani dengan adanya penerbitan surat bukti kepemilikan penyimpanan komoditas di gudang. Dengan dokumen resi gudang, petani dapat mengagungkannya ke bank sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Aceh Utara menurut ketentuan, memenuhi syarat untuk menjalankan SRG karena produksi padi rata-rata di Aceh Utara selama tiga tahun terakhir melebihi 200.000 ton.

Dilihat dari rantai nilai usaha, pengembangan komoditas padi di Aceh Utara masih dihadapkan pada persoalan-persoalan pemasaran dan

pengolahan. Meskipun tidak diketahui angkanya dengan pasti, tapi sebagian padi yang dihasilkan di Aceh Utara (sebagian kalangan menaksir 40-60%) dibawa ke penggilingan padi di Sumatera Utara. Setelah diolah di sana, beras yang dihasilkan kemudian kembali dipasarkan ke wilayah-wilayah di Aceh. Beras yang diolah di Sumatera Utara sendiri, menurut pendapat banyak konsumen Aceh lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan produksi lokal karena menggunakan mesin dengan teknologi tinggi.

Beras yang diperjualbelikan di pasar di Aceh Utara terdiri dari beras lokal (IR 64) dan beras dari wilayah lain (beras Ramos dari Medan dan beras Tangse) dan beras luar negeri (beras dari Thailand). Harga beli dan jual berbagai jenis beras yang diperdagangkan di toko-toko beras di Aceh Utara adalah sbb:

Tabel 4.1.22 Jenis dan Harga Beras di Aceh Utara

No	Jenis beras	Harga beli	Harga jual
1	IR 64	Rp 7.000 – Rp 7.500	Rp 8.500 – Rp 9.000
2	Beras Tangse	Rp 8.000	Rp 9.500
3	Beras Ramos	Rp 9.000	Rp 10.000
4	Beras Thailand	Rp 9.000	Rp 10.000

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Untuk pemasaran produk-produk turunan padi yang dihasilkan di Aceh Utara, baik beras maupun tepung beras secara keseluruhan masih terbatas di dalam wilayah kabupaten dan Lhokseumawe. Permasalahan kualitas dan kapasitas produksi serta kemampuan pemasaran produk masih merupakan isu-isu yang perlu mendapat perhatian.

4.1.7 Penyuluh, Lembaga, Modal, dan Regulasi

Saat ini Penyuluh Pertanian di Aceh Utara berjumlah 133 orang PNS, dengan jenjang pendidikan SLTA 49 orang. Sedangkan THL 125 orang yang memiliki jenjang pendidikan SLTA 68 orang. Jadi untuk saat ini penyuluh pertanian lapangan sangatlah kurang jika mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 16 yang menyatakan idealnya untuk satu desa memiliki satu penyuluh. Jumlah desa di Aceh Utara sendiri ada 852 desa.

Persoalan lain yang dihadapi terkait dengan penyuluh adalah sebagian penyuluh mengalami alih tugas ke jabatan lain dan sebagian yang lainnya memasuki usia pensiun. Dalam lima tahun terakhir, sekitar 5 penyuluh telah mengalami mutasi ke jabatan struktural. Sementara penyuluh yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan: 3 orang (2015), 3 orang (2016), dan 5 orang (2017).

Honor THL juga masih terbatas. Untuk dua bulan masa kerja yang tidak dibayar oleh pemerintah pusat, pemkab memberikan Rp 1 juta/bulan ditambah uang jalan setiap bulan sebesar Rp 250 ribu.

Menyangkut kelembagaan pelaku usaha tani, sebagian besar masih berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya bertujuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui akses teknologi, permodalan dan informasi. Kelembagaan pemerintah sendiri masih perlu dilengkapi, yaitu dengan pendirian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki lembaga ini, yaitu Dewantara dan Nisam Antara.

Terkait dengan modal, karena luas kepemilikan lahan yang sangat terbatas maka berakibat terhambatnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal. Rata-rata luas lahan yang digarap petani padi di Aceh Utara seluas 0,57 ha, yang masih jauh dari kelayakan usaha penanaman padi seluas minimal 2 ha.

Untuk meningkatkan taraf hidup petani, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. PP ini memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatani. Sayangnya peraturan ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaannya belum didukung penuh oleh *political will* pimpinan daerah, koordinasi antar lembaga terkait dan kesiapan regulasi turunan.

Taraf hidup petani juga kian sulit ditingkatkan karena keterbatasan dukungan terhadap usaha petani (saprodi, bimbingan teknis, pemasaran). Di Aceh Utara, pola kemitraan plasma-inti yang sehat antara pengusaha besar dan petani belum berkembang pada jenis usaha padi dan produk turunannya.

4.1.8 Isu-isu Strategis Pengembangan Agroindustri Padi di Kabupaten Aceh Utara

A. Subsistem Hulu

- a. Lahan pertanian yang digarap rata-rata petani di Aceh Utara (0,57 ha), tidak memenuhi skala kelayakan ekonomiyaitu minimal 2 ha. Konsekuensinya pendapatan rata-rata petani masih berada di bawah garis kemiskinan.
- b. Belum cukup tersedia benih/bibit unggul bermutudan penyediaan bibit unggul tersebut kerapkali sering terlambat.
- c. Sistim distribusi pupuk bersubsidi belum baik yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pada saat dibutuhkan.
- d. Kepemilikan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh petani Aceh Utara masih rendah. Sebagian alsintan tersebut, termasuk bantuan dari pemerintah,berada dalam kondisi yang rusak.
- e. Kondisi jaringan irigasi yang rusak relatif besar. Untuk saluran beton, 60% yang tergolong dalam kondisi baik, sementara untuk saluran tanah, lebih parah lagi, hanya 37% yang berada dalam kondisi baik.

B. Subsistem Budidaya

- a. Penanaman padi yang dilakukan sebagian petani masih belum mengikuti anjuran jarak tanam dariDinas Pertanian Aceh Utara. Penanaman dilakukan terlalu rapat atau melebihi dari jarak tanam yang dianjurkan tersebut. Hal ini menyebabkan padi yang dihasilkan tidak optimal.
- b. Takaran penggunaan pestisida oleh sebagian petani masih belum sesuai dengan ketentuan yang juga mempengaruhi hasil produksi.
- c. Pemakaian pupuk yang dilakukan petani (urea, SP-36, KCl, dan NPK) belum seperti yang diharapkan, baik dari sisi dosis maupun waktu penggunaan.

C. Subsistem Hilir

- a. Masih besarnya padi Aceh Utara yang diolah di Sumatera Utara(40%-60%) yang setelah diolah kemudian dijual kembali ke Aceh Utara.

- b. Pedagang Sumut membelipadi dari Aceh Utara dan wilayah Aceh lainnya dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang ditawarkan pedagang lokal.
- c. Pada musim panen raya harga komoditas padi cenderung menurun. Karena terdesak kebutuhan ekonomi dan kebutuhan modal usaha untuk keperluan musim tanam berikutnya, petani terpaksa menggadaikan/mengijonkan hasil produksinya meski dengan harga yang murah.
- d. Produk olahan padi yang dikembangkan di Aceh Utara masih sangat terbatas, terutama masih berupa produk beras, tepung beras dan dedak. Sementara pengembangan produk-produk turunan dan sampingan lainnya (aneka kue-kue, dll) belum berkembang.
- e. Pendapatan pemilik usaha agroindustri penggilingan padi dan usaha tepung beras sudah layak, tetapi pendapatan para pekerjanya masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kapasitas usaha yang terbatas (usaha penggilingan padi) dan terbatasnya pasar (usaha tepung beras).
- f. Pendapatan pemilik dan pekerja mobil penggilingan padi, perontok padi masih di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh relatif banyaknya jumlah kedua usaha tersebut

D. Subsistem Penunjang

- a. Masih terbatasnya kuantitas penyuluh (total 258 orang: 133 PNS dan 125 THL)..
- b. Penyuluh yang akan pensiun tahun 2015 3 orang, tahun 2016 3 orang, dan tahun 2017 5 orang.
- c. Dari 133 penyuluh PNS, 49 orang berpendidikan setara SLTA dan dari 125 THL, 68 orang berpendidikan setara SLTA.
- d. Honor THL yang dibayar Pemkab (2 bulan terakhir) per bulannya Rp 1 juta. Juga ada tambahan uang jalan untuk penyuluh setiap bulan Rp 250 ribu.
- e. Terbatasnya modal petani untuk menjalankan dan mengembangkan usaha pertanian. Untuk meminjam dana di bank, petani mengalami kesulitan karena tidak memiliki jaminan..

- f. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dalam mendukung adopsi teknologi (penanaman, pupuk, dll), permodalan dan informasi. Kelembagaan tani sebagian besar masih berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas..
- g. Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Nisam belum memiliki Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
- h. PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya belum berjalanseperti yang diharapkan.
- i. Pola kemitraan plasma-inti usaha produk turunan padi belum berkembang.

4.2 Kakao (Pidie Jaya)

4.2.1 Gambaran Umum Komoditas

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Pidie Jaya. Disamping menjadi sumber penghasilan masyarakat, kakao juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial. Peluang pasar yang masih terbuka serta ketersediaan lahan yang luas merupakan potensi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pengembangan kakao.

Secara umum, biji kakao di Indonesia memiliki keunggulan *melting point cocoa butter* yang tinggi, serta tidak mengandung pestisida dibanding biji kakao dari Ghana maupun Pantai Gading. Sebagian besar kakao Indonesia diekspor dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Produk yang diekspor sebagian besar berbentuk biji kering dan hanya sebagian kecil yang berbentuk olahan.

Luas tanam kakao perkebunan rakyat di Aceh hingga tahun 2011 mencapai 10.433 ha, sementara pada tahun 2012 menjadi 12.654 ha. Pada tahun 2012, luas lahan perkebunan kakao terbanyak terdapat di Aceh Tenggara (19.454 ha), sedangkan Pidie Jaya berada di urutan

sesudahnya. Pada tahun ini, produksi kakao di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 3.619 ton.

Tabel 4.2.1 Luas Tanam dan Produksi Kakao Perkebunan Rakyat Menurut Kab/Kota di Prov Aceh 2011-2012

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2011		2012	
	Luas Area (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi Production (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Simeulue	1 890	158	1 806	200
2. Aceh Singkil	585	107	636	147
3. Aceh Selatan	955	106	1 332	153
4. Aceh Tenggara	11 970	7 622	19 454	8 843
5. Aceh Timur	12 108	6 881	12 416	6 536
6. Aceh Tengah	2 300	455	2 322	546
7. Aceh Barat	716	350	722	235
8. Aceh Besar	2 901	277	3 129	426
9. P i d i e	9 464	4 674	9 599	4 499
10. Bireuen	5 436	4 039	6 023	3 801
11. Aceh Utara	8 603	3 056	8 603	2 730
12. Aceh Barat Daya	4 356	2 746	4 356	874
13. Gayo Lues	4 311	660	4 443	888
14. Aceh Tamiang	2 610	1 127	2 215	941
15. Nagan Raya	5 053	1 331	5 372	1 335
16. Aceh Jaya	1 270	210	1 267	206
17. Bener Meriah	933	185	1 190	185
18. Pidie Jaya	10 433	2 795	12 654	3 619
19. Banda Aceh	-	-	-	-
20. Sabang	637	172	637	172
21. Langsa	287	132	303	132
22. Lhokseumawe	135	59	135	64
23. Subulussalam	528	108	816	130
Jumlah/Total	87 481	37 250	99 428	36 661

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2013

Sementara itu, luas tanam kakaoperkebunan besar di Aceh tercatat 1.062 ha dengan produksi 459 ton. Kabupaten Aceh Utara dan Pidie Jaya adalah dua daerah yang memiliki produksi kakao perkebunan besar terbesar di tahun 2012, masing – masing sebanyak 433 ton dan 26 ton. Keseluruhan tanaman kakao perkebunan dimiliki oleh swasta

nasional, sementara Badan Umum Negera (BUMN) dan swasta asing belum melakukan investasi budidaya komoditas ini.

Tabel 4.2.2 Luas Tanam Dan Produksi Kakao Perkebunan Besar Menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2012

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Luas Area (Ha)	Produksi Production (Ton)
(1)	(2)	(3)
1. Simeulue	-	-
2. Aceh Singkil	-	-
3. Aceh Selatan	-	-
4. Aceh Tenggara	-	-
5. Aceh Timur	-	-
6. Aceh Tengah	-	-
7. Aceh Barat	-	-
8. Aceh Besar	7	-
9. Pidie	10	-
10. Bireuen	-	-
11. Aceh Utara	900	433
12. Aceh Barat Daya	-	-
13. Gayo Lues	-	-
14. Aceh Tamiang	65	-
15. Nagan Raya	-	-
16. Aceh Jaya	-	-
17. Bener Meriah	-	-
18. Pidie Jaya	80	26
19. Banda Aceh	-	-
20. Sabang	-	-
21. Langsa	-	-
22. Lhokseumawe	-	-
23. Subulussalam	-	-
Jumlah/Total	1062	459

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2013

Pada tahun 2012, Meureudu adalah kecamatan yang memiliki produksi kakao terbesar di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sebesar 2.110 ton, atau hampir dua pertiga dari total produksi kakao Pidie Jaya yang mencapai 3.618,9 ton. Kecamatan-kecamatan lain yang memiliki produksi relatif tinggi adalah Bandar Dua, Meurah Dua, dan Jangka Buya.

Tabel 4.2.3 Luas Tanam Perkebunan Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, 2012

Kecamatan <i>Sub District</i>	Luas Tanam <i>Planted Area (Ha)</i>			Produksi <i>Production (Ton)</i>
	Belum Menghasilkan <i>Unproductive</i>	Menghasilkan <i>Productive (Ha)</i>	Tua/Rusak <i>Damaged (Ton)</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meureudu	466	2 637	1 855	2 110,0
2. Meurah Dua	35	609	388	308,0
3. Bandar Dua	441	1 129	681	451,0
4. Jangka Buya	385	598	162	245,0
5. Ulim	230	50	129	27,9
6. Trienggadeng	515	461	303	221,0
7. Panteraja	30	40	15	34,0
8. Bandar Baru	1 127	288	80	222,0
Jumlah/Total	3 229	5 812	3 613	3618,9

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pidie Jaya

Kakao merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Pidie Jaya. Komoditas unggulan lainnya antara lain kelapa, kopi, pinang, dan melinjo.

Tabel 4.2.4 Tanaman Perkebunan Unggulan di Kabupaten Pidie Jaya

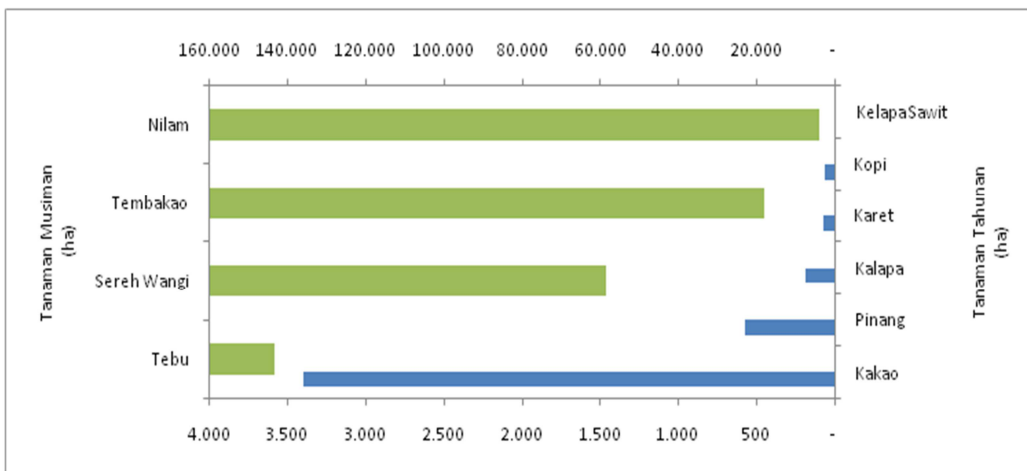
No.	Kecamatan	Jenis Tanaman
1	Bandar Baru	kakao, kemiri, pala, lada, tembakau, kunyit dan jahe.
2	Meureudu	Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, pala, kopi, pinang, kapuk, sagu, aren, tembakau dan tebu.
3	Trienggadeng	Kakao, Lada, Kelapa Dalam, Jahe dan Kunyit.
4	Bandar Dua	Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, kopi, pinang, kapuk, aren, tebu, kunyit dan karet.

5	Ulim	Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, kopi, cengkeh, pinang, kapuk, sagu, aren, tembakau serta tebu.
6	Pante Raja	Kakao, Kelapa Dalam, Kunyit dan Jahe.
7	Jangka Buya	Kelapa Dalam dan Kunyit.
8	Meurah Dua	Kakao, Kelapa Dalam, Jahe dan Sawit.

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pidie Jaya

Perkebunan Kakao di Kabupaten Pidie sangat potensial dikembangkan. Tercatat untuk tanaman tahunan, hingga tahun 2013 luas tanam tanaman kakao mencapai 3.400 ha, jauh lebih luas dibandingkan dengan tanaman-tanaman tahunan lainnya seperti pinang dengan luas 573 ha dan kelapa dengan luas 182 ha. Sementara itu, tanaman musiman untuk sub sektor perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh tanaman nilam, tembakau, sereh wangi dan tebu.

Gambar 4.2.1 Luas Tanaman Semusim & Tanaman Tahunan yang Diusahakan Rumah Tangga Perkebunan Menurut Jenis Tanaman, Thn 2013

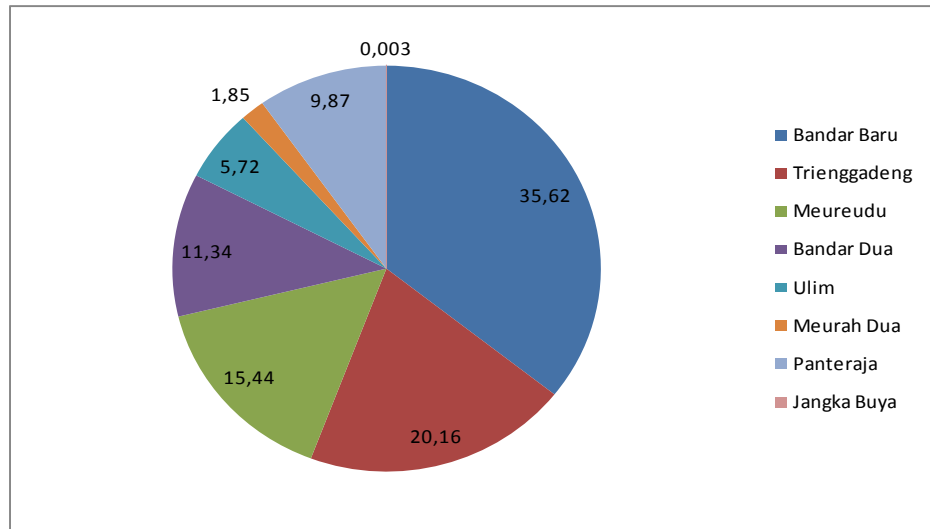


Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Secara umum, luas tanam tanaman kakao tidak tersebar merata di setiap kecamatan. Luas tanam tanaman kakao terbanyak di Kecamatan

Bandar Baru mencapai 121 ha lebih atau setara dengan 35,62 persen. Disusul oleh Kecamatan Trienggadeng seluas 686 ha (20,16 persen) dan Meureudu seluas 525 ha sebanding dengan 15,44 persen. Jangka Buya merupakan kecamatan dengan potensi kakao paling rendah, yaitu hanya 0,03 persen atau tidak mencapai satu ha.

Gambar 4.2.2 Persentase Luas Tanaman Kakao yang Diusahakan oleh Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

4.2.2 Budidaya

Budidaya kakao meliputi sistem usaha tani, panen dan pasca panen, mutu dan pengawasan mutu. Sistem usaha tani meliputi habitat tanaman, pohon pelindung, pemeliharaan tanaman, perbanyakan tanaman, *replanting* dan rehabilitasi gulma, hama dan penyakit. Sedangkan panen dan pasca panen kakao meliputi perkembangan tanaman, panen kakao, fermentasi, pengeringan, penyimpanan, dan mikroorganisme dalam prosesing. Dalam mutu dan pengawasan mutu terdapat komponen-komponen yaitu aroma, standar mutu kakao internasional, sistem pengawasan mutu, *purity*, dan karakter fisik.

Budidaya tanaman kakao di Kabupaten Pidie Jaya selama ini masih dilakukan secara tradisional dengan produktivitas sebelum konflik 700-800 kg/ha, tetapi setelah konflik akibat serangan PBK (Penggerek Buah Kakao) dilaporkan produktivitasnya tinggal setengahnya. Kualitas hasil juga rendah akibat serangan hama tersebut serta perlakuan pascapanen yang minimum. Di samping itu, kelembagaan petani untuk dapat melakukan kegiatan di kebun secara bersama-sama, juga belum terbentuk dengan baik.

Klasifikasi lahan untuk kakao utamanya didasarkan pada sifat kelerengan lahan. Faktor kelerengan merupakan faktor pembatas dalam budidaya kakao yang secara teknologi tidak dapat diubah, meskipun dapat dimanipulasi misalnya dengan terasering. Namun demikian, untuk membangun terasering perlu dana dan teknologi yang mahal. Berdasarkan kelerengan lahan, terdapat 4 kelas lahan, yaitu:

1. Sangat sesuai (S1), yaitu lahan yang kelerengannya antara $< 8\%$
2. Sesuai (S2), yaitu lahan yang kelerengannya antara $8 - 15\%$
3. Sesuai marginal (S3), yaitu lahan yang kelerengannya > 15 sampai $\leq 45\%$.
4. Tidak sesuai (N), yaitu lahan yang kelerengannya $>45\%$.

Sebaran areal kesesuaian lahan kakao di Pidie Jaya berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data total areal dan areal kakao existing, dapat dihitung areal cadangan untuk masing-masing kecamatan.

Tabel 4.2.5 Luas Areal Potensial untuk Kakao di Pidie Jaya (ha)

Kecamatan	Areal dengan kelas kesesuaian (ha)				Existing	Cadangan
	S1	S2	S3	(S1+S2+ S3)		
Bandar Baru	3.967	1.301	4.325	9.592	5.121	4.472
Panteraja	756	176	154	1.086	1.032	54
Trienggadeng	2.406	656	2.182	5.244	2.151	3.093
Meureudeu	1.820	1.074	2.986	5.880	1.145	459
Meurah Dua	541	236	826	1.604	409	1.195

Ulim	1.204	371	651	2.226	1.287	939
Bandar Dua	1.448	1.765	2.104	5.317	1.555	3.762
Jumlah	12.142	5.579	13.228	26.673	12.700	13.974

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pidie Jaya

Proses pembuatan proyek perkebunan kakao dimulai dengan membuat rencana terlebih dahulu sebelum proyek tersebut diimplementasikan. Rencana tersebut mencakup semua kegiatan atau tahapan, baik dalam hal teknis penanaman, maupun pembangunan sarana dan prasarana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan proyek perkebunan kakao ini adalah:

Tabel 4.2.6 Kegiatan dalam Pembangunan Proyek Perkebunan Kakao

No	Kegiatan	Waktu	Pekerja
1	Pembukaan lahan	1,5 Bulan	6 Orang
2	Pembangunan gudang dan Rumah pekerja	1 Bulan	4 Orang
3	Pemesanan pohon pelindung	1 Bulan	
4	Penanaman pohon pelindung	2 Minggu	10 Orang
5	Masa tunggu pohon pelindung tumbuh	6 Bulan	
6	Pembuatan lubang tanam	1 Minggu	10 Orang
7	Pemesanan bibit kakao	1 Bulan	
8	Penanaman bibit kakao	2 Minggu	10 Orang

Sumber: Hasil wawancara dengan petani kakao di Pidie Jaya

Dalam penanaman kakao, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Tanaman penanung sudah harus ditanam terlebih dahulu dan sudah bisa berfungsi menaungi dengan baik;
2. Penanaman dilakukan di awal musim hujan;
3. Media dalam *polybag* tidak pecah;
4. Bibit tidak sedang bertunas;
5. Lubang tanam digali 2–3 bulan sebelum tanam, ukuran lubang 40 cm x 40 cm x 40 cm, dan jarak tanam antar kakao 3 m x 3 m.

Pemangkasan kakao juga merupakan hal yang penting, yang bertujuan untuk membentuk kerangka cabang yang seimbang dan kuat, meratakan sebaran daun produktif, membuang bagian tidak produktif, mengatur aliran udara, mengatur pertunasan, dan mempermudah panen. Dalam hal ini terdapat macam-macam pemangkasan, diantaranya

pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan produksi.

Bibit kakao yang dikembangkan di Pidie Jaya hingga saat ini terdapat 15 klon (S1, S2, M01, M02, M04, M06, Ap, MAP06, 45, MT, BB01, MHP03, THR, YN01, PR) dan di tambah satu bibit lokal yaitu Hibrida. Dari seluruh klon tersebut, 2 klon mulai banyak dikembangkan oleh petani kakao di daerah ini karena keunggulannya yaitu S1 dan S2. Bibit Klon S1 memiliki Ciri-ciri buah berwarna merah dan memiliki pucuk daun muda berwarna merah. Klon ini sudah bersertifikat SK Mentan No. 1694/Kpts/SR.120/12/2008. Pemilik varietas ini adalah Pemda Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Potensi produksi 1,8–2,5 ton/ha/tahun dan tahan penyakit *Vascular Streak Dieback* (VSD). Bibit klon S2 memiliki Ciri-ciri buah dan pucuk daun berwarna merah oranye kecoklatan. Klon ini juga sudah bersertifikat dengan SK Mentan No. 1695/Kpts/SR.120/12/2008: Pemilik varietas ini adalah Pemda Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Potensi produksi 1,8–2,75 ton/ha/tahun.

Pemupukan tanaman kakao, jenis dan dosis pupuk tidak terlalu baku. Untuk pupuk organik, disarankan diberikan sebanyak 20 kg per pohon per tahun.

Tabel 4.2.7 Jenis dan Dosis Pupuk untuk Tanaman Kakao

Umur (Tahun)	Urea (gram/pohon/thn)	TSP (gram/pohon/thn)	KCl (gram/pohon/thn)	Kieserit (gram/pohon/thn)
0–1	25	25	20	20
1–2	45	45	35	40
2–3	90	90	70	60
3–4	180	180	135	70
Lebih dari 4	220	180	170	115

Ket : 1 sendok makan = 20-25 gram

Sumber : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Untuk pemindahan bibit dan pemeliharaannya, disiapkan wadah *polybag* ukuran 30 cm x 20 cm dengan ketebalan 0,08 mm. Mediana adalah campuran tanah atas : kompos : pupuk kandang (2 : 1 : 1). Tanah dipadatkan dan disiram sampai jenuh. Selanjutnya, tanam benih kakao yang sudah berkecambah di tengah *polybag*, 2/3 bagian benih terbenam di dalam media. Tanah sekitar benih dipadatkan dengan tangan untuk menguatkan posisi benih. Penyiraman dilakukan tiap hari atau sesuai kondisi cuaca. Pemupukan dengan urea dilakukan sebanyak 2 gram setiap 2 minggu.

Pada umumnya penyakit kakao terdiri dari : 1. Penggerek Buah Kakao (PBK), yang disebabkan oleh serangga *Conopomorpha cramerella Snell*; 2. Penghisap buah *Helopeltis*; 3. Penggerek batang *Zeuzera coffeae*; 4. Ulat kilan (*Hyposidra talaca*); dan 5. Tikus dan tupai. Dari keseluruhan penyakit tersebut, hama Penggerek Buah Kakao (PBK) merupakan penyakit yang banyak menjangkiti kakao di Pidie Jaya. Penggerek buah kakao merupakan hama yang berbahaya dan sulit dikendalikan. Serangan penggerek buah kakao menurunkan hasil 60–84 %.

Ciri-ciri buah yang terserang PBK yaitu buah berwarna belang kuning hijau, biji saling lengket, ukuran biji kecil, bermutu rendah, dan ada larva/ulat di dalam buah. Kerusakan akibat PBK tergantung pada umur buah, total larva/ulat dalam buah, dan lama periode larva/ulat yang menyerang buah.

Kondisi yang mendukung PBK yaitu curah hujan 100–200 mm per bulan yang mendukung penetasan telur dan aktivitas dewasa penggerek buah, Cuaca kering atau sangat basah menurunkan jumlah penggerek buah. Kebun yang rimbun dan jarang dipangkas rentan hama penggerek buah. Pemangkasan bentuk dan pengaturan tinggi tanaman dapat mengurangi tingkat serangan penggerek buah.

Pengendalian PBK dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, perbaikan pemeliharaan pohon yang terdiri dari: 1. Pemupukan teratur agar pohon sehat dan produktif; 2. Pemangkasan pendek agar produktif dan cukup cahaya; 3. Panen sering, minimal 2 minggu sekali, sebelum larva keluar; dan 4. Membenamkan kulit buah dan buah yang sakit.

Kedua, melalui pengendalian hayati: semut hitam (*Dolichoderus thoraxicus*), jamur *Beauveria bassiana*. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan upaya pengendalian lainnya melalui penyemprotan insektisida golongan piretroid sintetis, penyarungan buah, dll.

4.2.3 Agroindustri Kakao

Sampai dengan tahun 2014, kegiatan agroindustri berbasis komoditas kakao di Pidie Jaya masih sangat terbatas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa usaha agroindustri yang dikelola secara komersial baru dilakukan oleh Koperasi Rimbun dengan produk yang dikembangkan terdiri dari 8 jenis yaitu socolatte 3 in 1, socolatte cocoa powder, socolatte original, socolatte cream, permen socolatte aneka rasa, socolatte bar biasa dan aneka kue coklat. Untuk jenis produk kue, meliputi timphan coklat, bronis gulung, bronis coklat, podding coklat dan nagasari coklat.

Tabel 4.2.8 Produk Agroindustri Berbasis Komoditi Kakao di Kabupaten Pidie Jaya 2014

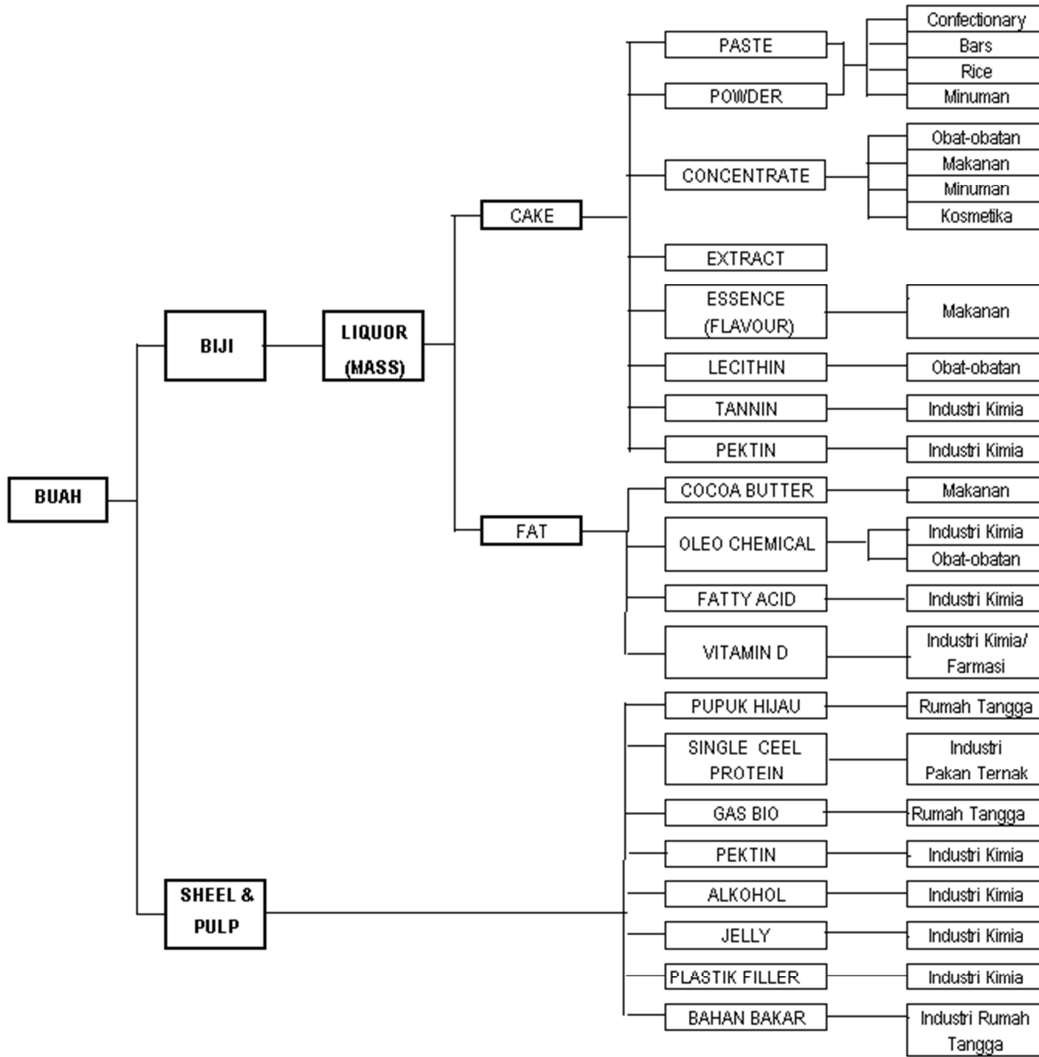
No	Produk Turunan Kakao
1	Socolatte 3 in 1
2	socolatte cocoa powder
3	socolatte original
4	socolatte cream
5	Permen socolatte aneka rasa
6	Socolatte bar biasa
7	Socolatte bar mente
8	Aneka kue coklat
	a. Timphan
	b. Bronis gulung
	c. Bronis coklat
	d. Podding coklat
	e. Nagasari coklat

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2014

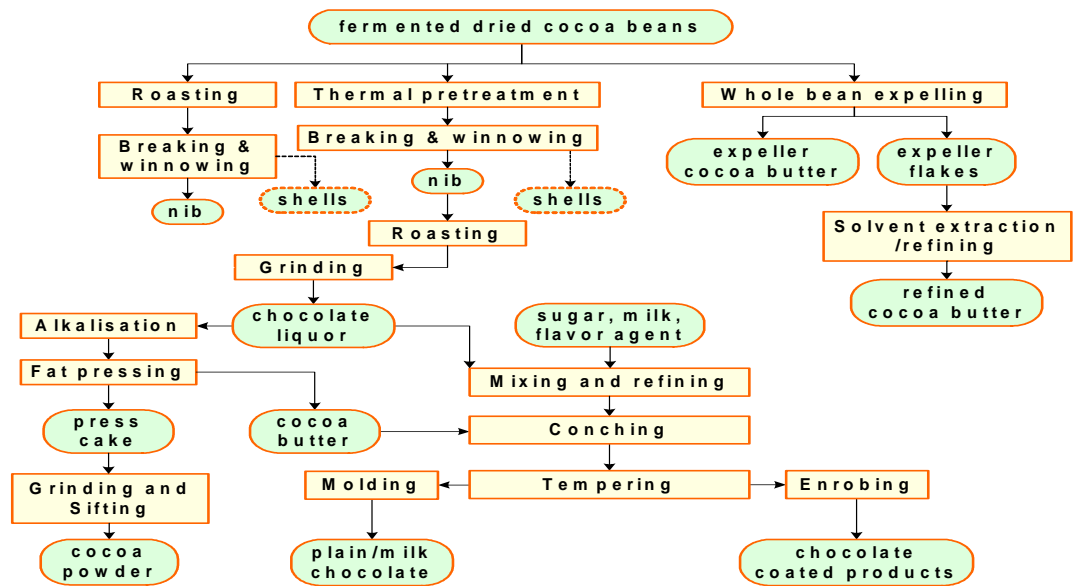
Berkembangnya industri pengolahan kakao akan membawa keuntungan tidak hanya dalam membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani kakao, tetapi juga dalam aspek kesehatan dan pendidikan. Dengan mengkonsumsi coklat dalam jumlah normal secara teratur akan membawa manfaat yang besar bagi tubuh karena coklat dapat menangkap radikal bebas dari dalam tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam coklat (3 x lebih banyak dari teh hijau) dapat mengurangi kolesterol, mencegah penyakit jantung dan kanker, mencegah darah tinggi dan stroke. Selain itu coklat juga mengandung stimulan alami, termasuk kafein, yang meningkatkan konsentrasi. Coklat juga memiliki kandungan flavanol tinggi yang memfasilitasi pasokan darah ke otak dan meningkatkan kemampuan kognitif.

Adapun produk turunan kakao sangatlah variatif, misalnya biji basah, biji kering, tepung coklat alami, tepung coklat kemasan, coklat bar, minuman coklat, dll. Pohon industri kakao selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2.3 Pohon Industri Kakao



Gambar 4.2.4 Pengolahan Coklat



Pengembangan produk turunan kakao memberikan nilai tambah yang cukup besar. Berikut disajikan nilai tambah produk turunan kakao berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Rimbun di Pidie Jaya.

Tabel 4.2.9 Nilai Tambah Produk Turunan Kakao

No	Jenis Produk	Harga (Rp/Kg)	Pertambahan Nilai (%)
1	Biji Kakao Basah	14.000	-
2	Biji Kakao Kering	32.000	128,57
3	Tepung Coklat Alami	60.000	87,50
4	Tepung Coklat Kemasan	87.500	45,83
5	Socolatte Bar/Mente	171.000	95,43

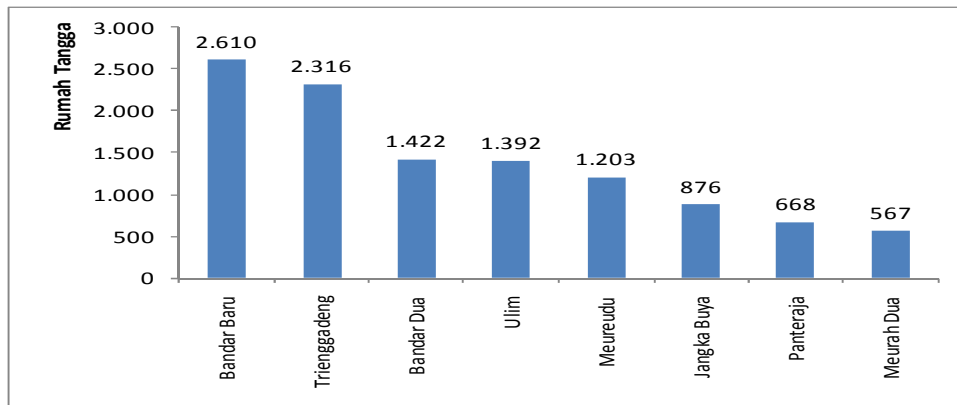
Sumber : Hasil Penelitian, 2014

4.2.4 Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 11.054 rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang mengusahakan

tanaman tahunan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman musiman. Sebanyak 10.886 rumah tangga mengusahakan tanaman tahunan, sementara jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman semusim sebanyak 276 rumah tangga. Rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perkebunan terbanyak di Kabupaten Pidie Jaya di Kecamatan Bandar Baru, yaitu sebanyak 2.610 rumah tangga. Selanjutnya Kecamatan Trienggadeng (2.316 rumah tangga), Bandar Dua (1.422 rumah tangga).

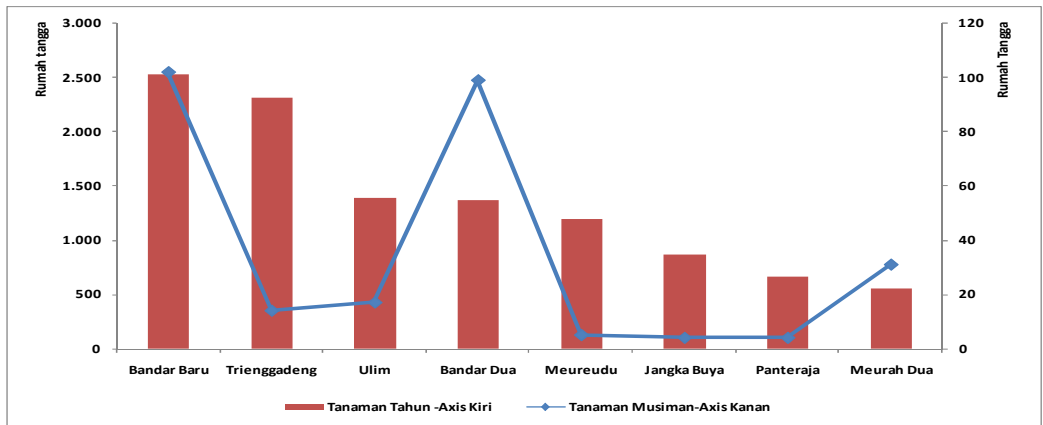
Gambar 4.2.5 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Rumah Tangga yang mengusahakan tanaman tahunan terbanyak di Kecamatan Bandar Baru (2.529 rumah tangga), sementara untuk tanaman semusim paling sedikit juga diusahakan oleh rumah tangga di Bandar Baru (102 rumah tangga).

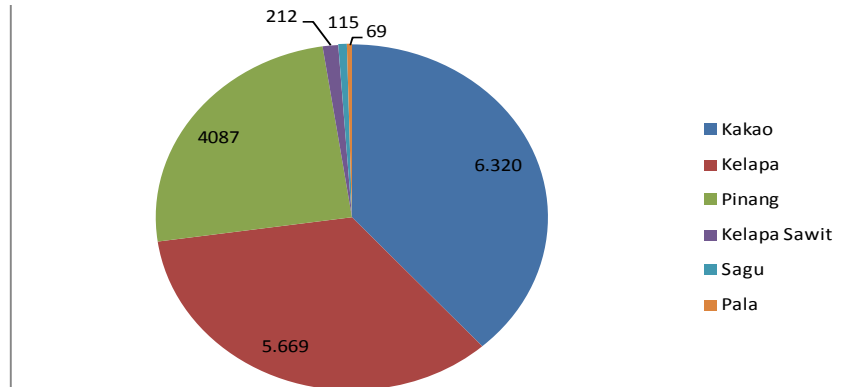
Gambar 4.2.6 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Per Kecamatan, Menurut Tanaman Tahunan dan Musiman, Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Tanaman Kakao merupakan usaha primadona untuk subsektor perkebunan di Pidie Jaya. Secara umum, tanaman tahunan yang paling berkembang berdasarkan banyaknya rumah tangga yang mengusahakan di Kabupaten Pidie Jaya berturut-turut kakao (6.320 rumah tangga), kelapa (5.669 rumah tangga), pinang (4.087 rumah tangga), kelapa sawit (212 rumah tangga), sagu (115 rumah tangga), dan pala (69 rumah tangga).

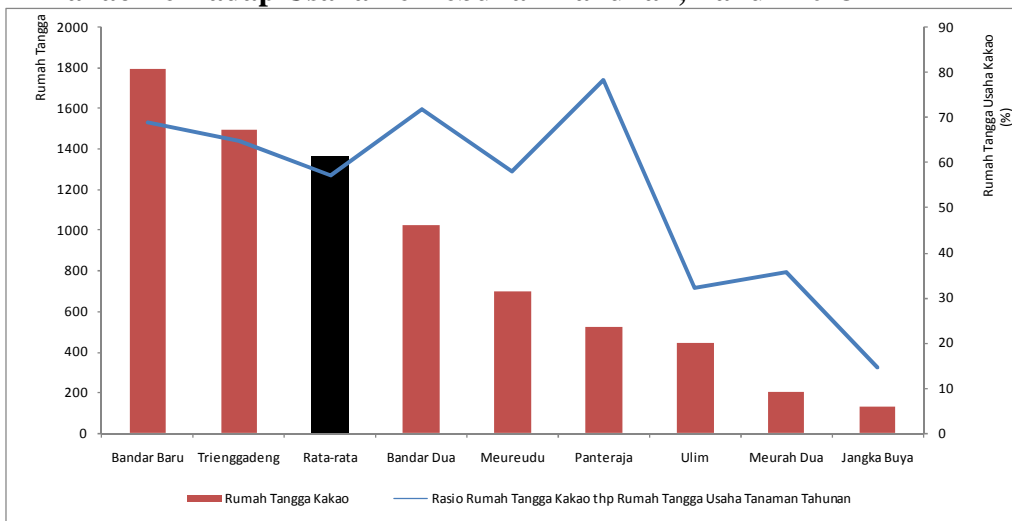
Gambar 4.2.7 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Tahunan, 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Kecamatan dengan rumah tangga paling banyak mengusahakan kakao adalah Bandar Baru (1.798 rumah tangga), diikuti Trienggadeng (1.498 rumah tangga). Rata-rata rumah tangga mengusahakan kakao di Kabupaten Pidie mencapai 1.365 rumah tangga setiap kecamatan. Rasio rumah tangga kakao terhadap rumah tangga perkebunan tahunan yang tertinggi di Kecamatan Pante Raja, yaitu 78,29 persen. Sementara rata-rata diseluruh kecamatan di Pidie Jaya mencapai 57,17 persen. Artinya lebih dari separuh rumah tangga perkebunan tahunan di Pidie Jaya melakukan budidaya tanaman kakao.

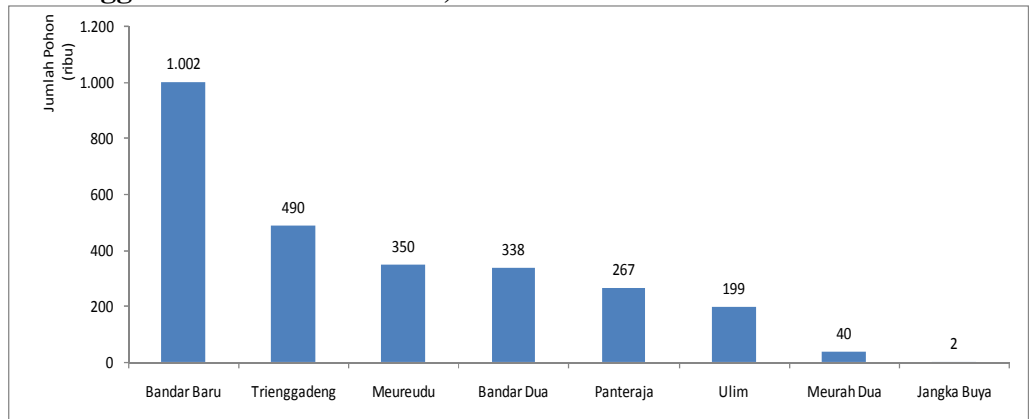
Gambar 4.2.8 Jumlah Rumah Tangga dan Rasio Rumah Tangga Kakao Terhadap Usaha Perkebunan Tahunan, Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, (olah) Tahun 2014

Jika dilihat dari jumlah tanamannya, populasi tanaman terbesar yang diusahakan oleh rumah tangga adalah kakao, yaitu 2,68 juta pohon, terbanyak berada di Bandar Baru dan Trienggadeng.

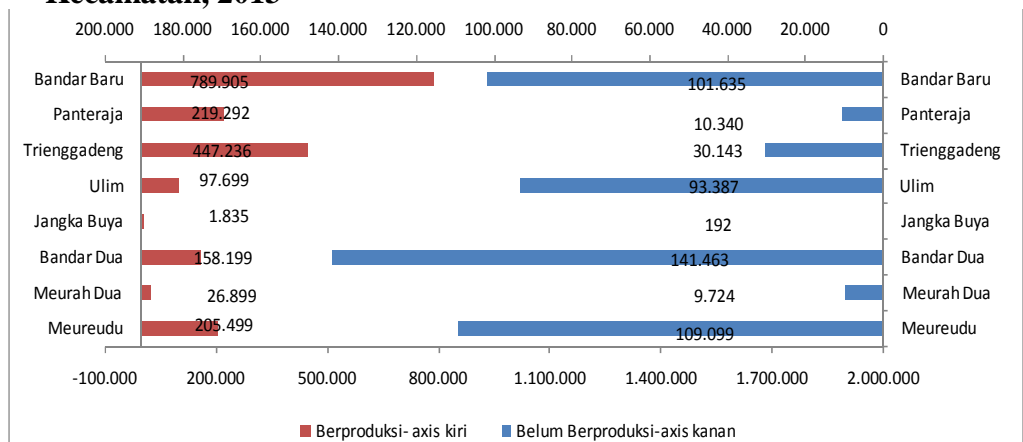
Gambar 4.2.9 Jumlah Pohon Tanaman Kakao yang Dikelola Rumah Tangga Menurut Kecamatan, Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Tanaman perkebunan yang diusahakan sebagian besar sudah berproduksi. Kebanyakan yang sudah berproduksi berada di Kecamatan Bandar Baru dengan jumlah mencapai 789.905 pohon, diikuti Trienggadeng (447.236 pohon), dan Panteraja (205.499 pohon). Jumlah pohon yang paling sedikit berproduksi terdapat di Kecamatan Jangka Buya.

Gambar 4.2.10 Jumlah Pohon Tanaman Kakao Berproduksi dan Belum Berproduksi yang Dikelola Rumah Tangga, Menurut Kecamatan, 2013

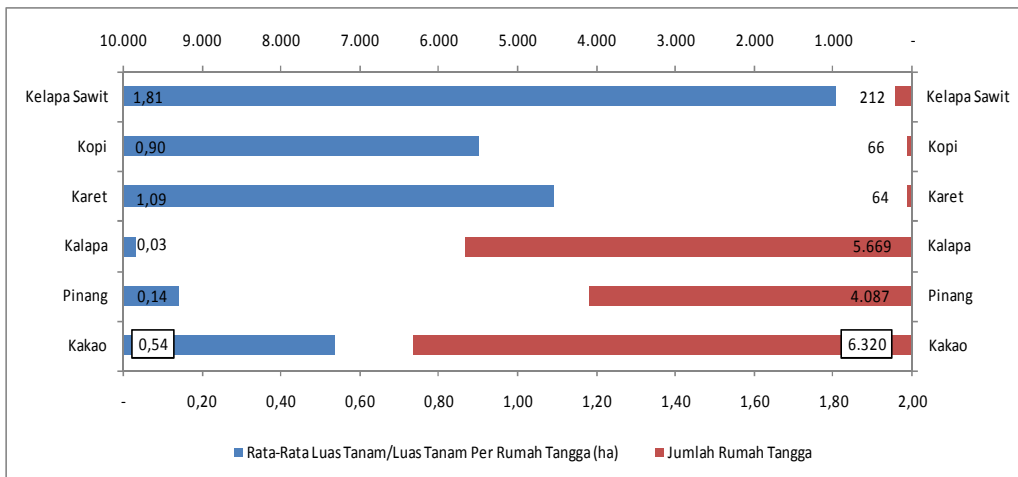


Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Sementara itu, proporsi tanaman kakao yang belum berproduksi sebesar 18,45 persen dari total tanaman yang diusahakan/dikelola. Kecamatan Banda Dua dan Kecamatan Meureudu merupakan daerah dengan potensi berproduksi kakao terbanyak, tercatat masing-masing 141.463 pohon dan 109.099 pohon.

Secara umum luas tanam tanaman Sub sektor Perkebunan di Pidie Jaya masih berada di bawah 2 ha. Luas lahan rata-rata tertinggi yang dikelola oleh masyarakat petani perkebunan tahunan di daerah ini adalah kelapa sawit (1,81 ha), karet (1,09 ha), kopi (0,90 ha) dan kakao (0,54 ha). Namun 3 tanaman yang disebutkan sebelumnya masih dikelola oleh relatif sedikit rumah tangga. Kelapa sawit diusahakan oleh 212 rumah tangga, kopi 66 rumah tangga dan karet hanya 64 rumah tangga. Sementara tanaman Kakao adalah tanaman tahunan yang paling digemari oleh masyarakat di daerah ini. Hal ini terlihat dari hasil survei pertanian tahun 2013 yaitu mencapai 6.320 rumah tangga yang melakukan usaha tanaman ini.

Gambar 4.2.11 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan dan Luas Tanaman Menurut Jenis Tanaman Tahunan di Pidie Jaya, Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2014

Produktivitas tenaga kerja Pidie Jaya dapat diukur dengan menggunakan PDRB/kapita sebagai parameter. PDRB ADHB/kapita dan PDRB ADHK/kapita Sektor Pertanian masing-masing sebesar Rp 35,25 juta dan Rp 32,04 juta. Jika menggunakan PDRB ADHB/kapita, yang tertinggi adalah Sektor Keuangan (Rp 33,51 juta) dan Sektor Transportasi. (Rp 49,4 juta). Sementara untuk PDRB ADHK/kapita yang tertinggi adalah Sektor Jasa, mencapai Rp 92,65 juta. Untuk Subsektor Perkebunan, PDRB ADHB/kapita sebesar 19,74 juta dan PDRB ADHK/kapita sebesar Rp 5,79 juta.

Tabel 4.2.10 Produktivitas Tenaga Kerja Pidie Jaya (PDRB/Kapita) Tahun 2012

Sumber: BPS Aceh 2012 (data diolah)

Sementara itu, terkait dengan produktivitas petani kakao, pada tahun 2012 setiap petani kakao Pidie Jaya rata-rata menghasilkan 509 kg/tahun. Hasil perhitungan produktivitas tersebut dapat ditelusuri sbb:

- Rumah tangga kakao adalah 27,94% dari jumlah total rumah tangga pertanian yang total berjumlah 22.623 rumah.
- Jumlah tenaga kerja pertanian adalah 25.438 orang. Dengan asumsi jumlah tenaga kerja kakao 27,94% dari jumlah tenaga kerja pertanian, maka jumlah tenaga kerja kakao adalah 7.107 orang.
- Jumlah produksi kakao tahun 2012 adalah 3.618.900 kg.
- Maka produktivitas petani kakao di Pidie Jaya tahun 2012 adalah $3.618.900/7.107 = 509$ kg/tahun.

Tabel 4.2.11 Produktivitas Petani Kakao Tahun 2012

No	Produktivitas Tenaga Kerja Kakao	Jumlah
1	Rumah Tangga Pertanian	22.623
2	Rumah Tangga Kakao	6.320
3	Persentase Tenaga Kerja Kakao Thp Rumah Tangga Pertanian	27,94%
4	Produksi Kakao (kg)	3.618.900
Produktivitas Tenaga Kerja Petani Kakao (kg)/per tahun		509

Sumber: dari berbagai sumber (diolah)

4.2.4.1 Analisis Finansial Usaha Budidaya Kakao

Berikut disajikan biaya dan pendapatan budidaya kakao untuk luas lahan 0,54 ha di Pidie Jaya. Luas lahan tersebut merupakan luas lahan rata-rata yang dikelola oleh petani kakao di kabupaten ini berdasarkan hasil Sensus Pertanian yang dilakukan BPS di Kabupaten ini tahun 2013.

Tabel 4.2.12 Biaya dan Pendapatan Budidaya Kakao untuk Luas Lahan 0,54 Ha Di Pidie Jaya, Tahun 2014

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (0,54 ha)
A	BIAYA-BIAYA	19,200,000
1	Buka Lahan	5,000,000
2	Biaya Buka Lahan	2,000,000
3	Benih @ 2000 rupiah (540 batang)	1,200,000
4	Buat Lubang Tanam Per Lubang @3000 rupiah (540) lubang	1,500,000
5	Biaya tanam per Lubang @ 1000 rupiah (540) lubang	700,000
6	Biaya Cangkul Meratakan tanah 2 juta rupiah	2,000,000
7	Upah semprot	1,000,000
8	Tanam Cabe 300.000 rupiah (tanaman untuk menunggu panen)	300,000
9	Pupuk (TSP, KCL dan NPK) rata-rata 2 Juta	2,000,000
10	Biaya Perawatan 3 kali per tahun @ 500.000 rupiah	1,500,000
11	Biaya petik waktu panen 5 tk, 5 hr kerja 2 x panen @ 50.000 per panen	2,000,000
B	PENDAPATAN selama masa panen (Jual biji mentah @14.000/kg)	111,864,000
C	BCR	5.826
D	Keuntungan : (B-A)	965,250
	Rata-Rata Pendapatan (asumsi 6 anggota Rumah tangga)	160,875
	GARIS KEMISKINAN BPS 2013	373,497

Sumber : Data Primer, Tahun 2014

Secara umum, terlihat bahwa jika petani melakukan budidaya kakao dengan luas lahan 0,54 ha, dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga sebanyak 6 orang, rata-rata penghasilan rumah tangga mencapai Rp. 160.875 per bulan. Jika ditinjau dari garis kemiskinan Pidie Jaya tahun 2013 (Rp. 373.497), maka petani kakao yang memiliki luas lahan 0,54 ha tergolong miskin.

Berikut hasil analisis biaya dan pendapatan untuk budidaya kakao dengan luas lahan yang memenuhi kelayakan ekonomi, yaitu seluas 2 ha.

Tabel 4.2.13 Biaya dan Pendapatan budidaya Kakao untuk Luas Lahan 2 ha di Pidie Jaya, Tahun 2014

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (2 ha)
A	BIAYA-BIAYA	42,550,000
1	Buka Lahan	10,000,000
2	Biaya Buka Lahan	4,000,000
3	Benih @ 2000 rupiah (2200 batang)	4,800,000
4	Buat Lubang Tanam Per Lubang @3000 rupiah (2200) lubang	6,300,000
5	Biaya tanam per Lubang @ 1000 rupiah (2200) lubang	2,200,000
6	Biaya Cangkul Meratkan tanah 2 juta rupiah	5,000,000
7	Upah semprot	2,000,000
8	Tanam Cabe 300.000 rupiah (tanaman untuk menunggu panen)	1,000,000
9	Pupuk (TSP, KCL dan NPK) rata-rata 3 Juta	3,000,000
10	Biaya Perawatan 3 kali per tahun @ 750.000 rupiah	2,250,000
11	Biaya petik waktu panen 5 tk, hr kerja 2 x panen @ 50.000 per panen	2,000,000
B	PENDAPATAN selama masa panen (Jual biji mentah @14.000/kg)	467,520,000
C	BCR	10.988
D	Keuntungan : (B-A)	4,426,771
	Rata-Rata Pendapatan (asumsi 6 anggota Rumah tangga)	737,795
	GARIS KEMISKINAN BPS 2013	373,497

Sumber : Data Primer, Tahun 2014

Hasil analisis finansial untuk luas lahan 2 ha memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan petani kakao dapat mencapai Rp. 737.795 dengan asumsi jumlah anggota keluarga 6 orang. Jika ditinjau dari garis kemiskinan Pidie Jaya, maka terlihat bahwa petani kakao yang memiliki luas lahan garapan 2 ha berada pada tingkat ekonomi di atas garis kemiskinan.

4.2.4.2 Analisis Finansial Usaha Agroindustri Kakao

Berikut disajikan analisis finansial usaha agroindustri kakao mengacu pada pengeluaran dan pendapatan Koperasi Rimbun yang merupakan satu-satunya usaha yang bergerak pada kegiatan agroindustri kakao di Pidie Jaya. Biaya –biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha agroindustri diantaranya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap meliputi biaya alat dalam hal ini yang dihitung adalah biasa penyusutan, kemudian biaya operasional (listrik dan telekomunikasi). Untuk biaya variabel terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan-bahan dan pemasaran.

Tabel 4.2.14 Biaya Tetap dan Variabel untuk Usaha Agroindustri Berbasis Kakao CV Rimbun, di Pidie Jaya, Tahun 2014

No	Pengeluaran	Jumlah	Satuan	Jumlah
A	Biaya Tetap			
1	Biaya Alat (penyusutan)		1 Paket	10,000,000
2	Biaya Operasional			
	a. Listrik		1 Paket	6,000,000
	b. Telepon		1 paket	500,000
B	Biaya Variabel			
1	Tenaga Kerja @ 700 ribu		16 orang	11,200,000
2	Biaya Bahan-Bahan			
	a. Kakao @ 32 ribu		800 kg	25,600,000
	b. Gula tepung @ 15 ribu		500 kg	7,500,000
	c. Susu Cream @ 95 ribu		150 kg	14,250,000
	d. Kacang		30 kg	600,000
	e. Kemasan		1 paket	6,500,000
3	Biaya Pemasaran		1 Paket	2,500,000
C	Total Biaya (A+B)			84,650,000

Sumber : Data Primer, Tahun 2014

Upah tenaga kerja yang diberikan oleh pihak manajemen Koperasi Rimbun setiap bulan sebesar Rp. 700 ribu per bulan. Jika dilihat dari sisi tingkat kemiskinan, terlihat bahwa tenaga kerja ini (berstatus belum berkeluarga) sudah berada di atas garis kemiskinan. Namun bila di pandang dari sudut pandang Upah Minimum Regional (UMR). Jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja agroindustri di daerah ini masih berada di bawah UMR.

Analisis finansial usaha Koperasi Rimbun dalam menghasilkan sejumlah produk turunan komoditas kakao menunjukkan hasil yang sangat layak untuk dikembangkan. Namun usaha ini membutuhkan modal yang relatif besar, mencapai lebih kurang Rp. 0,8 miliar. Biaya-biaya terbesar untuk usaha agroindustri ini terutama untuk pembelian alat-alat. Keuntungan dari usaha agroindustri bisa mencapai Rp. 13,4 juta perbulan jika usaha dilakukan secara efisien.

Tabel 4.2.15 Pendapatan Usaha Agroindustri Berbasis Kakao di Pidie Jaya, Tahun 2014

No	Produk Turunan Kakao	Harga/ Kg	Produksi perhari (kg/unit)	Jumlah
1	Socolatte 3 in 1	87,500	16	1,400,000
2	socolatte cocoa powder	75,000	15	1,125,000
3	socolatte original	75,000	5	375,000
4	socolatte cream	68,000	10	680,000
5	Permen socolatte aneka rasa	185,000	1	185,000
6	Socolatte Bar Biasa	171,000	3	513,000
7	Socolatte Bar Mente	171,000	2	342,000
8	Aneka Kue Coklat			
	a. Timphan	3,000	100	300,000
	b. Bronis Gulung	70,000	5	350,000
	c. Bronis Coklat	50,000	5	250,000
	d. Podding Coklat	3,000	50	150,000
	e. Nagasari Coklat	2,000	50	100,000
Pendapatan Kotor Perhari				5,770,000
Pendapatan Bersih per bulan*)				13,440,000

*) 20 Hari Kerja

Sumber : Data Primer, Tahun 2014

4.2.5 Pemasaran Produk

- Hasil Panen Kakao yang telah di kupas sebagian besar dijual ke pedagang pengumpul dan dipasarkan dalam bentuk kakao setengah kering (50-60 persen) dengan harga Rp 14000/kg
- Pedagang pengumpul akan menjemur hingga kering 70-80 persen, setelah itu di dipasarkan ke Sumatra Utara, sebagian kecil terserap untuk pasar lokal dengan harga Rp. 32.000/kg.
- Untuk produk turunan seperti socolatte 3 in 1, socolatte cocoa powder, socolatte original, socolatte cream, permen socolatte aneka rasa, socolatte bar biasa, socolatte bar mente, dan aneka kue coklat, disamping dijual di tingkat lokal juga telah menerima pesanan dari Sumatera Utara (skala kecil). Pasar produk di Aceh meliputi wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen dan Lhokseumawe.

4.2.6 Penyuluh,Kelembagaan, Modal, Regulasi

Penyuluh Pertanian yang berstatus PNS di Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 24 orang, dengan rincian bidang sebagai berikut: pertanian 19 orang, kehutanan 2 orang, peternakan 3 orang. Sementara itu, yang berstatus THL berjumlah 99 orang. Secara keseluruhan jumlah penyuluh masih kurang karena ada 222 desa. Idealnya 1 desa memiliki 1 penyuluh. Beberapa tahun ke depan jumlah penyuluh PNS akan semakin berkurang karena beberapa diantara penyuluh akan pensiun. Yang akan pensiun tahun 2015 ada 3 orang dan tahun 2017 ada 6 orang.

Rata-rata pendidikan penyuluh relatif memadai, yaitu S1. Ada 5 orang penyuluh PNS berpendidikan SLTA dan D3. Pendidikan penyuluh-penyuluh ini perlu terus ditingkatkan agar kompetensi penyuluh semakin meningkat.

Menyangkut tingkat kesejahteraan penyuluh, khususnya yang berstatus THL, masih relatif rendah. Diluar honor yang ditanggung pemerintah pusat, THL dibayar oleh pemkab sebesar Rp 800.000/bulan.

Tabel 4.2.16 Pendidikan Penyuluh di Kabupaten Pidie Jaya

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir/ Tahun Lulus	Jabatan Penyuluh Pertanian	Sub Sektor
1	Ir. M. Gade	59	L	S1 Pertanian 1992	Penyuluh Pertanian Madya	Pertanian
2	Ir. Abdul Jalil Nurdin	59	L	S1 Pertanian 1993	Penyuluh Pertanian Muda	Peternakan
3	Ir. Hasballah	57	L	S1 Pertanian 1992	Penyuluh Pertanian Muda	Pertanian
4	Abdul Wahab, SP	52	L	S1 Pertanian 1996	Penyuluh Pertanian Madya	Pertanian
5	Ir. Mukhar Adam	56	L	S1 Pertanian 1991	Penyuluh Pertanian Muda	Pertanian
6	Helmi, SP	53	L	S1 Pertanian 1994	Penyuluh Pertanian Muda	Peternakan
7	Abdullah, SP	55	L	S1 Pertanian 1994	Penyuluh Pertanian Muda	Pertanian
8	Darmiati, SP	54	P	S1 Pertanian 1996	Penyuluh Pertanian Muda	Pertanian
9	Arifin, SP	47	L	S1 Pertanian 1996	Penyuluh Pertanian Madya	Pertanian
10	Zakaria	52	L	D3 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Pertanian
11	Anwar, SP	48	L	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Muda	Pertanian
12	Syahriadi, SP	49	L	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Muda	Pertanian
13	Mansur, S. Pi	53	L	SLTA	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Pertanian
14	Nasruddin, S.ST	40	L	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pertama	Pertanian
15	Fauzi, A.Md	51	L	D3 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Pertanian
16	T. Salamuddin	55	L	D3 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Pertanian
17	Maizatul Akmal, SP	35	L	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pertama	Pertanian
18	Nasrita, S.Pt	34	P	S1 Peternakan	Penyuluh Pertanian Pertama	Peternakan
19	Faridah Hanum, SP	32	P	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pertama	Pertanian
20	Idawati, SP	31	P	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pertama	Pertanian
21	Ira Handayani, SP	31	P	S1 Pertanian	Penyuluh Pertanian Pertama	Pertanian
22	Munandar, S. HUT	37	L	S1 Kehutanan	Penyuluh Pertanian Pertama	Kehutanan
23	Mardiana, S. HUT	38	P	S1 Kehutanan	Penyuluh Pertanian Pertama	Kehutanan
24	Muhammad Kasim	46	L	SMT Pertanian	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Pertanian

Sumber: BPKP Pidie Jaya

Penyuluh yang sudah mengikuti pelatihan kakao hanya 6 orang. Penyuluh ini tersebar di Kecamatan Bandar Baru sebanyak 3 penyuluh. Untuk Kecamatan Meureudu, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua masing-masing satu orang.

Menyangkut kelembagaan petani, pada tahun 2011 telah didirikan *District Cocoa Clinic* (DCC) di Pidie Jaya. Lembaga ini masih menghadapi kendala finansial dan teknis dalam mengadakan pelatihan, pembibitan dan pemupukan kompos, pemasaran bersama, dan membuat kebun clone.

Modal merupakan masalah klasik yang selalu muncul pada setiap usaha tani. Kemampuan petani dalam mengakses sumber pendanaan serta kemampuan membangun komunikasi dan kecakapan dalam manajemen keuangan menjadi masalah bagi petani di kabupaten ini.

Sebenarnya para pelaku budidaya kakao skala kecil di Pidie Jaya, yang rata-rata mengelola lahan 0,54 ha per rumah tangga, memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dengan keberadaan PP No.11/2010. PP tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantarini memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya. Tapi sayangnya PP ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Adalah tugas pimpinan daerah dan instansi-instansi terkait untuk merealisasikan PP ini dengan menjalin kerjasama dan koordinasi yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Kegiatan budidaya kakao di Pidie Jaya juga mengalami kendala terkait dengan infrastruktur jalan. Jalan menuju sentra produksi kakao sebagian besar dalam kondisi rusak dan/atau perkerasannya masih jenis tanah/kerikil (diantaranya Jl Cot Keurendong sampai Kubu Birah Desa Rusip, Blang Thoe Desa Dayah Keumala sampai Alue Meluwek Desa Rusip, dan Jl Alue Bili Desa Mesjid Pudek Baroh).

4.2.7 Sistem Resi Gudang Kakao

Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas kakao di Kabupaten Pidie Jaya sudah berlangsung beberapa tahun. Gudang mulai dibangun sejak

tahun 2009 dan selesai tahun 2010. Lokasi resi gudang di Kecamatan Trienggadeng. Tahun 2012 pihak pengelola resi gudang di bawah Disperindagkop menjalin kerjasama dengan PT Pertani Pidie Jaya di Kecamatan Meurah Dua. Namun hingga saat ini belum ada produk yang disimpan di gudang tersebut. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Disperindagkop menyebutkan bahwa pada intinya resi gudang ini sudah layak digunakan dengan fasilitas yang relatif memadai. Beberapa kendala dihadapi pengelola resi gudang ini. Pertama, untuk dapat disimpan hasil panen di gudang ini harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, misalnya menyangkut dengan tingkat kekeringan produk yang masih sulit dipenuhi para petani. Kedua, luas lahan yang dikelola kecil yang berdampak pada rendahnya produksi hasil pertanian. Selanjutnya, kebiasaan petani yang langsung menjual hasil panennya karena alasan kesulitan ekonomi juga merupakan kendala utama.

4.2.8 Isu-isu Strategis Pengembangan AgroindustriKakao di Kabupaten Pidie Jaya

A. Subsistem Hulu

1. Rendahnya luas lahan perkebunan kakao yang dikelola oleh rumah tangga petani kakao di Pidie Jaya yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Hingga saat ini luas lahan yang dikelola rata-rata 0,54 ha. Sementara kelayakan luas lahan yang ideal minimal 2 ha.
2. Masih kurangnya bibit unggul. Saat ini bibit yang relatif kuat menghadapi penyakit adalah S1 dan S2 dari Sulawesi Selatan. Sementara M01, meskipun memiliki kualitas cukup baik, tetapi cenderung rentan terhadap penyakit.

B. Subsistem Budidaya

1. Tingginya hama penyakit terutama jamur pengerek buah kakao dan busuk buah yang disebabkan oleh jamur.
2. Masih banyak kebun yang tidak mendapatkan perawatan yang optimal dari pemiliknya.

C. Subsistem Hilir

1. Pemasaran hasil produksi kakao masih terkendala, terutama untuk ekspor. Hal ini lebih disebabkan oleh masih rendahnya kualitas, kuantitas dan keberlanjutan dari produk sebagaimana dinyatakan dalam kontrak dagang.
2. Rendahnya produksi kakao yaitu sebesar 500 – 700 kg per tahun per ha. Sementara potensinya sampai 1,2 ton.
3. Harga di tingkat petani masih rendah (Rp 14.000/kg), kondisi 7 jam di jemur. Sementara harga yang sudah kering mencapai Rp. 32.000/kg.
4. Tata niaga (rantai pemasaran) kakao didominasi oleh pedagang pengumpul.
5. Jumlah industri pengolahan coklat masih minim (hanya ada Koperasi Rimbun yang dikelola oleh Pak Irwan Abdullah)
6. Industri pengolahan kakao yang ada (Koperasi Rimbun) masih mengalami beberapa kendala menyangkut kapasitas produksi yang masih rendah, pemasaran yang belum stabil, persaingan dengan produk yang sudah lama beredar di pasar, dan promosi.
7. Pemasaran hasil olahan produk kakao Koperasi Rimbun masih bersifat lokal (Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Lhokseumawe). Untuk pemasaran ke daerah lainnya, termasuk Medan, hanya dilakukan berdasarkan pemesanan dalam skala relatif kecil.

D. Subsistem Penunjang

1. Jumlah penyuluh masih kurang. Penyuluh PNS 24 orang (bidang pertanian 19 orang, kehutanan 2 orang, dan peternakan 3 orang), sementara penyuluh THL 99 orang.
2. Penyuluh yang akan pensiun tahun 2015 ada 3 orang dan tahun 2017 ada 6 orang.
3. Honor THL dari pemkab (selama 2 bulan) terbatas, yaitu Rp 800 ribu/bulan.
4. Penyuluh yang sudah pernah mengikuti diklat kakao hanya 6 orang.

5. Jumlah penyuluh PNS yang berpendidikan SLTA dan D3 5 orang.
6. Lemahnya kelembagaan, petani masih bekerja secara individu sehingga berdampak dalam pemenuhan kebutuhan pasar dari sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, disamping kurangnya *bargaining power*.
7. DCC (*District Cocoa Clinic*) lembaga petani yang dibentuk tahun 2011, masih mengalami kendala dalam mengadakan pelatihan, pembibitan, pemupukan, pemasaran, pembuatan kebun clone, dll.
8. PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya belum berjalan seperti yang diharapkan.
9. Modal finansial petani kakao relatif sangat rendah karena sulitnya akses ke sumber permodalan.
10. Jalan menuju sentra produksi kakao sebagian besar dalam kondisi rusak dan/atau perkerasannya masih jenis tanah/kerikil (diantaranya Jl Cot Keurendong sampai Kubu Birah Desa Rusip, Blang Thoe Desa Dayah Keumala sampai Alue Meluwek Desa Rusip, dan Jl Alue Bili Desa Mesjid Pudek Baroh).

4.3 Bandeng (Aceh Timur)

4.3.1 Gambaran Umum Komoditas

Produksi perikanan Aceh selama periode tahun 2005 – 2011 terus mengalami peningkatan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar, tenggiri dan layin, disamping itu juga terdapat ikan-ikan ekonomis lainnya seperti ikan kerapu, kakap, bawal putih, bawal hitam dan lobster. Produksi perikanan budidaya air payau didominasi oleh kelompok udang, kepiting dan bandeng, sedangkan budidaya laut didominasi oleh ikan kerapu, bawal dan kakap. Sementara budidaya air tawar didominasi oleh ikan nila, mujair, mas, lele dan udang galah.

Tabel 4.3.1 Produksi Perikanan Tahun 2005 – 2011

KATEGORI	TAHUN						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Perikanan Tangkap	82.481,7	126.383,8	130.369,3	131.460,1	141.619,6	143.909,6	145.970,1
- Laut	81.162,7	124.964,1	129.730,9	130.271,4	140.408,1	142.697,4	143.680,2
- Perairan Umum	1.319,0	1.419,7	638,4	1.188,7	1.211,5	1.212,2	2.289,9
Perikanan Budidaya	26.847,0	32.265,0	35.665,6	37.636,1	38.212,3	44.604,1	37.273,5
- Budidaya Tambak	14.848,5	19.596,0	26.450,2	25.748,8	25.771,2	30.936,7	26.286,4
- Budidaya Kolam	8.727,9	9.016,3	6.305,2	9.643,1	9.897,5	11.909,3	9.224,4
- Budidaya Karamba	347,5	29,2	4,1	128,2	124,1	116,6	265,6
- Budidaya Sawah	2.923,1	3.263,3	2.426,5	1.827,2	2.058,1	1.019,4	1.089,9
- Budidaya Jaring Apung	-	360,2	479,6	288,8	320,9	581,5	239,2
- Budidaya Laut	-	-	-	-	40,5	40,6	168,0
Total	109.328,7	158.648,8	166.034,9	169.096,2	179.831,9	188.513,7	183.243,6

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011

Luas usaha budidaya perikanan di Aceh pada tahun 2007 seluas 46.406 ha, meningkat menjadi 55.099 ha pada tahun 2011. Klasifikasi luas usaha budidaya perikanan untuk masing-masing jenis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.2 Luas Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2007 – 2011

No.	Klasifikasi	Luas Areal (Ha)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Budidaya Tambak	40.354,5	47.140,4	50.254,5	51.522,1	49.271,1
2.	Budidaya Kolam	3.444,5	3.675,3	3.587,0	3.780,0	3.495,2
3.	Budidaya Sawah	2.606,9	2.606,9	2.606,9	2.606,9	2.312,6
4.	Budidaya Keramba	0,2	0,2	0,8	0,5	20,0
TOTAL		46.406	53.423	56.449	57.910	55.099
Pertumbuhan (%)			15,12	5,66	2,59	-4,85

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011

Ikan bandeng (*Chanoschanos*) adalah ikan pangan yang sangat populer. Ikan muda disebut nener, dikumpulkan orang dari sungai-sungai dan dibesarkan di tambak-tambak. Ikan ini biasanya diberi makanan

apasaja dan tumbuh dengan cepat. Setelah cukup besar (sekitar 25-30 cm), bandeng dijual segera atau beku. Bandeng diolah dengan cara digoreng, dibakar, dikukus, dipindang, atau diasap. Sedangkan bandeng laut atau bandeng jantan biasanya diolah untuk industri kerupuk, ataubakso.

Data menunjukkan tambak terluas di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Timur, dengan lahan seluas 17.943 ha. Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat berikutnya dengan luas lahan 12.174 ha. Sedangkan luas lahan tambak terkecil berada di Simeulue dan Aceh Barat dengan luas masing-masing 2 ha dan 3 ha.

Tabel 4.3.3 Luas Lahan Tambak di Kabupaten/Kota di Aceh

Kabupaten/Kota Regency/City	Tambak Brackish Waterpond	Kolam Fresh Waterpon	Sawah Paddy Field	Jaring Apung Floating Net	Keramba Cage Culture	Laut Marine Culture
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Simeulue	2	20	-	-	-	0,6
2. Aceh Singkil	0	26	-	0,2	0,5	0,0
3. Aceh Selatan	16	67	-	-	0,2	0,0
4. Aceh Tenggara	-	738	2 070	-	0,1	-
5. Aceh Timur	17 943	7	-	-	-	0,2
6. Aceh Tengah	-	70	-	3,3	0,2	-
7. Aceh Barat	3	191	-	-	-	-
8. Aceh Besar	538	76	-	-	-	-
9. Pidie	3 074	32	-	-	-	-
10. Bireuen	4 946	44	-	-	-	-
11. Aceh Utara	12 174	249	15	-	-	-
12. Aceh Barat Daya	24	143	-	-	-	-
13. Gayo Lues	-	395	149	-	-	-
14. Aceh Tamiang	4 944	775	-	-	-	-
15. Nagan Raya	38	407	-	0,1	-	-
16. Aceh Jaya	295	87	-	-	-	-
17. Bener Meriah	-	145	47	-	-	-
18. Pidie Jaya	2 076	-	-	-	-	-
19. Banda Aceh	648	2	-	1,0	-	-
20. Sabang	29	3	-	-	-	0,2
21. Langsa	2 853	-	-	-	-	-
22. Lhokseumawe	940	6	-	-	-	0,0
23. Subulussalam	-	17	-	-	-	-
Jumlah/Total	50 543	3 500	2 281	4,6	0,9	1,4

Sumber: Aceh Dalam Angka 2013

Adapun untuk hasil produksi tangkapan ikan menurut pola panen, didapati mekanisme tangkapan tambak di Kabupaten Aceh Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah produksi sebesar 7.555 ton, pada peringkat kedua Kabupaten Bireuen dengan jumlah produksi sebesar 6.316 ton. Adapun Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil memiliki jumlah panen yang terendah dengan jumlah produksi masing-masing 0,4 ton dan 0,8 ton.

Tabel 4.3.4 Jumlah Produksi Perikanan di Kab./Kota di Aceh (Ton)

Kabupaten/Kota Regency/City	Tambak Brackish Waterpond	Kolam Fresh Waterpond	Sawah Paddy Field	Jaring Apung Floating Net	Keramba Cage Culture	Laut Marine Culture	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Simeulue	-	19,3	-	-	-	9,4	
2. Aceh Singkil	0,8	26,2	-	10,0	2,4	6,2	
3. Aceh Selatan	0,4	236,4	-	-	1,3	0,1	
4. Aceh Tenggara	-	5 335,6	1 003,3	-	184,8	-	
5. Aceh Timur	7 555,9	81,0	-	-	-	24,3	
6. Aceh Tengah	-	156,0	-	167,2	64,2	-	
7. Aceh Barat	-	75,6	-	-	-	-	
8. Aceh Besar	256,3	41,1	-	-	-	-	
9. Pidie	2 141,7	309,9	-	-	-	-	
10. Bireuen	6 316,3	130,4	-	-	-	-	
11. Aceh Utara	2 674,1	2 702,9	13,3	-	-	-	
12. Aceh Barat Daya	13,9	15,5	-	-	-	-	
13. Gayo Lues	-	571,9	60,3	-	-	-	
14. Aceh Tamiang	980,1	221,0	-	-	-	-	
15. Nagan Raya	28,5	98,5	-	47,1	-	-	
16. Aceh Jaya	80,9	98,2	-	-	-	-	
17. Bener Meriah	-	146,2	4,7	-	-	-	
18. Pidie Jaya	235,0	-	-	-	-	-	
19. Banda Aceh	61,7	108,7	-	-	-	-	
20. Sabang	-	7,7	-	-	-	-	
21. Langsa	1 633,4	-	-	-	-	-	
22. Lhokseumawe	1 639,7	519,0	-	-	-	-	
23. Subulussalam	-	85,8	-	-	-	-	
Jumlah	2012	27 619,8	10 986,2	1 081,6	224,3	252,8	50,4
Jumlah	2011	23 314,0	14 637,0	1 089,3	239,2	265,7	168,0
Total	2010	31 075,1	14 093,1	792,2	555,3	142,6	32,2
Total	2009	25 693,5	9 838,6	2 058,1	124,1	321,0	40,9

Sumber: Aceh Dalam Angka 2013

Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur, jumlah rumah tangga yang bekerja pada budidaya ikan bandeng menempati peringkat pertama dibandingkan dengan kegiatan usaha tambak dan ikan tangkap lainnya. Jumlah rumah tangga yang bergerak dibidang budidaya bandeng mencapai 2.759 keluarga. Usaha udang windu menempati peringkat kedua dengan jumlah rumah tangga 225 keluarga, sedangkan peringkat ketigayaitu budidaya ikan kerapu dengan jumlah 62 keluarga. Rumah tangga yang menekuni budidaya kepiting sebanyak 29 rumah tangga.

Untuk budidaya kepiting, para petani pernah mendapatkan bantuan dari Jepang dengan produk kepiting Asoka. Kegiatan ini berlangsung setelah tsunami, namun dikarenakan beberapa kendala program, kerjasama tersebut tidak berkelanjutan.

Saat ini, semangat besar juga ditunjukkan oleh petani kerapu untuk mengembangkan komoditas ikan tersebut. Para petani kerapu sudah menyadari akan prospek usaha pertanian kerapu karena permintaan pasar yang tinggi, baik dalam daerah maupun luar daerah. Selain itu juga disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat terhadap ikan payau secara umum pada restoran atau café-café.

Tabel 4.3.5 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Tangkapan

Air Laut		Air Payau		Air Tawar		Ikan Hias	
Jenis Ikan Utama	Jumlah Rumah Tangga	Jenis Ikan Utama	Jumlah Rumah Tangga	Jenis Ikan Utama	Jumlah Rumah Tangga	Jenis Ikan Utama	Jumlah Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepiting	2	Bandeng	2 759	Lele	91	Koi	1
Kerapu Balong	1	Udang Windu	225	Mujair	74	Mas Koki	1
Kerapu Karang	1	Kerapu Lumpur	62	Bandeng Air Tawar	66		
Udang Windu Jumbo	1	Kepiting	29	Nila	26		
		Kerapu Sunu	29	Bawal Air Tawar	10		
		Kerapu Balong	28	Belut	7		
		Mujair	13	Gurami	6		
		Udang Putih	8	Mas	6		
		Nila	7	Gabus	4		
		Kerapu Karang	5	Patin	2		

Sumber: BPS Aceh Timur 2013

Jumlah produksi bandeng di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2011 tercatat sebanyak 4.647 ton atau secara nominal setara dengan sekitar Rp. 101.042.917.500. Pengembangan budidaya ikan jenis ini terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2012, jumlah produksi Bandeng meningkat sangat pesat hingga menembus angka 8.325 ton (Rp. 180.458.000.000) dan terusbergerak di tahun 2013 dengan jumlah produksi sebanyak 10.310 ton (Rp. 229.539.000.000).

Namun demikian, produktivitas yang ideal masih belum dapat dicapai. Hal ini terlihat dari jumlah produksi jika dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia. Pada tahun 2011, produktivitas budidaya ikan bandeng di kabupaten ini hanya sebesar 29%, di tahun 2012 meningkat menjadi 50%, dan terus meningkat menjadi 65% di tahun 2013.

Tabel 4.3.6Produksi dan Produktivitas Bandeng 2011-2013

Tahun	LuasLahan (ha)	Produksi (ton)	Produksi (Rp)	Produktivitas produksi (ton/ha)	Jumlahpetani/ peternak/ petambak	Produktivitaspetani (jmlhproduksi (Rp) /jmlhpetani)
2011	15,942	4,647	101,042,917	0.29	5,850	17,272,293
2012	15,942	8,325	180,458,000	0.52	5,850	30,847,521
2013	15,942	10,310	229,539,000	0.65	5,850	39,237,435

Sumber: DKP Kabupaten Aceh Timur, 2014

Tingkat produktivitas yang dipaparkan di atas, tentunya tidak terlepas dari keterlibatan para petani yang dalam menggeluti usaha budidaya bandeng ini.

Dari analisis data, diketahui bahwa pada tahun 2012 pendapatan rata-rata petani bandeng di Aceh Timur, dengan perhitungan jumlah produksi total bandeng per jumlah petani, pertahunnya adalah sebesar Rp.17,2 juta. Pendapatan tersebut meningkat di tahun 2012 menjadi Rp 30,8 juta dan di tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp.39,2 juta.

4.3.2 Budidaya

Rata-rata petani bandeng di Kabupaten Aceh Timur memiliki lahan 150x 150 m² (22.500 m² atau sekitar 2 ha). Rata-rata dalam satu hektar tambak akan menghasilkan 500 kg ikan bandeng. Jika seorang petani menggarap 2 hektar tambak, maka akan menghasilkan ikan bandeng sekitar 1 ton. Untuk menjalankan budidaya bandeng secara tradisional sehingga dapat mencapai nilai optimum produksi bandeng, maka setidaknya petani tambak perlu menggarap minimal 3 hektar tambak agar memenuhi kelayakan ekonomi.

Dengan lahan tambak yang digarap rata-rata di bawah kelayakan ekonomi tersebut (2 ha), membuat pendapatan petani tidaklah memadai untuk kelangsungan hidup dan pengembangan usaha. Terlebih lagi, kenyataan di Aceh Timur menunjukkan bahwa banyak lahan tambak dimiliki oleh para toke. Tentunya hal ini menyebabkan pendapatan petani bandeng semakin tergerus lagi akibat ketergantungan finansial, pengelolaan tambak dan pemasaran petani terhadap toke.

Penerapan teknologi mempengaruhi masa panen dalam pengelolaan tambak. Selama ini budidaya tambak bandeng masih dilaksanakan secara tradisional, belum ada teknologi yang berarti yang digunakan dalam budidaya tambak bandeng, sehingga dalam satu tahun para petani tambak hanya mendapatkan dua kali masa panen, dengan masa kerja selama empat bulan untuk sekali panen.

Selama ini para petani tambak di Kabupaten Aceh Timur umumnya mengelola tambak seluas 1 hektar. Adapun status kepemilikan lahan sangat bervariasi, ada yang memiliki lahan sendiri, lahan sewa dan lahan garapan.

4.3.3 Agroindustri Bandeng

Sampai saat ini, agroindustri bandeng di Aceh Timur belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bandeng di kabupaten ini umumnya masih diperjual belikan dalam bentuk bahan mentah, tidak banyak diolah menjadi berbagai produk turunan.

Sebenarnya, ada beberapa jenis produk turunan yang dapat dikembangkan dari komoditas bandeng, diantaranya kerupuk bandeng, bakso bandeng dan bandeng pincet. Kesemua usaha tersebut dapat diperkenalkan melalui pelatihan. Selama ini, P2MKP Aceh Timur yang diketuai oleh Ibu Safwani telah merintis upaya-upaya pengenalan produk turunan bandeng ini. Adapun lokasi yang potensial untuk pengembangan agroindustri ini diantaranya di Desa Kuala Bugak, Kecamatan Peureulak, karena ketersediaan bahan baku yang cukup besar di daerah ini.

Permasalahan utama yang dihadapi agroindustri bandeng adalah permintaan masyarakat terhadap komoditas industri turunan bandeng masih minim. Hal ini dapat dikarenakan oleh kurangnya promosi, kemasan produk yang pernah dikembangkan kurang menarik, dan terbatasnya dana awal untuk melakukan usaha tersebut.

Nilai Tambah Produk Turunan

Nilai tambah produk turunan bandeng yang diuraikan pada tabel berikut ini merupakan hasil wawancara dengan responden yang selama ini melakukan kegiatan pelatihan mengenai usaha bandeng di Aceh Timur:

Tabel 4.3.7 Nilai Tambah Produk Turunan

No	Jenis Produk	Harga (Rp/Kg)	Pertambahan Nilai (%)
1	Bandeng Presto	Rp 15.000	Rp 30.000 (200%)
2	Bandeng Bakso	Rp 15.000	Rp 40.000 (280%)
3	Bandeng Pincet	Rp 15.000	Rp 30.000 (200%)

Sumber: Hasil wawancara

Nilai tambah yang dihasilkan dari produksi bandeng presto sebesar 200% tidak termasuk bahan peralatan kerja seperti kompor, tabung gas, dan wajan presto. Namun jika dimasukkan kesemua biaya tersebut, untuk layak produksi bandeng presto sebanyak 60 kg ikan bandeng, dengan pendapatan bersih sebesar Rp. 1.275.000, setelah dipotong total biaya.

Demikian juga halnya dengan bakso bandeng, produk tutunan dari bandeng ini mampu memberikan nilai tambah sebesar 280%. Bakso Bandeng ini dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dengan teknologi *packing*, dapat bertahan sampai 3 bulan sehingga dapat dipasarkan ke daerah lain. Dengan memproduksi bahan baku bandeng sebanyak 60 kg dan ditambah dengan bahan-bahan lain maka akan menghasilkan sebanyak 90 kg bakso dengan harga jual Rp. 40.000/kg. Jadi keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp.1.845.000. Nilai tambah dari bakso ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tambah presto dan bandeng pincet.

Produk turunan bandeng yang lain adalah bandeng pincet, atau dikenal dengan bandeng tanpa duri. Bandeng yang telah dicabut semua durinya ini dapat dijual secara beku, atau diasapkan terlebih dahulu. Nilai tambah produk ini sebesar 200%. Sama halnya seperti bakso, bandeng tanpa duri ini dapat disimpan lebih dari satu bulan sehingga dapat dipasarkan ke daerah yang lebih jauh. Harga jual bandeng ini menurut hasil wawancara sekitar Rp. 30.000/kg, bahkan dapat mencapai Rp.45.000/kg.

4.3.4 Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Secara keseluruhan, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Aceh Timur sebanyak 29.684, sedangkan jumlah rumah tangga usaha bandeng sebesar 2.759 keluarga atau 27, 22% dari jumlah rumah tangga usaha pertanian (ST 2013 Kabupaten Aceh Timur). Berdasarkan data tersebut, diperkirakan jumlah tenaga kerja dari sektor budidaya bandeng sebanyak 22.348 tenaga kerja.

Untuk menghitung produktivitas tenaga kerja, maka jumlah produksi bandeng dibagi dengan jumlah tenaga kerja usaha bandeng. Jumlah produksi bandeng sebesar 229.539.000 kg dibagi dengan 22.348 orang kerja, maka menghasilkan produktivitas 10.266.526 kg/pekerja petani tambak.

Analisis Finansial Budidaya Bandeng

Berikut disajikan pengeluaran dan pendapatan budidaya bandeng dengan luas tambak 2 ha.

Tabel 4.3.8 Perhitungan Pendapatan Budidaya Bandeng dalam 2 Ha

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Bahan Baku				
	Bibit	3000	nener	Rp 200	Rp 2,400,000
	Urea	4	Zak	Rp 350,000	Rp 1,400,000
	Poska	4	Zak	Rp 150,000	Rp 600,000
	Racun Siput	1	Zak	Rp 600,000	Rp 600,000
					Rp 2,600,000
2	Tenaga kerja				
	Upah panen	3	Orang	Rp 100,000	Rp 300,000
	Upah jaga 10% hasil	1	Orang	Rp 11.000,000	Rp 1.100,000
					Rp 1,400,000
3	Pendapatan Kotor				Rp 11.000,000
4	Keuntungan (TR-TC)				Rp 4,250,000

Sumber: Hasil wawancara

Dari tabel tersebut dapat diketahui pendapatan petani tambak dalam satu kali masa panen untuk luas tambak 2 ha adalah sebesar Rp 6.400.000. Jika dalam satu tahun ada dua kali masa panen, maka pendapatan petani tambak dalam satu tahun sebesar Rp 12.800.000, dengan kata lain petani tambak mempunyai pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.066.000.

Pendapatan tersebut termasuk rendah atau kurang mencukupi, dengan asumsi jika seorang petani tambak mempunyai anggota keluarga sebanyak 5 sampai dengan 6 orang, maka pendapatan perkapita rata-rata anggota keluarga masih berada di bawah garis kemiskinan.

Adapun pendapatan pekerja sebesar Rp1.100.000, dengan asumsi tingkat kesepakatan bagi hasil antara pekerja dengan petani tambak sebesar 10%. Sehingga dalam satu tahun dari satu tambak yang digarap pekerja hanya memperoleh pendapatan sebanyak dua kali masa panen

atau sebesar Rp 2.200.000. Maka pendapatan rata-rata pekerja dalam satu tahun adalah Rp 183.000. Angka tersebut juga masih sangat jauh dibawah garis kemiskinan di Aceh Timur. Jika pekerja sudah berkeluarga dan tidak memiliki pekerjaan lain, maka pekerja dan keluarganya tergolong ke dalam kelompok miskin.

Analisis Finansial Usaha Agroindustri Bandeng

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa usaha agroindustri bandeng masih belum berkembang di Aceh Timur. Bandeng sampai saat ini umumnya masih diperjualbelikan dalam bentuk mentah, tanpa diolah lebih lanjut. Ada beberapa produk turunan bandeng yang potensial dikembangkan di Aceh Timur, seperti bandeng presto, bandeng pincet, dan bakso bandeng.

Industri bandeng presto merupakan jenis industri makanan siap saji, yang dikemas mentah dalam kemasan plastik dengan masa berlaku satu minggu. Bandeng presto merupakan makanan alternatif bagi masyarakat yang mempunyai kesibukan dan ingin mendapatkan cita rasa bandeng tanpa harus disibukkan dengan tulang bandeng yang halus.

Modal kerja yang relatif murah, membuat rumah tangga mana saja dapat melakukan produksi bandeng presto. Usaha ini dapat dijalankan dengan biaya Rp 3.975.000. Hanya saja yang perlu diperhatikan, untuk pemasarannya diperlukan pemetaan dan konsep marketing yang sesuai dengan budaya lokal masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sudah terbiasa mengkonsumsi bandeng segar, oleh sebab itu diperlukan kajian khusus mengenai mekanisme pemasaran bandeng presto secara efektif di Aceh.

Bandeng pincet agak berbeda dengan bandeng presto. Untuk pembuatan bandeng pincet, yang dilakukan adalah setelah tulang-tulang bandeng dicabuti, maka dilakukan proses perebusan dengan bumbu agar ikan lebih terasa. Pada bandeng presto proses yang dilakukan adalah merebus hingga tulang belulangannya hancur, namun pada bandeng pincet mekanisme merebus hanya untuk memberikan rasa pada ikan bandeng yang sudah dicabuti durinya.

Bakso bandeng juga merupakan produk turunan bandeng yang dapat dipertimbangkan. Tingkat konsumsi bakso yang cukup tinggi di masyarakat membuat produk ini lebih menarik untuk dipasarkan. Ditambah lagi tingginya nilai daging sapi di propinsi Aceh sebagai bahan baku bakso konvensional. Hadirnya produk olahan bandeng bakso dapat menjadi substitusi dan alternatif solusi bagi tingginya harga bahan baku bakso daging.

Bandeng Presto

Untuk memenuhikelayakan ekonomi dalam kegiatan produksi bandeng presto diperlukan ikan bandeng 160 kg. Jika rata-rata 1 kg bandeng terdiri dari 3 ikan, maka jumlah ikan bandeng sebanyak 480 ekor. Proses pembuatan bandeng presto kapasitas 20 kg memakan waktu selama 30 menit, jadi waktu yang diperlukan untuk memproduksi 160 kg bandeng tersebut kurang lebih 8 jam. Hasil bandeng presto dapat dijual dengan harga Rp 15.000/unit. Jika dikalikan dengan 3 unit perkilogram, maka penghasilan kotor yang diperoleh sebesar Rp 7.200.000 dalam satu hari.

Tabel 4.3.9 Analisis Finansial Usaha Bandeng Presto

No	Jenis Pengeluaran	volume	satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Bahan Baku				
	Ikan Bandeng	160	kg	Rp15,000	Rp 2,400,000
	Bumbu	8	paket	Rp25,000	Rp 200,000
					Rp 2,600,000
2	Tenaga kerja				
	Tenaga Kerja Harian	5		Rp70,000	Rp 350,000
3	Total Cost (TC)				Rp 2,950,000
4	Keuntungan (TR-TC)				Rp 4,250,000

Sumber: Hasil wawancara

Biaya produksi untuk 480 ekor bandeng sebesar 2.950.000. Jika dalam satu bulan pengusaha bandeng presto memproduksi selama 25 hari

kerja, dikalikan dengan Rp.4.250.000, setelah dipotong biaya produksi, maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp 121.250.000.

Sedangkan pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 70.000 perhari dengan masa kerja selama delapan jam. Jika dikalikan dengan 25 hari kerja maka upah yang diperolehi dalam satu bulan sebesar Rp 1.750.000. Dapat disimpulkan pendapatan pengusaha berada di atas garis kemiskinan. Tetapi untuk pendapatan pekerja, relatif sedikit di bawah garis kemiskinan, dengan asumsi pekerja memiliki 6 orang anggota keluarga.

Bandeng Pincet

Berikut analisis finansial untuk kegiatan usaha bandeng pincet:

Tabel 4.3.10 Analisis Finansial Usaha Bandeng Pincet

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Bahan Baku				
	Ikan Bandeng	160	kg	Rp15,000	Rp 2,400,000
	Bumbu	8	paket	Rp25,000	Rp 200,000
					Rp 2,600,000
2	Tenaga kerja				
	Tenaga Kerja Harian	5		Rp70,000	Rp 350,000
3	Total Cost (TC)				Rp 2,950,000
4	Keuntungan (TR-TC)				Rp 4,250,000

Sumber: Hasil wawancara

4.3.5 Pemasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak bandeng di Aceh Timur, dalam 2 ha tambak akan menghasilkan 1 ton bandeng. Harga jual bandeng tergantung pada ukuran bandeng yang dihasilkan. Terdapat tiga ukuran bandeng yang biasa diproduksi, yaitu bandeng kecil, bandeng sedang dan bandeng besar. Harga untuk setiap katagori ukuran dibedakan dengan kenaikan Rp 1.500. Misalnya bandeng ukuran kecil Rp 13.000/kg, ukuran sedang Rp 14.500/kg, sedangkan bandeng besar Rp 15.500.

Pasar bandeng Aceh Timur merambah sampai ke Sumatera Utara, namun untuk jenis bandeng besar permintaan pasar lebih diutamakan untuk dijual di Aceh, khususnya Banda Aceh dan Meulaboh. Sedangkan untuk bandeng sedang dipasarkan untuk beberapa wilayah seperti Bireuen dan Aceh Utara. Adapun bandeng kecil dipasarkan ke Sumatera Utara.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa toke bangku, bandeng kecil dijual ke Medan sebagai cikal bakal pengolahan bandeng, baik untuk industri presto maupun kerupuk. Penjualan bandeng kecil diarahkan ke Medan disebabkan karena masyarakat Aceh tidak terbiasa mengkonsumsi bandeng dengan ukuran kecil. Yang menjadi konsumsi masyarakat Aceh adalah bandeng dengan ukuran 3 ekor /kg atau ukuran yang lebih besar.

4.3.6 Penyuluh, Modal, Kelembagaan, dan Regulasi

Keberadaan penyuluh sangat penting dalam menunjang produktivitas hasil tambak. Dengan adanya penyuluh, para petani dapat mendapatkan informasi dan mekanisme dalam budidaya tambak secara *up to date*. Jumlah penyuluh di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 246 orang, dengan rincian 119 PNS, 2 honor dan 125 THL. Adapun penyuluh perikanan hanya 20 orang dengan kualifikasi S1 sebanyak 18 orang dan tamatan SMA sebanyak 2 orang.

Jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas daerah Kabupaten Aceh Timur, begitu juga jika dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 514 desa. Sementara itu, jumlah penyuluh bidang perikanan juga masih sangat sedikit. Oleh sebab itu pemerintah daerah semestinya membuka rekrutmen penyuluh, khususnya untuk sektor perikanan, agar dapat meningkatkan produktivitas hasil tambak serta dapat memacu perkembangan dan inovasi komoditas bandeng.

Adapun rincian tenaga penyuluh untuk Kabupaten Aceh Timur sebagaimana berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.11 Jumlah Penyuluh di Kabupaten Aceh Timur

NO	BPP/KEC	JUMLAH DESA	WKPP	JUMLAH PENYULUH	KEAHLIAN				KETERANGAN		
					TANAMAN PANGAN (Org)	PERIKANAN (Org)	PETERNAKAN (Org)	PERKEBUNAN (Org)	PNS (Org)	HONOR (Org)	THL-TB (Org)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KAB. ACEH TIMUR	-	-	28	25	2	1	-	26	-	2
1	BIREM BAYEUN	27	10	11	6	1	2	2	6	-	5
2	RANTO SELAMAT	14	8	11	8	-	2	1	5	-	6
3	SUNGAJ RAYA	13	9	11	6	2	2	1	5	-	6
4	PEUREULAK TIMUR	20	10	12	9	1	1	1	5	-	7
5	PEUREULAK	38	13	15	12	1	1	1	7	-	8
6	PEUREULAK BARAT	15	7	9	6	1	2	-	5	-	4
7	PEUDAWA	17	6	13	10	1	2	-	6	-	7
8	IDI TIMUR	13	3	9	7	-	-	2	4	1	4
9	IDI RAYEK	35	8	11	8	1	1	1	3	-	8
10	DARUL IHSAN	16	7	8	6	-	1	1	3	-	5
11	BANDA ALAM	16	4	7	6	-	1	-	2	-	5
12	IDI TUNONG	25	8	9	6	-	2	1	5	-	4
13	DARUL AMAN	45	13	11	6	2	2	1	2	-	9
14	NURUSSALAM	31	9	11	6	-	2	3	5	-	6
15	DARUL FALAH	11	5	6	5	-	1	-	3	-	3
16	JULOK	37	10	10	8	1	-	1	3	-	7
17	INDRA MAKMU	13	9	8	5	1	1	1	2	-	6
18	SIMPANG ULUM	23	7	8	5	1	2	-	5	1	2
19	PANTE BIDARI	25	6	6	4	1	1	-	2	-	4
20	MADAT	26	5	6	2	3	1	-	4	-	2
21	RANTO PEUREULAK	23	9	8	7	-	1	-	3	-	5
22	PEUNARON	5	8	7	6	1	-	-	3	-	4
23	SERBAJADI	18	7	7	6	-	1	-	3	-	4
24	SIMPANG JERNIH	8	4	4	2	-	-	2	2	-	2
TOTAL		514	185	246	177	20	30	19	119	2	125

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur

Kondisi kesejahteraan penyuluh THL sangat perlu mendapat perhatian. Honor yang diperoleh THL hanya berasal dari pemerintah pusat selama 10 bulan. Sementara itu, untuk sisa 2 bulan kerja, Pemkab tidak memberikan honor.

Selain itu pihak pemerintah juga harus mengalokasikan dana bagi penyuluh untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah, karena selama ini yang menjadi kendala bagi penyuluh adalah terbatasnya anggaran untuk mengikuti berbagai pelatihan.

Menyangkut dengan modal, sumber modal para petani bandeng selama ini berasal dari toke bangku. Praktek yang berlaku, toke bangku akan menyediakan bibit, pakan dan berbagai macam keperluan petanidan pada masa panen semua hasil tambak harus dijual kepada toke bangku.

Kondisi ini hendaknya menjadi tantangan bagi para petani untuk menggalang kekuatan sendiri dengan misalnya membentuk koperasi bandeng. Adanya koperasi dapat memudahkan menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian mereka.

Petani bandeng juga semestinya memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dengan keberadaan PP No.11/2010. PP tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini memungkinkan petani bandeng memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahanya. Tapi sayangnya PP ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Peran pemerintah untuk merealisasikan PP ini di lapangan akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

4.3.7 Isu-isu Strategis Pengembangan Agroindustri Bandeng di Kabupaten Aceh Timur

A. Subsistem Hulu

1. Luas tambak bandeng yang digarap oleh petani rata-rata 2 ha, masih dibawah luas lahan yang layak secara ekonomi, yaitu minimal 3 ha.
2. Lahan tambak banyak yang dimiliki oleh para toke.

B. Subsistem Budidaya

Sebagian petani masih melakukan usaha yang relatif kecil dengan menyewa lahan dengan keuntungan yang terbatas.

C. Subsistem Hilir

1. Penjualan hasil panen banyak ditampung oleh tengkulak yang berfungsi sebagai pengumpul.
2. Agroindustri yang berbasis komoditas bandeng belum berkembang di Aceh Timur. Ikan ini umumnya masih dijual dalam bentuk mentah, baik ke Banda Aceh dan daerah sekitarnya, maupun ke Sumatera Utara.
3. Masyarakat Aceh umumnya dan Aceh Timur khususnya masih, belum terbiasa mengkonsumsi produk bandeng dalam bentuk olahan seperti bandeng presto, bandeng pincet, bakso, dll.

D. Subsistem Penunjang

1. Jumlah penyuluh secara keseluruhan yang sebanyak 246 orang masih kurang dibandingkan dengan jumlah desa yang sebanyak 512.
2. Jumlah penyuluh perikanan masih relatif sedikit, sebanyak 20 orang.
3. Penyuluh perikanan yang berpendidikan S1 18 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA/SMK 2 orang.
4. Diluar honor yang diberikan dari APBN kepada penyuluh THL selama 10 bulan, tidak ada pemberian honor tambahan (selama 2 bulan) dari pemkab.
5. Masih terbatasnya akses petani terhadap modal.
6. Petani masih lemah dalam menghadapi ketergantungan pada tengkulak, baik dalam permodalan maupun penjualan hasil panen.
7. PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya belum berjalan seperti yang diharapkan.

4.4 Jagung (Aceh Tenggara)**4.4.1 Gambaran Umum Komoditas**

Jagung merupakan komoditas pangan andalan Aceh. Pemerintah Aceh berupaya agar Aceh dapat meningkatkan produktivitas komoditas ini bersama dengan komoditas pangan lainnya seperti padi dan kedelai. Berdasarkan data tahun 2011, produktivitas komoditas padi dan jagung mengalami peningkatan, namun produktivitas kedelai tidak mengalami peningkatan. Meskipun demikian, produktivitas padi Aceh (4,66 ton/ha) dan jagung (4,03 ton/ha) masih dibawah rata-rata nasional, dimana untuk produktivitas padi sebesar 4,90 ton/ha dan jagung sebesar 4,20 ton/ha. Sedangkan produktivitas kedelai (1,41 ton/ha) sudah diatas rata-rata nasional (1,30 ton/ha).

Tabel 4.4.1 Perbandingan Produktivitas Komoditas Pangan Aceh dengan Nasional Tahun 2008-2011

NO	KOMODITI	Produktivitas Aceh (Ton/Ha)						
		Aceh				Nasional		
		2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Padi	4,25	4,33	4,49	4,66	4,9	5	4,90
2	Jagung	3,40	3,47	3,81	4,03	4,2	4,4	4,20
3	Kedelai	1,29	1,41	1,42	1,41	1,3	1,3	1,30

Sumber : Bappeda, 2012 (Data Diolah)

Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Di masakini, jagung menjadi komponen penting pakanternak. Penggunaan jagung lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri, seperti bioenergi, industrikimia, kosmetika, danfarmasi.

Dari sisi botani dan agronomi, jagung merupakan tanaman model yang menarik, khususnya di bidang genetika, fisiologi, dan pemupukan. Sejak awal abad ke-20 ia menjadi objek penelitian genetika yang intensif. Secara fisiologi, tanaman ini sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Sebagian jagung juga merupakan tanaman hari pendek yang pembungaannya terjadi jika mendapat penyinaran di bawah panjang penyinaran matahari, biasanya 12,5 jam.

Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai lahan tanam jagung terluas di Aceh. Adapun lahan tanam jagung di Aceh Tenggara seluas 26.602 ha, sedangkan peringkat kedua diduduki oleh Kabupaten Aceh Selatan dengan luas sebesar 12.330 ha. Adapun daerah yang terendah memiliki luas lahan tanam jagung adalah Simelue seluas 1 ha.

Tabel 4.4.2 Luas Tanaman Jagung di Aceh

Kabupaten/Kota Regency/City	Luas Tanam Planted Area (ha)	Luas Puso Damaged Area (ha)	Luas Panen Harvested Area (ha)	Produksi Production (ton)	Produk- tivitas Productivity (ton/ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Simeulue	1	3	9	28	3,06	
2. Aceh Singkil	201	38	136	464	3,41	
3. Aceh Selatan	12 330	228	13 171	49 377	3,75	
4. Aceh Tenggara	26 602	153	22 514	89 301	3,97	
5. Aceh Timur	2 480	22	2 295	8 214	3,58	
6. Aceh Tengah	138	3	118	434	3,68	
7. Aceh Barat	209	-	134	485	3,62	
8. Aceh Besar	452	3	61	216	3,55	
9. Pidie	751	-	186	679	3,65	
10. Bireuen	894	28	491	1 729	3,52	
11. Aceh Utara	1 619	47	387	1 406	3,63	
12. Aceh Barat Daya	33	-	6	22	3,58	
13. Gayo Lues	1 333	45	1 426	5 174	3,63	
14. Aceh Tamiang	2 020	86	1 195	4 464	3,74	
15. Nagan Raya	318	-	172	598	3,48	
16. Aceh Jaya	126	-	121	397	3,28	
17. Bener Meriah	728	46	325	1 193	3,67	
18. Pidie Jaya	239	-	27	93	3,45	
19. Banda Aceh	2	-	-	-	-	
20. Sabang	34	1	-	-	-	
21. Langsa	12	-	2	7	3,32	
22. Lhokseumawe	58	-	-	-	-	
23. Subulussalam	1 208	181	899	3 005	3,34	
Jumlah/Total	2012	51 788	884	43 675	167 285	3,83
	2011	49 429	663	41 853	168 860	4,04

Sumber: Aceh dalam Angka 2013

Diketahui pada tahun 2013 sasaran luas tanaman jagung di Aceh Tenggara adalah seluas 32,360 Ha dengan realisasi tanam seluas 33,678 ha. Sasaran luas panen adalah seluas 30,742 ha dengan realisasi luas panen sebesar 33,370 ha, dan sasaran produksi jagung tahun 2012 sebesar 212.384,67 ton dengan realisasi sebesar 233,074,51 ton.

Tabel 4.4.3 Produksi dan Produktivitas Lahan Tanam Jagung di Aceh Tenggara, 2013

NO	KECAMATAN	LUAS (HA) TANAM	LUAS (HA) PANEN	PROD UKTI VITAS (TON/ HA)	PRODUKSI (TON)
1.	Lawe Alas	3.134	3.095	6,58	20.365,10
2.	Babul Rahmah	3.440	3.398	7,31	24.839,38
3.	Tanoh Alas	2.685	2.655	7,15	18.983,25

4.	Lawesigala-Gala	2.835	2.790	7,12	19.864,80
5.	Babul Makmur	1.807	1.777	7,12	12.652,24
6.	Semadam	1.895	1.966	7,05	13.860,30
7.	Leuser	3.780	3.739	7,02	26.247,78
8.	Bambel	2.195	2.166	7,60	16.461,60
9.	Bukit Tusam	1.790	1.757	7,05	12.386,85
10	Lawesumur	1.382	1.436	6,75	9.692,00
11	Babussalam	718	702	6,71	4.710,42
12	Lawebulan	1.404	1.380	6,55	9.039,00
13	Badar	1.715	1.690	6,56	11.086,40
14	Darulhasanah	1.659	1.632	6,87	11.211,84
15	Ketambe	1.729	1.701	7,15	12.162,15
16	Delengpokhkisen	1.509	1.486	6,40	9.510,40
JUMLAH		33.678	33.370	6,98	233.074,51

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013

Berdasarkan hasil ST2013, diketahui bahwa rumahtangga tanaman pangan di Kabupaten Aceh Tenggara didominasi oleh rumahtangga yang mengelola tanaman padi sawah dan jagung. Jumlah rumahtangga yang mengelola tanaman pangan sebanyak 19,09 ribu. Dari jumlah tersebut 11,43 ribu (59,88 persen) diantaranya mengelola tanaman padi dan 11,92 ribu (62,41 persen) mengelola tanaman palawija:

Tabel 4.4.4Produksi dan Produktivitas Lahan Tanam 2013

No	Kecamatan	Jenis Lahan									
		Lahan Bukan Pertanian		Lahan Sawah		Lahan Pertanian		Lahan yang dikusasi			
		2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Lawe Alas	216,05	132,82	8 103,52	1 376,57	12 821,48	9 199,15	20 925,00	10 575,71	21 141,04	10 708,53
2	Babul Rahmah	161,36	87,25	4 978,60	1 629,51	18 320,30	8 481,36	23 298,90	10 110,87	23 460,26	10 198,12
3	Tanoh Alas	119,49	150,68	5 563,34	1 262,29	12 445,83	9 857,55	18 009,17	11 119,85	18 128,66	11 270,53
4	Lawe Sigaja Gala	271,32	145,35	5 080,34	2 127,13	9 954,25	7 387,16	15 034,58	9 514,29	15 305,90	9 659,64
5	Babul Makmur	168,32	136,52	6 340,87	2 807,39	12 920,31	8 588,61	19 261,18	11 396,00	19 429,50	11 532,52
6	Semadam	144,93	128,62	6 582,80	3 070,10	6 867,17	5 579,00	13 449,97	8 649,10	13 594,89	8 777,71
7	Lauser	47,12	297,66	25,37	22,55	31 237,77	28 842,09	31 263,14	28 864,64	31 310,26	29 162,30
8	Bambel	144,25	110,95	5 084,64	1 647,88	6 318,44	6 134,63	11 403,08	7 782,51	11 547,34	7 893,46
9	Bukit Tusam	195,80	101,50	4 256,43	783,24	8 085,70	7 124,34	12 342,14	7 907,58	12 537,93	8 009,09
10	Lawe Sumur	149,57	124,90	5 808,54	1 858,43	7 177,91	7 322,59	12 986,45	9 181,02	13 136,02	9 305,92
11	Babusalam	712,14	203,69	4 840,22	1 312,30	16 471,67	10 841,67	21 311,89	12 153,96	22 024,02	12 357,65
12	Lawe Bulan	98,40	118,51	6 872,86	2 234,45	6 967,19	6 198,08	13 840,05	8 432,53	13 938,45	8 551,04
13	Badar	328,96	163,48	2 085,25	847,82	15 805,34	11 212,40	17 890,58	12 060,22	18 219,54	12 223,70
14	Darul Hasanah	442,49	106,53	5 627,10	2 236,33	21 897,82	11 565,43	27 524,92	13 801,76	27 967,41	13 908,28
15	Ketambe	167,42	127,36	1 971,03	162,11	19 438,57	14 433,26	21 409,59	14 595,38	21 577,02	14 722,74
16	Deleng Pokhksen	189,59	113,68	7 650,24	2 908,92	10 110,20	6 683,39	17 760,43	9 592,31	17 950,02	9 705,98
Aceh Tenggara		238,97	138,26	5 214,77	1 732,13	12 976,60	9 528,73	18 191,37	11 260,86	18 430,34	11 399,11

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013

Sampai saat ini, potensi pertanian di Aceh Tenggara yang sangat besar ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Ketua Bappeda Aceh Tenggara, infrastruktur merupakan permasalahan besar yang dialami oleh masyarakat Kuta Cane. Waktu tempuh 7 jam ke Medan dan 16 jam ke Banda Aceh membuat komoditas unggulan yang dihasilkan tidak maksimal untuk dipasarkan. Hal ini menjadi penyebab persaingan harga dengan beberapa daerah perbatasan seperti Tanah Karo tidak kompetitif. Oleh sebab itu diperlukan jalur transportasi yang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, sehingga dengan adanya jalur transportasi yang waktu tempuhnya lebih singkat, akan menekan berbagai biaya ekonomi.

Selain itu, agroindustri yang berjalan di Kuta Cane juga tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa wacana yang telah digulirkan, seperti rumah coklat, namun masih belum berfungsi dan hanya sebatas bangunan saja. Gagasan mendirikan pabrik jagung juga sudah pernah diajukan oleh salahseorang kandidat Bupati, namun program tersebut kandas sehubungan dengan tidak terpilihnya kandidat tersebut. Akhirnya, bangunan pabrik jagung berubah fungsi menjadi pabrik padi.

4.4.2 Budaya

Budidaya tanaman jagung di Aceh Tenggara masih dilaksanakan secara tradisional. Jenis lahan yang digarap terdiri lahan kering, lahan sawah irigasi dan lahan tadah hujan. Adapun jenis bibit terdiri dari bibit lokal, bibit hibrida dan bibit komposit. Bibit yang mayoritas digunakan oleh petani adalah bibit hibrida.

Peranan irigasi cukuplah penting dalam meningkatkan hasil produksi jagung. Budidaya jagung pada lahan basah akan memberikan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan dengan budidaya pada lahan kering. Saat ini, sayangnya jaringan irigasi di Kabupaten Aceh Tenggara yang berada dalam kondisi baik, tidak mencapai 50%.

Terdapat beberapa jenis pupuk yang digunakan yang oleh para petani dalam budidaya jagung, diantaranya adalah pupuk NPK, pupuk

POG dan pupuk POC. Kebutuhan terhadap pupuk merupakan hal yang sangat penting dipenuhi untuk mendukung produktivitas hasil panen jagung. Jika dilihat dari struktur tanah di Kabupaten Aceh Tenggara, sangatlah mendukung untuk produktivitas tanaman jagung.

Rata-rata para petani jagung di Kabupaten Aceh Tenggara menggarap lahan jagung seluas 0,9 ha, berdasarkan data BPS ST 2013. Jenis kepemilikan lahan adalah memiliki lahan sendiri atau bertindak sebagai penggarap.

Dalam rangka untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, perlu didukung oleh sarana dan prasarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan obat-obatan. Rencana kebutuhan benih jagung Hibrida dari luas tanam 28.050 ha adalah 561.000 kg, pupuk urea: 8.415 ton, pupuk SP36: 5.610 ton, pupuk KCl: 2.805 ton dan NPK: 4.207,5 ton, sehingga total kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung hibrida: 21.037,50 ton. Untuk lebih jelasnya sasaran penggunaan pupuk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.5 Luas Tanam Jagung dan Kebutuhan Pupuk di Aceh Tenggara

NO	Kecamatan	Luas TANAM (HA)	KEBUTUHAN (TON)				jumlah (TON)
			UREA	SP 36	KCL	NPK	
1	Lawe Alas	2.425	727,50	485,00	242,50	363,75	1.818,75
2	Babul Rahmah	2.600	780,00	520,00	260,00		
3	Tanoh Alas	2.250	675,00	450,00	229,00		
4	Lawesigala-Gala	2.550	765,00	510,00	225,00		
5	Babul Makmur	2.300	690,00	460,00	230,00		
6	Semadam	2.400	720,00	480,00	240,00		
7	Leuser	2.600	780,00	520,00	260,00		
8	Bambel	1.500	450,00	300,00	150,00		
9	Bukit Tusam	1.800	540,00	360,00	180,00		
10	Lawesumur	1.225	367,50	245,00	122,50		
11	Babussalam	500	150,00	100,00	50,00		
12	Lawebulan	1.200	360,00	240,00	120,00		
13	Badar	850	255,00	170,00	85,00		
14	Darulhasanah	1.250	375,00	250,00	125,00		

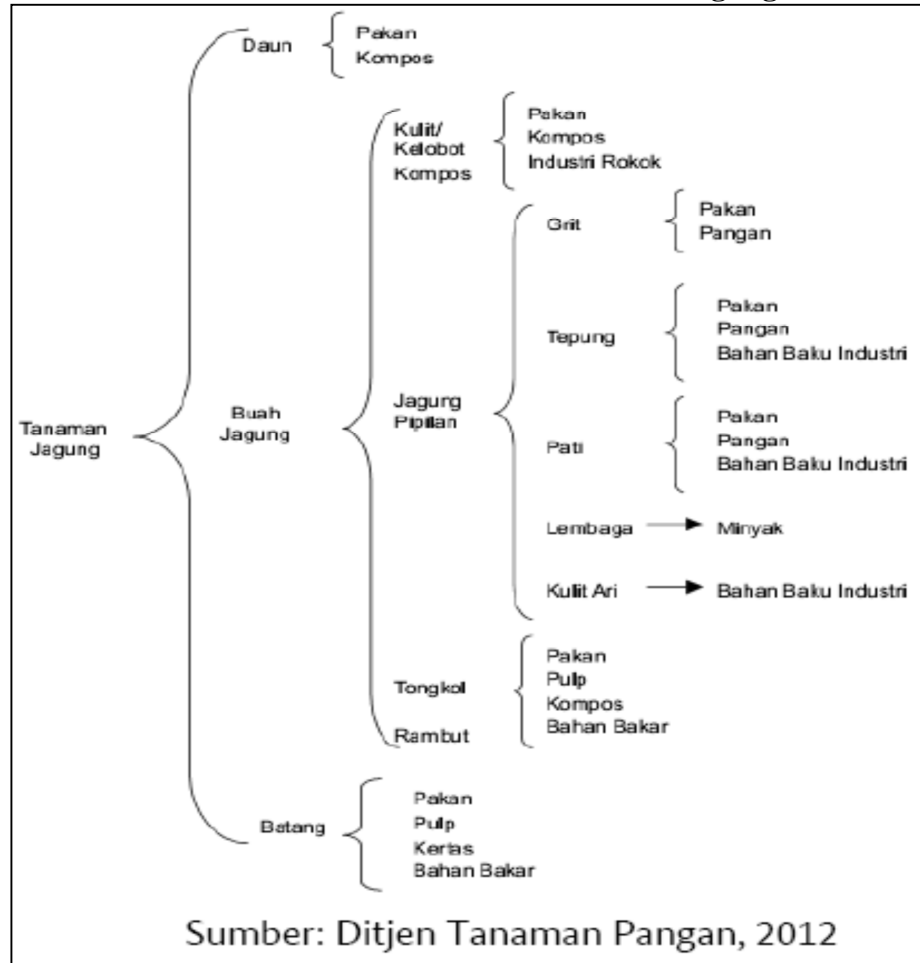
15	Ketambe	1.000	300,00	200,00	100,00		
16	Delengpokhkise n	1.600	480,00	320,00	160,00		
JUMLAH		28.050	8.415,0	5.610,0	2.805,0	4.207,50	

4.4.3 Agroindustri Jagung

Sampai saat ini, agroindustri yang berbasis komoditas jagung relatif belum berkembang di Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian, diketahui industri yang cukup berkembang adalah industri pipil jagung. Praktek yang terjadi selama ini, para petani setelah memanen jagung lalu mengolahnya dalam bentuk pipil dan menjual hasil olahan tersebut ke Medan. Hanya sebagian kecil yang dijual untuk daerah tempatan. Hal ini disebabkan oleh nilai jual jagung jauh lebih tinggi jika dijual ke Medan daripada dijual di daerah tempatan.

Selain industri pipil jagung, ada beberapa jenis industri yang dapat dikembangkan dari komoditas jagung, diantaranya industri tepung jagung, sirup, gula jagung dan pakan ternak. Masyarakat akan dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk komoditas-komoditas olahan produk turunan jagung tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sejauh ini, memang sudah ada industri tepung jagung dan pakan ayam (bahan baku jagung) di Aceh Tenggara, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas.

Gambar 4.4.1 Produk Turunan Jagung



Sumber: Ditjen Tanaman Pangan 2012

Nilai Tambah Produk Turunan

Beberapa produk turunan yang bisa dikembangkan dari bulir jagung adalah: jagung pipil kering, tepung jagung dan pakan ternak berbahan dasar jagung. Adapun nilai tambah produk turunan jagung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.6 Nilai Tambah Produk Turunan Jagung di Aceh Tenggara

No	Jenis Produk	Harga (Rp/Kg)	Pertambahan Nilai (%)
1	Jagung Pipil	Rp 400	Rp 1.300 (325%)
2	Tepung Jagung	Rp 400	Rp 4.500 (1125%)
3	Pakan Ternak	Rp 400	Rp 1.900 (475%)

Sumber: Hasil wawancara

Perhitungan Nilai Tambah Produk Turunan

Pemberian nilai tambah pada tongkol jagung dimulai dengan menjadikannya sebagai jagung pipil dengan menggunakan mesin pemipil. Dengan dilakukan penjemuran hingga kadar air mencapai 15%-17% maka harga jagung akan menjadi sekitar Rp.1300/kg. Pada skala kecil, dengan berbagai perlengkapan mesin dan tempat penjemuran, kapasitas 10 ton buah jagung akan menghasilkan 3,8 ton jagung pipil kering dengan total pendapatan sebesar Rp.4.538.000.

Dari jagung pipil akan dapat dijadikan berbagai produk yang lain, salah satunya adalah tepung jagung. Tepung jagung sendiri memiliki berbagai varian, tergantung kelanjutan dari proses penggilingan jagung pipil itu sendiri. Dengan kapasitas produksi 1 ton jagung pipil kering, akan dihasilkan 750 kg tepung jagung dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.037.500.

Pemanfaatan tumbuhan jagung juga dapat dimaksimalkan dengan mengolahnya menjadi pakan ternak. Seluruh bagian batang jagung dapat digunakan. Dari 3 ton buah jagung kering, akan dapat diproduksi lebih dari 4,5 ton pakan ternak dengan harga jual sekitar Rp.1.900/kg. Maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp.3.450.000 dari aktifitas produksi, selain biaya investasi.

4.4.4 Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Ditinjau dari keterlibatan tenaga kerja dalam berbagai sektor usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja cukup besar di Aceh Tenggara. Berdasarkan data BPS melalui sensus pertanian (ST 2013), jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten

Aceh Tenggara mencapai 29.684 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga usaha tanaman jagung sebanyak 11.664 atau 39% dari total jumlah rumah tangga usaha pertanian.

Berdasarkan data jumlah rumah tangga usaha tanaman jagung 39% di atas, maka dapat diperkirakan jumlah tenaga kerja usaha tanaman jagung adalah 39% dari total tenaga kerja sektor pertanian (38.303 orang), yaitu 15.051 orang. Produktivitas tenaga kerja usaha tanaman jagung adalah jumlah produksi jagung (17.934.577 kg) dibagi jumlah tenaga usaha tanaman jagung (15.051 orang), yaitu 1.191.587 kg/petani/tahun.

Analisis Finansial Usaha Tanaman Jagung

Berikut disajikan analisis finansial usaha tanaman jagung untuk luas lahan rata-rata yang digarap oleh petani jagung di Kabupaten Aceh Tenggara yang berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013 sebesar 0,9 ha.

Tabel 4.4.7 Produksi dan Produktivitas Jagung di Aceh Tenggara, 2013

Analisis Finansial Usaha Tanaman Jagung 0,9 ha satu kali Musim Panen				
No	Keterangan	Quantity	Harga	Total
A Pengeluaran				
	Benih	3.6 zak	Rp370,000	Rp1,332,000
	Urea	2 zak	Rp350,000	Rp 700,000
	ST	2 zak	Rp150,000	Rp 300,000
	KCL	2 zak	Rp150,000	Rp 300,000
	Semprot	4 liter	Rp 55,000	Rp 220,000
				Rp2,852,000
B Tenaga Kerja				
	Upah nanam	10 orang	Rp 70,000	Rp 700,000
	Upah lobang	2 orang	Rp 70,000	Rp 140,000
	Upah semprot	2 orang	Rp 70,000	Rp 140,000
	Upah packing	3 orang	Rp 70,000	Rp 210,000
	Upah semprot	2 orang	Rp 70,000	Rp 140,000
	Babat	3 hari	Rp150,000	Rp 450,000
				Rp1,780,000
C Pendapatan Kotor				Rp12,000,000
D Pendapatan Bersih				Rp7.368,000

Sumber: Hasil wawancara

Dari tabel tersebut dapat diketahui pendapatan bersih yang diperoleh oleh petani jagung dalam satu kali masa panen adalah sebesar Rp 7.368.000. Jika dalam satu tahun para petani dapat menggarap lahan 3 kali, maka petani jagung akan memperoleh pendapatan sebesar Rp

22.104.000. Dengan penghasilan demikian, jika dibagikan setiap bulan maka pendapatan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 1.842.000. Pendapatan petani ini tentunya akan sangat berkurang jika lahan yang digarap bukan milik sendiri. Jika anggota keluarga petani sebanyak 6 orang, maka pendapatan rata-rata anggota keluarga berada di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan jika seorang pekerja dengan masa kerja 4 hari dengan upah perhari sebesar Rp 70.000, maka pendapatannya sebesar Rp 280.000 perladang. Jika seorang pekerja dapat bekerja dalam satu musim tanam sebanyak 10 ladang maka dia akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.800.000.

Jika dalam satu tahun seorang pekerja bekerja tiga kali musim panen, maka pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 8.400.000, dengan pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp 700.000. Dengan asumsi jika seorang pekerja mempunyai anggota rumah tangga sebanyak 5 atau 6 orang, maka pekerja tersebut dan keluarganya masih berada di bawah garis kemiskinan (garis kemiskinan Aceh Tenggara Rp 206.797).

Analisis Finansial Produk Turunan Jagung

Pipil Jagung

- Untuk 0.9 ha menghasilkan 5,4 ton tongkol jagung.
- Dari 5,4 ton tongkol menghasilkan rata-rata 70% pipil jagung.
- Jadi pipil yang dihasilkan sebesar 3.700 kg dikali dengan Rp 3000/kg, maka menghasilkan pendapatan sebesar Rp 11.100.000.
- Biaya produksi pipil dalam 1 ton Rp 100.000, dengan komposisi Rp 35.000 untuk mesin dan Rp 30.000 untuk pemilik mesin, dan Rp.35.000 untuk pekerja
- Selama 1 tahun (3 kali musim panen) petani mendapatkan Rp 33.300.000. Jadi perbulan rata-rata petani memperoleh Rp 2.775.000.
- Kalau lahan yang digarap lahan sendiri, maka dengan asumsi anggota keluarga petani sebanyak 6 orang, maka petani dan anggota keluarganya berada di atas garis kemiskinan (garis kemiskinan Aceh Tenggara tahun 2013 Rp 206.797).

Pakan Ternak

Keuntungan yang diperoleh dari agroindustri pakan ternak lebih besar dari pipil jagung, dimana pendapatan bersih dapat mencapai Rp 3.450.000 dengan masa kerja 10 hari. Pendapatan rata-rata perbulan pemilik usaha berada di atas garis kemiskinan, hal yang sama juga berlaku bagi pekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4.8 Perhitungan Agroindustri Pakan Ternak

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Bahan Baku				
	a Jagung kering - tongkol	3000	Kg	Rp 500	Rp 1,500,000
	b Bahan Organik Lainnya	1500	Kg	Rp 300	Rp 450,000
	c Bahan Fermentasi	1	Paket	Rp 200,000	Rp 200,000
2	Bahan Penolong/pendukung				
	a Mesin Giling	1	Unit	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000
	b Mesin Choper	1	Unit	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
	c Peralatan fermentasi	1	Set	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
	d Bahan Bakar	20	Ltr	Rp 7,500	Rp 150,000
3	Tenaga kerja				
	a Tenaga Kerja Tetap				
	b Tenaga Kerja Harian	10	Hari	Rp 300,000	Rp 3,000,000
4	Penyusutan				
5	Total Cost (TC)				Rp 13,300,000.00
6	Keuntungan (TR-TC)				Rp 3,450,000.00

Sumber: Hasil wawancara

4.4.5 Tenaga Penyuluh, Modal, Kelembagaan dan Regulasi

Keberadaan penyuluh sangatlah penting dalam meningkatkan produktivitas hasil panen. Selama ini para penyuluh sudah bekerja

maksimal, namun jumlahnya masih kurang. Adapun jumlah penyuluh sebanyak 270 orang. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah desa yang di Aceh Tenggara sebanyak 385 desa. Sementara itu, perlu juga dicermati mengenai kenyataan bahwa dalam beberapa tahun mendatang beberapa penyuluh PNS akan menghadapi masa pensiun. Perekrutan tenaga penyuluh baru, khususnya yang berstatus PNS sangat dibutuhkan.

Untuk penyuluh THL, pemkab memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja mereka. Saat ini diluar honor yang diberikan pemerintah pusat selama 10 bulan, THL mendapat honor dari pemkab sebesar Rp 2 juta/bulan. Jumlah honor ini termasuk yang tertinggi dibandingkan honor yang diperoleh para penyuluh lainnya di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Selain itu perlu ditingkatkan sumberdaya penyuluh dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang pada gilirannya berperan dalam meningkatkan produktivitas hasil panen.

Menyangkut dengan modal, sumber pembiayaan usahapara petani jagung selama ini umumnya berasal dari tengkulak. Praktek yang berlaku tengkulak akan menyediakan dana untuk kebutuhan saprodi dan berbagai macam keperluan lainnya. Pada masa panen, para tengkulak menampung produk yang dihasilkan.

Kondisi ini mestinya mendorong para petani jagung untuk memperkuat barisan dengan sesama petani lainnya misalnya dengan membentuk koperasi. Keberadaan koperasi ini akan memudahkan mereka memperoleh modal untuk menjalankan kegiatan ekonominya.

Petani jagung juga semestinya memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dengan keberadaan PP No.11/2010. PP tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini memungkinkan petani jagung memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya. Tapi sayangnya PP ini belum berjalan seperti yang diharapkan.

4.4.6 Isu-isu Strategis Pengembangan Agroindustri Jagung di Kabupaten Aceh Tenggara

A. Subsistem Hulu

1. Luas lahan yang digarap rata-rata petani jagung di Aceh Tenggara masih relatif terbatas, di bawah 0,9 ha.
2. Harga bibit jenis P23 relatif mahal.
3. Harga pupuk juga relatif mahal dan pupuk subsidi selalu terbatas jumlahnya saat musim tanam.
4. Jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik kurang dari 50%. Padahal budidaya jagung pada lahan basah memberikan hasil panen yang lebih baik dibandingkan pada lahan kering.

B. Subsistem Budidaya

Budidaya jagung masih banyak dilakukan secara tradisional (dalam pengemburan tanah, penanaman bibit, dll).

C. Subsistem Hilir

1. Sebagian besar hasil panen jagung dijual ke Sumatera Utara.
2. Harga jual dari petani Rp 3.000/kg, lebih murah dibandingkan dengan harga di Sumatera Utara.
3. Gudang dimiliki oleh para tengkulak sehingga harga jagung sangat ditentukan oleh mereka.
4. Industri pengolahan jagung yang berkembang umumnya industri pipil dan berskala kecil. Sementara industri pakan ayam dan tepung jagung hanya ada beberapa.
5. Produk tepung jagung dan pakan ayam umumnya hanya dijual di toko tempatan dan dikonsumsi di Kuta Cane.

D. Subsistem Penunjang

1. Jumlah penyuluh masih kurang, yaitu 270 orang, sementara jumlah desa di Aceh Tenggara mencapai 385 desa

2. Dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang, beberapa penyuluh akan menjalani masa pensiun.
3. Kurangnya skill petani dalam pengolahan produk jagung.
4. Pembiayaan kegiatan usaha petani jagung banyak yang masih tergantung pada para tengkulak yang menampung hasil penjualan.
5. Belum adanya lembaga yang kuat dan representatif yang mengurus kepentingan petani jagung.
6. Pola kemitraan antara pengusaha besar dan petani jagung belum berkembang.
7. PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani jagung memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahanya belum berjalan seperti yang diharapkan.
8. Jauhnya jarak tempuh untuk mengangkut produk yang dihasilkan ke luar daerah (Sumut dan daerah-daerah lainnya).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada bagian sebelumnya, dapat ditarik sejumlah kesimpulan dan rekomendasi menyangkut pengembangan agroindustri yang berbasis komoditas unggulan pada daerah-daerah yang diteliti di Aceh sebagaimana yang disajikan pada matriks berikut.

A. Agroindustri Berbasis Komoditas Padi (Aceh Utara)

SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
1. Hulu		
a. Saprotan (sarana produksi pertanian) dan alsintan (alat dan mesin pertanian)	- Luas lahan rata-rata yang digarap petani 0,57 ha, sementara skala kelayakan ekonomi minimal 2 ha.	- Lahan yang digarap setiap petani perlu ditingkatkan minimal 2 ha. (Bupati, Distannak, Disbunhut, BPN)
	- Belum cukup tersedia benih/bibit unggul - Penyediaan bibit unggul sering terlambat.	- Perlu penambahan demplot (lahan percontohan) pengembangan padi di kecamatan-kecamatan (untuk pengembangan bibit, pemupukan, pemeliharaan, dll). - Perlu bantuan untuk penangkar (penyedia) benih dalam hal modal, pelatihan, dll. (Distannak, BPN)
	- Langkanya pupuk bersubsidi pada saat dibutuhkan.	- Perlu penambahan kuota pupuk. (Bupati, Distannak) - Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait dalam pelaksanaan distribusi pupuk. (Distannak, BPKLuh, Disbunhut, Kepolisian, Bupati) - Penegakkan hukum (<i>law enforcement</i>) secara tegas thdp penyimpangan distribusi pupuk. (Kepolisian, Kejaksaan)

b. Alsintan (alat dan mesin pertanian)	- Sebagian alsintan (traktor tangan) yang dimiliki oleh petani berada dalam kondisi rusak.	- Peningkatan kesadaran masyarakat agar alsintan, terutama dari bantuan pemerintah, dipelihara dgn baik demi keuntungan petani sendiri. (Distannak)
	- Kondisi jaringan irigasi saluran beton 60% baik dan saluran tanah 37% baik.	- Perlu prioritas anggaran untuk perbaikan jar. irigasi yg rusak. (Dinas Pengairan & ESDM)
SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
2. Budidaya		
	- Penanaman padi oleh sebagian petani masih belum mengikuti anjuran jarak tanam yang dianjurkan Dinas Pertanian.	- Penyuluhan lebih intensif tentang cara tanam padi yang tepat. - Penggalangan partisipasi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara tanam padi. (BKPLuh, Distannak)
	- Pemakaian pestisida dan pupuk (urea, SP-36, KCl, dan NPK) oleh sebagian petani belum tepat, baik dari sisi dosis maupun waktu penggunaan.	- Penyuluhan lebih intensif penggunaan pupuk dan pestisida. - Perlu penggalangan partisipasi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan pupuk dan pestisida. (BKPLuh, Distannak)
3. Hilir		
a. Penanganan hasil segar	- Jumlah padi Aceh Utara yang diolah di Sumatera Utara relatif cukup besar (40% - 60%?).	- Diperlukan pendirian pabrik penggilingan padi modern skala besar yang dapat menyaingi harga beli pengusaha Sumut. (Bupati, Disperindag, KP2T, KLH)
	- Pedagang Sumut membayar dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang ditawarkan pedagang lokal.	
	- Pendapatan petani masa panen raya berkurang karena harga padi jatuh.	- Perlu penerapan Sistem Resi Gudang (SRG). Melalui SRG, petani dapat menunda menjual padi yang dimilikinya pada saat harga jatuh. (Disperindag, Bupati)

<p>b. Penanganan hasil olahan</p>	<p>- Produk olahan padi yang dikembangkan masih terbatas (beras, tepung beras dan dedak). Pengembangan produk-produk turunan dan sampingan lainnya (aneka kue-kue, kompos, dll) belum berkembang.</p>	<p>- Diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan produk-produk turunan padi (kue-kue, kompos, dll). (Disperindag)</p> <p>- Perlu pengembangan sentra-sentra produksi dan pemasaran kue tradisional berbahan baku produk olahan padi (beras, tepung beras, dll) dengan dukungan promosi, modal, kemasan dan kualitas secara kontinu. (Disperindag)</p>
	<p>- Tepung beras yang dihasilkan perusahaan-perusahaan di Aceh Utara umumnya belum memiliki kemasan khusus.</p>	<p>- Perlu bimbingan <i>packaging</i> tepung beras agar produk memiliki <i>branding</i> jelas untuk meningkatkan pemasaran. (Disperindag)</p>
<p>4. Penunjang</p>		
<p>a. Penyuluh</p>	<p>- Jumlah penyuluh 258 orang, sementara jumlah desa ada 852.</p>	<p>- Penambahan jumlah penyuluh minimal 1 atau 2 orang/tahun. (BKPLuh, Bupati, Setdakab)</p>
<p>SUBSISTEM/ASPEK</p>	<p>ISU STRATEGIS</p>	<p>REKOMENDASI/INSTANSI</p>
	<p>- Penyuluh yang akan pensiun tahun 2015 3 org, tahun 2016 3 org, dan tahun 2017 5 org.</p>	
	<p>- Dari 133 penyuluh PNS, 49 orang SLTA, dan dari 125 orang THL, 68 orang SLTA.</p>	<p>- Perlu peningkatan pendidikan formal penyuluh, terutama yang masih berada di jenjang SMA. (BKPLuh, Bupati)</p>
	<p>- Dalam 5 tahun terakhir, ada sekitar 3 penyuluh yang dimutasi.</p>	<p>- Perlu ada ketentuan larangan pemindahan penyuluh ke jabatan struktural. (Bupati)</p>
	<p>- Honor THL yang tidak dibayar pemerintah pusat (2 bulan) dibayar pemkab/bulan Rp 1 juta. Juga ada tambahan uang</p>	<p>- Perlu peningkatan honor dan/atau biaya operasional yang dibayar oleh pemkab di luar yang ditanggung oleh APBN. (Bupati)</p>

	jalan penyuluh//bulan Rp 250 ribu.	
b. SDM petani	- Pemikiran petani dalam mengelola pertanian masih tradisional (turun temurun).	- Diperlukan pelatihan kepada petani mengenai pengelolaan pertanian secara modern (benih, cara tanam, pemupukan, dll). (Distannak, BKPLuh)
c. Pembiayaan/modal	- Masih terbatasnya pengetahuan dan akses modal petani dan pelaku usaha agroindustri untuk pengembangan usaha.	- Perlunya sosialisasi dan pengembangan skema-skema pembiayaan usahatani dan agroindustri. (Bupati, Distannak)
d. Kelembagaan	- Masih lemahnya kelembagaan petani dalam mendukung adopsi teknologi pertanian (penanaman, pupuk, dll), permodalan, dan informasi.	- Penguatan kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian lewat pelatihan & pendampingan. (Distannak, BKPLuh)
	Kec. Dewantara dan Kec Nisam Antara belum memiliki Balai Penyuluh Pertanian (BPP).	- Pendirian BPP di Kec. Dewantara dan Kec. Nisam Antara. (Bupati, BKPLuh)
e. Regulasi	- Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya belum dijalankan dengan serius.	- PP No. 11/ 2010 perlu secara serius diupayakan pelaksanaannya. Pembuatan regulasi turunan dan pengangan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan perlu segera dilakukan. (Bupati, DPRK, Distannak, Disbunhut, BPN)
f. Kemitraan	- Pola kemitraan plasma-inti usaha produk turunan padi belum berkembang.	- Pengembangan kemitraan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif (jaminan keamanan, penataan regulasi, insentif, dll). (Kepolisian, Bupati, DPRK, Disperindag, KP2T)

B. Agroindustri Berbasis Komoditas Kakao (Pidie Jaya)

SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
1. Hulu		
	- Terbatasnya luas lahan perkebunan kakao yang dikelola oleh rumah tangga petani kakao di Pidie Jaya yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Hingga saat ini, luas lahan yang dikelola rata-rata 0,54 ha.	- Peningkatan luas lahan perkebunan kakao yang dikelola oleh rumah tangga sehingga memenuhi kelayakan luas lahan yang ideal minimal 2 ha. (Dishutbun, Bupati, BPN)
	- Masih kurangnya ketersediaan bibit unggul. Saat ini bibit yang relatif kuat menghadapi penyakit adalah jenis S1 dan S2 dari Sulawesi Selatan. Sementara M01, meski kualitasnya cukup baik, tetapi cenderung rentan terhadap penyakit.	- Perlunya lebih banyak penyediaan bibit jenis S1 dan S2. - Perlu pengembangan demplot (lahan percontohan) pengembangan kakao di kecamatan-kecamatan (untuk pengembangan bibit unggul, pemupukan, pemeliharaan, dll). (Dishutbun)
2. Budidaya		
	- Tingginya hama penyakit terutama jamur penggerak dan busuk buah yang disebabkan oleh jamur.	- Penanggulangan hama penyakit terutama jamur penggerak dan busuk buah yang disebabkan oleh jamur, misalnya dgn bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi. (Dishutbun)
	- Masih banyak kebun yang tidak mendapatkan perawatan yang optimal dari pemiliknya.	- Peningkatan sosialisasi, diseminasi dan pendampingan bagi petani kakao dalam perawatan kakao. (Dishutbun)
3. Hilir		

a. Penanganan hasil segar	- Pemasaran, terutama ekspor masih terkendala. Penyebabnya terkait kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk sebagaimana disyaratkan dalam kontrak dagang.	- Pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk kakao untuk keperluan penjualan dalam negeri dan ekspor luar negeri dalam hal intensifikasi (pemupukan, pengembangan bibit unggul, pemeliharaan, dll). (Dishutbun, Disperindagkop & UKM)
	- Rendahnya produksi kakao yaitu sebesar 500 – 700 kg per tahun per ha. Sementara potensinya sampai 1,2 ton di daerah ini.	
	- Harga di tingkat petani rendah (Rp 14.000/kg), kondisi 7 jam di jemur. Harga yang sudah kering dapat mencapai Rp. 32.000/kg.	- Revitalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah ada di Pijay. Diperlukan sosialisasi mengenai SRG dan pendampingan agar petani dapat memenuhi standar produk yang disyaratkan oleh SRG dari sisi kualitas maupun kuantitas. (Disperindagkop & UKM, Dishutbun)
	- Tata niaga (rantai pemasaran) kakao didominasi oleh pedagang pengumpul.	
SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
b. Penanganan hasil olahan	- Jumlah industri pengolahan coklat masih minim (hanya Koperasi Rimbun yang dikelola oleh Pak Irwan Abdullah).	- Perlunya pengembangan industri pengolahan coklat melalui bantuan peralatan, pelatihan dan pendampingan. (Disperindagkop & UKM)
	- Koperasi Rimbun masih mengalami beberapa kendala dlm usahanya, yaitu kapasitas produksi yang masih rendah, pemasaran yang belum stabil, dan persaingan dengan produk yang sudah lama beredar di pasar.	- Untuk mengembangkan Industri pengolahan kakao yang sudah ada (Koperasi Rimbun), perlu bantuan meningkatkan kapasitas produksi usaha ini lewat bantuan seperti modal dan peralatan. (Disperindagkop & UKM, Bupati)

	<p>- Pemasaran hasil olahan kakao Koperasi Rimbun masih bersifat lokal (Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Lhokseumawe). Pemasaran ke daerah lainnya, termasuk Medan, dilakukan berdasarkan pemesanan dalam skala relatif kecil.</p>	<p>- Diperlukan promosi produk secara ekstensif untuk lebih memperkenalkan keberadaan dan keunggulan produk. (Disperindagkop & UKM)</p>
4. Penunjang		
a. Penyuluh	<p>- Penyuluh PNS bidang pertanian 19 orang, kehutanan 2 orang, dan peternakan 3 orang. Sedangkan THL 99 orang. Penyuluh masih kurang karena ada 222 desa.</p>	<p>- Perlunya penambahan jumlah penyuluh, baik yang berstatus PNS maupun THL. (BPKP, Bupati, Setdakab)</p>
	<p>- Penyuluh yang akan pensiun tahun 2015 sebanyak 3 orang dan tahun 2017 sebanyak 6 orang.</p>	
	<p>- Honor THL yang dibayar Pemkab (selama 2 bulan) per bulan Rp 800.000.</p>	<p>- Perlunya penambahan honor dan/atau biaya operasional kepada THL diluar yang dibiayai APBN. (Bupati)</p>
	<p>- Penyuluh yang sudah pernah mengikuti diklat kakao masih terbatas, hanya 6 orang.</p>	<p>- Perlu penambahan jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan mengenai kakao. (BPKP)</p>
	<p>- Jumlah penyuluh PNS yang berpendidikan SLTA dan D3 sebanyak 5 orang.</p>	<p>- Perlunya peningkatan jenjang pendidikan formal PNS yang masih SLTA dan D3. (BPKP, Bupati)</p>

b. Pembiayaan/modal	- Modal finansial petani kakao relatif rendah, akses ke sumber permodalan juga sulit.	- Perlunya pembukaan akses modal yang lebih luas kepada petani kakao (kredit murah, bantuan modal khusus, dll). (Dishutbun, Bupati)
SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
c. Kelembagaan	- Petani masih bekerja secara individu yang menimbulkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan pasar, kualitas, dan kontinuitas, disamping lemahnya <i>bargaining power</i> petani. - DCC (<i>District Cocoa Clinic</i>), lembaga petani yang dibentuk tahun 2011 masih mengalami kendala dalam mengadakan pelatihan, pembibitan, pemupukan, pemasaran, pembuatan kebun clone, dll.	- Diperlukan bimbingan teknis dan bantuan dana untuk penguatan kelembagaan petani dan mendukung kegiatan DCC. (Dishutbun)
d. Regulasi	- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya belum dijalankan.	- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 perlu secara serius diupayakan pelaksanaannya. Pembuatan regulasi turunan dan penganganan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan perlu segera dilakukan. (Bupati, DPRK, Dishutbun, BPN)
e. Infrastruktur	- Jalan menuju sentra produksi kakao sebagian besar dalam kondisi rusak dan/atau perkerasannya masih jenis tanah/kerikil.	- Perlu perbaikan dan peningkatan jalan-jalan yang menuju sentra produksi kakaountuk memudahkan mobilitas hasil produksi menuju lokasi pemasaran(diantaranya Jl Cot Keurendong sampai Kubu Birah Desa Rusip, Blang Thoe Desa

		Dayah Keumala sampai Alue Meluwek Desa Rusip, dan Jl Alue Bili Desa Mesjid Pudeuk Baroh). (Dinas PU)
--	--	--

C. Agroindustri Berbasis Komoditas Bandeng (Aceh Timur)

SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
1. Hulu		
	- Rata-rata petani memiliki lahan 150x150 m ² . - Lebih banyak lahan tambak dimiliki oleh para toke.	- Pemanfaatan lahan sehingga petani dapat memiliki luas lahan tambak minimal 3 ha untuk kelayakan ekonomi.(DKP, Bupati, BPN)
2. Budidaya		
	- Sebagian besar petani masih melakukan usaha yang relatif kecil dan menyewa lahan dengan keuntungan yang terbatas.	
3. Hilir		
a. Penanganan hasil segar	- Penjualan hasil panen banyak ditampung oleh tengkulak yang berfungsi sebagai pengumpul.	- Perlunya pengembangan tempat penampungan bandeng (<i>cold storage</i>) untuk menampung bandeng yang melimpah di kala panen agar harganya terkontrol dan menguntungkan petani. (DKP)

b. Penanganan hasil olahan	- Agroindustri yang berbasis komoditas bandeng belum berkembang di Aceh Timur. Ikan ini umumnya masih dijual dalam bentuk mentah, baik ke Banda Aceh dan daerah sekitarnya, maupun ke Sumatera Utara.	- Perlu pengembangan agroindustri yang berbasis komoditas bandeng (bandeng presto, bandeng pincet, bakso, dll) di Aceh Timur lewat pelatihan, penyuluhan dan eksebis. (Disperindagkop) - Bandeng dan produk turunannya perlu dijadikan komoditas unggulan Aceh Timur. Pemkab dapat membuka beberapa galeri Bandeng di tempat persinggahan atau dititipkan pada rumah makan-rumah makan dan supermarket. (Bupati, Disperindagkop)
	- Masyarakat Aceh umumnya dan Aceh Timur khususnya masih belum terbiasa mengkonsumsi produk bandeng dalam bentuk olahan seperti bandeng presto, bandeng pincet, bakso, dll.	- Perlu pengembangan sentra-sentra produksi dan pemasaran produk turunan bandeng di Aceh Timur. (Disperindagkop, Bupati)
SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
c. Penunjang		
a. Penyuluhan	- Minimnya jumlah penyuluh bidang perikanan, saat ini jumlah penyuluh hanya 20 orang.	- Perlu penambahan penyuluh perikanan, sehingga idealnya dalam jangka panjang dapat mencapai jumlah sekitar 100 orang. (BPKP, Bupati, Setdakab)
	- Penyuluh perikanan yang berpendidikan S1 18 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA/SMK 2 orang.	- Perlunya peningkatan jenjang pendidikan dan/atau pelatihan penyuluh untuk lebih meningkatkan kompetensi. (BPKP, Bupati)
	- Diluar honor yang diberikan dari APBN selama 10 bulan, tidak ada pemberian uang dari pemkab kepada penyuluh.	- Perlunya peningkatan kesejahteraan THL dengan menambah uang honor dan/atau uang transportasi. (Bupati)
b. Modal	- Masih terbatasnya akses petani terhadap	- Perlunya perluasan akses petani terhadap modal dengan penguatan

	modal.	kelembagaan petani (melalui koperasi) maupun pengembangan skema kredit yang lebih terbuka bagi petani. (Disperindagkop, Bupati)
c. Kelembagaan	- Petani masih lemah dalam menghadapi ketergantungan pada tengkulak, baik dalam permodalan maupun penjualan hasil panen.	
d. Regulasi	- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahatannya belum dijalankan.	- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 perlu secara serius diupayakan pelaksanaannya. Pembuatan regulasi turunan dan penganganan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan perlu segera dilakukan. (DKP, Bupati, DPRK, BPN)

D. Agroindustri Berbasis Komoditas Jagung (Aceh Tenggara)

SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
1. Hulu		
a. Saprotan (sarana produksi pertanian)	- Kepemilikan lahan rata-rata petani 0,9 ha belum memenuhi kelayakan ekonomi.	- Perlu perluasan penggarapan lahan minimal 1,5 ha (Dinas Pertanian, Bupati, BPN)
	- Harga bibit mahal untuk jenis bibit P23.	- Perlu bantuan bagi penangkar (penyedia) benih dalam hal modal, pelatihan, dll. - Perlu penambahan ketersediaan bibit unggul. (Dinas Pertanian)
	- Harga pupuk mahal dan pupuk subsidi terbatas.	- Perlu penambahan kuota pupuk. (Bupati) - Perlu peningkatan kerjasama dan koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan distribusi pupuk. (Dinas Pertanian, BKPP, Dishutbun, Kepolisian, Bupati) - Penegakkan hukum (<i>law enforcement</i>) secara tegas

		terhadap penyimpangan distribusi pupuk. (Kepolisian)
b. Irigasi	- Irigasi yang dimiliki umumnya masih irigasi lama, banyak yang belum direnovasi. Jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik, masih dibawah 50%.	- Perlu perbaikan irigasi karena budidaya jagung pada lahan basah memberikan hasil panen yang lebih banyak dibandingkan pada lahan kering. (Dinas Pengairan)
2. Budidaya		
	- Budidaya umumnya masih dilakukan secara tradisonal. (dalam hal penggemburan tanah, penanaman bibit, dll)	- Sosialisasi mekanisasi budidaya jagung dikaitkan efisiensi produksi (efisiensi waktu dan tenaga perlu selaras dengan efisiensi biaya). (Dinas Pertanian, BKPP)
3. Hilir		
a. Penanganan hasil segar	- Selama ini hampir semua hasil panen dijual ke Sumatera Utara. - Harga jual dari petani Rp 3.000/kg, lebih murah jika dibandingkan dengan harga di Sumatra Utara. - Gudang dimiliki para tengkulak, sehingga harga sangat ditentukan oleh mereka.	- Diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan produk-produk turunan jagung (tepung, pakan, dll). (Disperindag) - Perlu pembuatan gudang sebagai tempat penampungan produk yang dihasilkan petani.(Disperindag)
b. Penanganan produk olahan	- Industri pengolahan jagung yang ada kebanyakan industri pipil dan masih berskala kecil. Sementara, industri pakan ayam dan tepung hanya ada beberapa.	- Industri rumah tangga pipil yang ada perlu dikembangkan lebih besar lewat pelatihan, bimbingan dan bantuan teknis lainnya, dll. - Pengembangan kawasan pusat penjualan produk turunan jagung (tepung, mihun jagung, sirup jagung, gula jagung, dll). (Disperindag)

SUBSISTEM/ASPEK	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI/INSTANSI
	- Produk tepung dan pakan ayam umumnya dijual di toko tempatan dan dikonsumsi di Kuta Cane.	- Perlu pelatihan dan bimbingan untuk peningkatan kualitas tepung dan pakan yang diolah dari jagung agar menjangkau pasar yang lebih luas. (Disperindag)
4. Penunjang		
a. Penyuluhan	- Jumlah penyuluh PNS dan THL 270 orang, sementara jumlah desa ada 385 desa. - Dalam waktu beberapa tahun ke depan, ada beberapa penyuluh PNS yang akan pensiun. - Honor tambahan yang diberikan Pemkab selama 2 bulan, yaitu Rp 2 juta/bulan.	- Penambahan jumlah penyuluh, baik yang PNS maupun THL. (BKPP, Bupati, Setdakab)
b. SDM petani	- Kurangnya skill petani dalam pengolahan produk jagung.	- Perlu lebih banyak pelatihan pengolahan produk turunan jagung kepada para petani. (Disperindag)
c. Pembiayaan/modal	- Pembiayaan masih bergantung pada para tengkulak yang menampung hasil penjualan.	- Peningkatan akses keuangan petani jagung (kredit murah, bantuan dari pemerintah, dll).
d. Kelembagaan	- Belum adanya lembaga yang kuat dan representatif yang mengurus kepentingan petani.	- Perlu dibuat lembaga kelompok petani jagung (seperti koperasi). (Dinas Kop & UKM)
e. Kemitraan	- Pola kemitraan pengusaha besar dan petani jagung dalam usaha budidaya jagung dan produk turunannya belum berkembang.	- Pengembangan kemitraan antara pengusaha dan petani. Pengusaha menyediakan saprodi, bimbingan teknis dan memasarkan hasil produksi. Juga perlu iklim investasi yang kondusif (jaminan keamanan, penataan regulasi, insentif, dll). (Kepolisian, Bupati, DPRK, Disperindag, KPPTSP)

<p>f. Regulasi</p>	<p>- PP No. 11/ 2010 tentang Penertiban dan Pedayagunaan Tanah Terlantar yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan tidur untuk mengembangkan usahataniya belum dijalankan. - Regulasi investasi yang ada belum cukup kondusif untuk pengembangan agroindustri.</p>	<p>-Pembuatan regulasi turunan PP No. 11/ 2010 dan penanganan berbagai hambatan penerapannya perlu segera dilakukan. - Pembuatan regulasi yang kondusif untuk pengembangan agroindustri (terkait perizinan, insentif pajak, sewa lahan, dll). (Bupati, DPRK, Dinas Pertanian, Disutbun, BPN)</p>
<p>g. Infrastruktur</p>	<p>- Akses jalan ke beberapa daerah tetangga (Medan, Gayo Lues) relatif jauh.</p>	<p>- Pembangunan jalan pintas Kuta Cane-Medan, Kuta Cane-Gayo Lues.(Dinas Bina Marga)</p>

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Aceh dan Bappeda Aceh, 2012. *Aceh Dalam Angka*.
- BPS Provinsi Aceh dan Bappeda Aceh, 2013. *Aceh Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013. *Aceh Tenggara Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Aceh Timur, 2013. *Aceh Timur Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Aceh Utara, 2013. *Aceh Utara Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2013. *Pidie Jaya Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013. *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Subsektor*.
- BPS Kabupaten Aceh Timur, 2013. *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Aceh Timur Menurut Subsektor*.
- BPS Kabupaten Aceh Utara, 2013. *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Aceh Utara Menurut Subsektor*.
- BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2013. *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Pidie Jaya Menurut Subsektor*.
- Kementerian Perdagangan, 2012. *Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Industri*.
- Lakitan, B., 2011. *Membangun Agroindustri dan Mewujudkan Sistem Inovasi: Agar Teknologi Berkontribusi pada Kesejahteraan Rakyat*. (Paper disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Agroindustri Kalimantan Selatan: Prospek, peluang, dan potensi, serta kendala. Lustrum ke 10 Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 23 Juni 2011).

PECAPP, 2013. Analisis Belanja Publik Aceh.

Porter, M.E., 1985. *Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance*. The Free Press. A Division of Macmillan Inc. New York.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh 2013-2017

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tenggara 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Timur 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Utara 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pidie Jaya 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2005-2025.

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033.

Tabangun Aceh, Edisi 36, Tahun IV, September 2013.